

RENCANA AKSI TAHUNAN (RAT)

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN LUWU



BAPPELITBANGDA KABUPATEN LUWU
TAHUN 2023

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah, kemiskinan juga merupakan gambaran kehidupan, dimana kemiskinan merupakan suatu keadaan yang menyangkut ketidakmampuan dalam memenuhi tuntutan kehidupan yang paling minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan

Salah satu dari 7 (tujuh) agenda pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah, meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan prioritas ketahanan ekonomi, RPJMN 2020 - 2024 menargetkan tingkat kemiskinan menurun menjadi 6,0 -7,0 persen.

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan tersebut, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Adapun strategi percepatan penanggulangan kemiskinan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tersebut adalah *Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.*

Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor : 408/VIII/2022 yang keanggotaannya melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan berbagai pihak dalam rangka melakukan Perencanaan, Pelaksanaan Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan program / kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019–2024, telah ditetapkan

Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu yakni “ Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi” , memperhatikan kondisi yang akan dicapai pada masa yang akan datang dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan, maka upaya Pemerintah Kabupaten Luwu dijabarkan dalam 10 (Sepuluh) Misi antara lain adalah ; Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat serta Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perluasan Lapangan Kerja.

Adapun target Pemerintah Kabupaten Luwu dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah dalam RPJMD Tahun 2019 - 2024 adalah 9,99 persen pada tahun 2024, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu , persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu pada tahun 2022 sebesar 12,49 persen atau sebanyak 46.500 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 381.015 jiwa. Salah satu faktor yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan daerah yakni faktor geografis yang menyebabkan masih terjadinya ketimpangan pendapatan dan pengeluaran masyarakat Kabuapten Luwu, dimana di Kabupaten Luwu masih terdapat beberapa desa yang sulit dijangkau serta keterpaduan program/kegiatan antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disebabkan variabel yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan masyarakat masih berbeda-beda sehingga penanggulangannya belum begitu akurat.

Dengan memperhatikan beberapa kondisi sebagaimana telah diuraikan di atas dengan berbagai perkembangan yang terjadi dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan, maka Pemerintah Kabupaten Luwu menyusun rencana kebijakan pembangunan daerah untuk menurunkan jumlah penduduk miskin melalui penyusunan Rencana Aksi Tahunan agar para stakeholder dapat mengurai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencapai target sasaran yang akan dicapai.

1.2. Maksud

Maksud penyusunan dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kabupaten Luwu adalah :

- a. Merumuskan Strategi Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan daerah
- b. Penguatan kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan
- c. Sebagai pemandu arah penajaman intervensi program dan kegiatan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan daerah.

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen RAT Kabupaten Luwu yakni antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Menegaskan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku lainnya dalam memecahkan masalah kemiskinan
- b. Mengetahui kondisi umum dan karakteristik serta faktor-faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Luwu untuk menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan daerah
- c. Merumuskan kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Luwu agar lebih tepat sasaran.

1.4. Sasaran

Sebagai penjabaran strategi dan program yang dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

1.5. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
17. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
18. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Penetapan Sumber Dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perda Nomor I Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 -2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;
23. Keputusan Bupati Luwu Nomor 408/VIII/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Luwu Tahun 2022.

1.6. Sistematika Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Luwu Tahun 2024

Rencana Aksi Tahunan Kabupaten Luwu Tahun 2022 disajikan sesuai dengan sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020, sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

Memuat landasan kebijakan mengenai Rencana Aksi Tahunan (RAT), Selain itu juga menjelaskan dokumen RAT mencantumkan landasan kebijakan secara terstruktur mengenai penanggulangan kemiskinan. Bagian ini juga menjelaskan maksud dan tujuan serta sasaran dari dokumen RAT, landasan hukum, yang kemudian dilanjutkan dengan sistematika penulisan dokumen RAT.

2. BAB II Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2021

Memuat analisis kondisi kemiskinan di Sulawesi Selatan sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun-tahun sebelumnya.

3. *BAB III Arah kebijakan Pembangunan dan Rencana Aksi Tahunan*

Memuat pelaksanaan kegiatan internal tim TKPK Kabupaten Luwu, kegiatan Koordinasi Program percepatan penanggulangan kemiskinan dan kegiatan penanganan Percepatan Pemasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Rencana Aksi Tahun 2022 ini menjadi bagian upaya pemerintah Kabupaten/Kota dalam memecahkan persoalan kemiskinan secara terpadu dan integral melalui kerja kolaboratif antar stakeholders. Rencana aksi tahun 2022 diharapkan dapat pemenuhan kebutuhan dasar, dan kualitas hidup, peningkatan pendapatan masyarakat serta mengurangi kantung-kantung kemiskinan demi terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu.

4. *BAB IV Penutup*

Memuat harapan daerah dengan disusunnya dokumen RAT terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu.

BAB II

ANALISIS KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidemensi, dimana kemiskinan bukan hanya sekedar kondisi ketidak mampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan material dasar, melainkan didalamnya mencakup dimensi rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan yang mempengaruhi kondisi seseorang dalam menjalani kehidupan untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sumberdaya produktif untuk mendukung mata pencaharian yang berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui bahwa penduduk miskin sebagian besar bermukim di wilayah pedesaan dan sudah menjadi permasalahan utama, oleh karena itu dalam pembangunan, Pemerintah Kabupaten Luwu telah menempatkan wilayah pedesaan sebagai prioritas utama dalam rangka penanggulangan kemiskinan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu.

Adapun langkah awal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Luwu adalah mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan kemiskinan maupun miskin dan bagaimana mengukur hal tersebut, sebagaimana diketahui bahwa konsep yang berbeda akan melahirkan cara pengukuran yang berbeda pula, setelah itu dilakukan pencarian mengenai faktor-faktor dominan (baik yang bersifat kultural maupun struktural) yang menjadi penyebab kemiskinan. Selanjutnya langkah berikut adalah mencari solusi yang relevan untuk memecahkan masalah dengan cara merumuskan strategi mengentaskan kelompok miskin atau masyarakat miskin. Adapun kemiskinan dari sisi ekonomi penyebabnya dibagi menjadi tiga yakni :

1. Kemiskinan muncul karena adanya perbedaan pola kepemilikan sumber daya yang dapat menimbulkan distribusi pendapatan yang mengalami ketimpangan, dimana penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya alam dalam jumlah terbatas dan memiliki kualitas rendah (secara mikro).
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumberdaya manusia, rendahnya sumberdaya manusia menyebabkan hasil produktifitas juga rendah yang pada gilirannya jasa upah juga mengalami hal yang sama, rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini diakibatkan karena rendahnya tingkat pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.
3. Kemiskinan muncul diakibatkan perbedaan dalam akses permodalan.

Ketiga penyebab kemiskinan tersebut diatas adalah bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan. Ketidak sempurnaan pasar dan kurangnya modal menimbulkan produktifitas sangat rendah, produktifitas rendah berdampak pada pendapatan rendah yang mengakibatkan simpanan tabungan masa depan dan investasi masyarakat golongan tersebut sangat rendah.

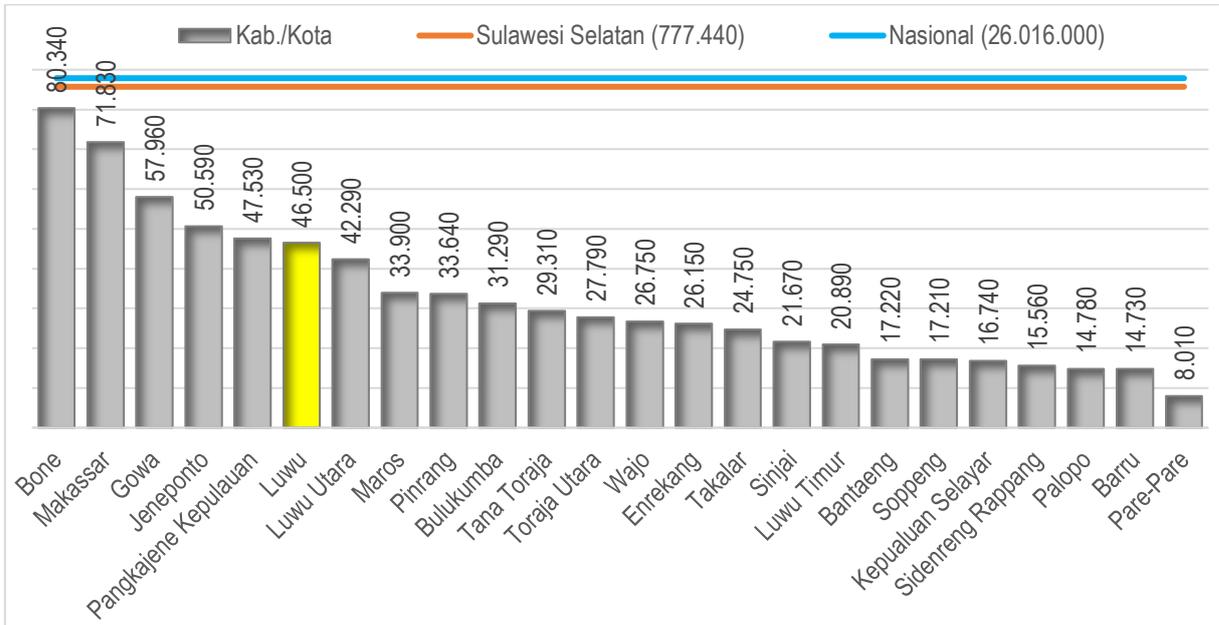
Selanjutnya pada bagian ini, kemiskinan diuraikan melalui capaian masing-masing indikator kemiskinan yang berbasis konsumsi atau pengeluaran, kemudian melalui indikator tingkat kemiskinan, indikator ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan serta infrastruktur dasar, adapun perkembangan capaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1. Bidang Konsumsi dan Pengeluaran

Kemiskinan muncul karena adanya perbedaan pola kepemilikan sumber daya yang dapat menimbulkan distribusi pendapatan yang mengalami ketimpangan, sehingga penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan memiliki kualitas rendah dalam memenuhi kebutuhan dasar. Beberapa indikator yang dihasilkan dari konsep kemiskinan ini diantaranya, persentase penduduk miskin (P0), Jumlah Penduduk Miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1), indeks keparahan kemiskinan (P2), serta tentunya Garis Kemiskinan (GK) yang dijadikan patokan atau penentuan status kemiskinannya, Tingkat kemiskinan ekstrim, tingkat ketimpangan serta pengeluaran penduduk miskin.

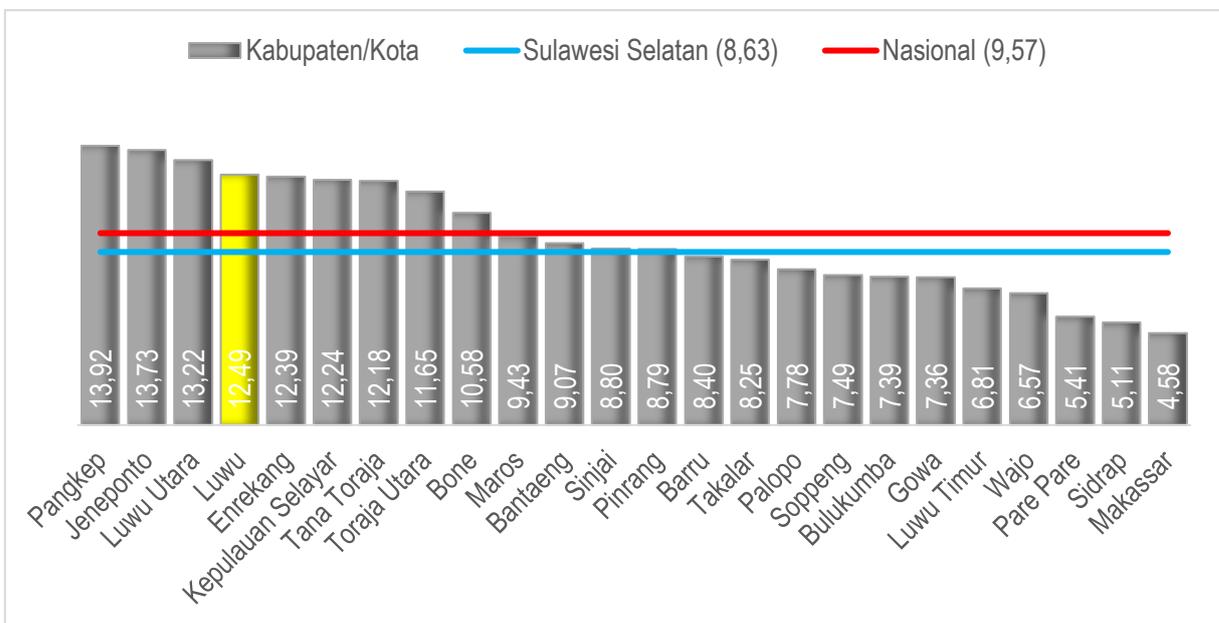
Indikator kemiskinan adalah tingkat kemiskinan, di Kabupaten Luwu pada tahun 2018 sebesar 13,36 persen atau 47.990 jiwa, selanjutnya menurun pada tahun 2019 menjadi sebesar 12,78 persen, atau sebanyak 46.180 jiwa, pada tahun 2020 menurun lagi menjadi sebesar 12,65 persen atau sebanyak 46.040 jiwa, selanjutnya pada tahun 2021 menurun lagi menjadi sebesar 12,59 persen atau sebanyak 46.260 jiwa menjadi sebesar 12,49 persen atau sebanyak 46.500 jiwa pada tahun 2022. Untuk lebih jelasnya di bawah ini di gambarkan dalam bentuk grafik perkembangan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu periode tahun 2018-2022.

Grafik 2.1.
Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2022



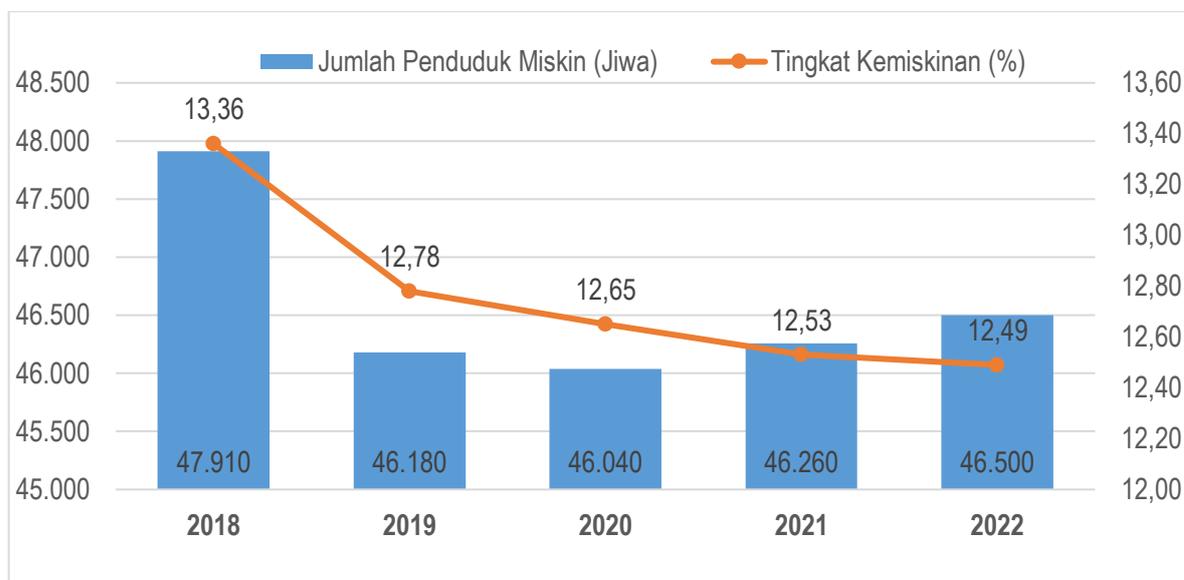
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu

Grafik 2.2.
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2022



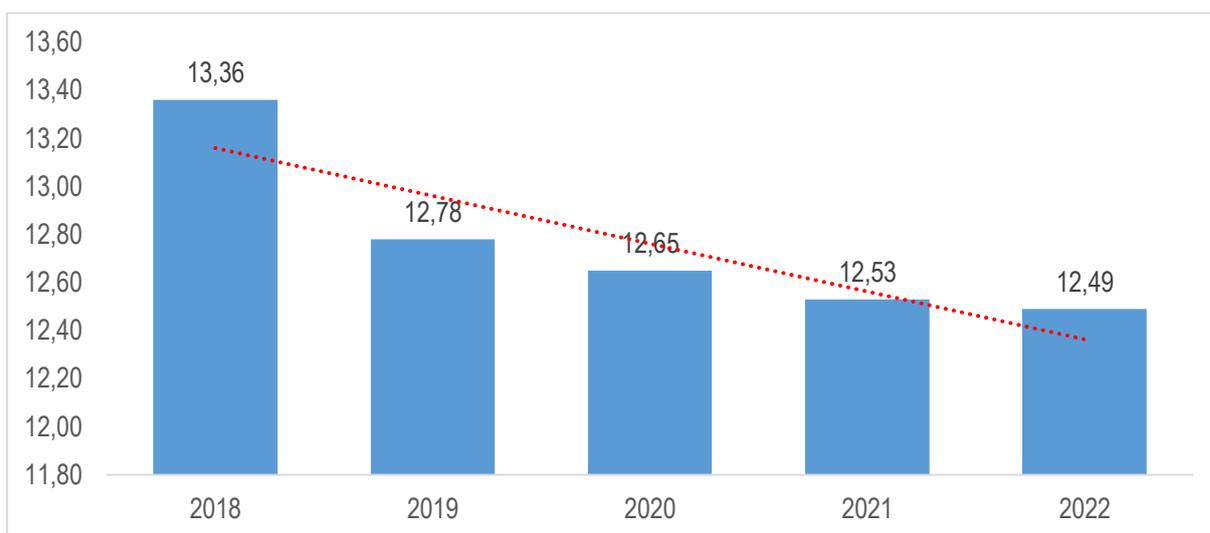
Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Grafik 2.3.
Perkembangan antar Waktu Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu Tahun 2018-2022



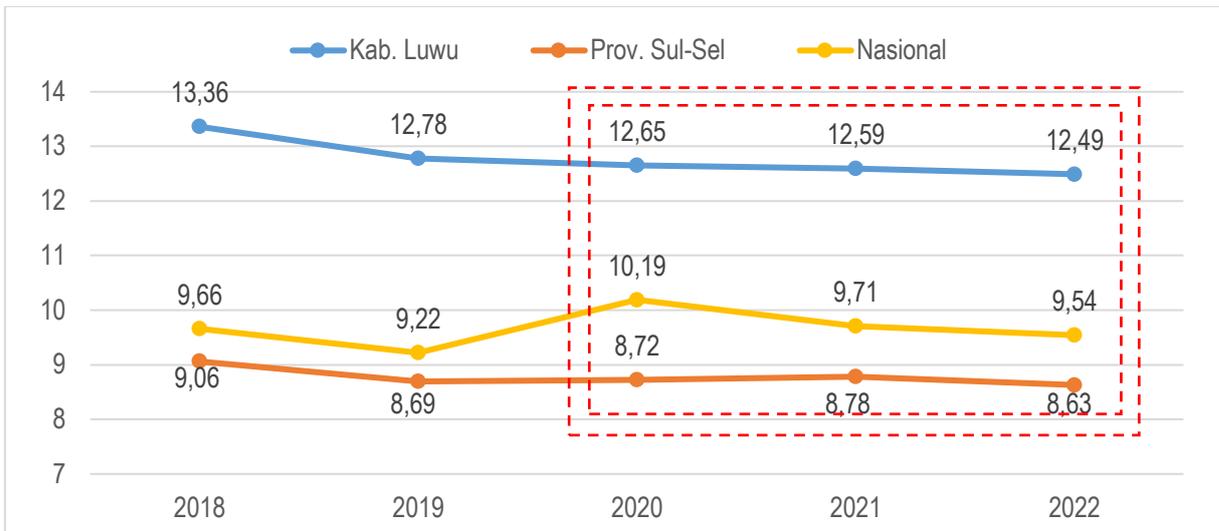
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu

Grafik 2.4.
Analisis Efektifitas Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2022



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu

Grafik 2.5.
Analisis Relevansi Persentase Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Luwu Tahun 2018-2022



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu

Kondisi Karakteristik Masalah Persentase Penduduk Miskin

a. Posisi Relatif

Pada tahun 2021 persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu masih lebih tinggi ketimbang capaian Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional , dimana capaian Kabupaten Luwu sebesar 12,59 persen, propinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,78 persen dan Nasional sebesar 9,71 persen pada tahun 2021, selanjutnya untuk tahun 2022 tingkat kemiskinan kabupaten Luwu mengalami penurunan sebesar 0,1 persen atau menjadi sebesar 12,49 persen.

b. Perkembangan Antar Waktu

Dari grafik perkembangan antar waktu tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu di atas, Nampak bahwa tren pada periode tahun 2017-2021 telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2017 sebesar 14,01 persen, menurun menjadi 12,59 persen pada tahun 2021 atau mengalami penurunan sebanyak 1,42 persen.

Selanjutnya untuk capaian Propinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun yakni periode tahun 2017 – 2019 terus mengalami penurunan menjadi sebesar 8,69 persen, dimana pada tahun 2017 sebesar 9,38 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,69 persen, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 0,06 persen, kenaikan tersebut terjadi dikarenakan dampak terjadinya awal masa pandemic covid 19.

Selanjutnya untuk tingkat Nasional, pada tahun 2021 mejadi sebesar 9,71 persen, capaian Nasional tersebut mengalami penurunan, dimana pada tahun 2020 sebesar 10,19 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,48 persen.

c. Efektifitas

Dengan memperhatikan data perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu dalam kurun waktu tahun 2018 – 2022, secara umum cenderung mengalami penurunan, hal tersebut mengindikasikan tren yang baik pada rentang tahun tersebut, sehingga nampak bahwa berbagai program / kegiatan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dan persentase tingkat kemiskinan pada periode tersebut dengan rata-rata penurunan untuk tingkat kemiskinan sebesar 9,36 persen pada periode yang sama. jika dikaitkan dengan persentase sasaran pertumbuhan kemiskinan Kabupaten Luwu pada periode akhir RPJMD yakni sebesar 9,22 persen, maka capaian perkembangan kemiskinan di Kabupaten Luwu masih belum mencapai target sebagaimana yang akan dicapai pada tahun 2024..

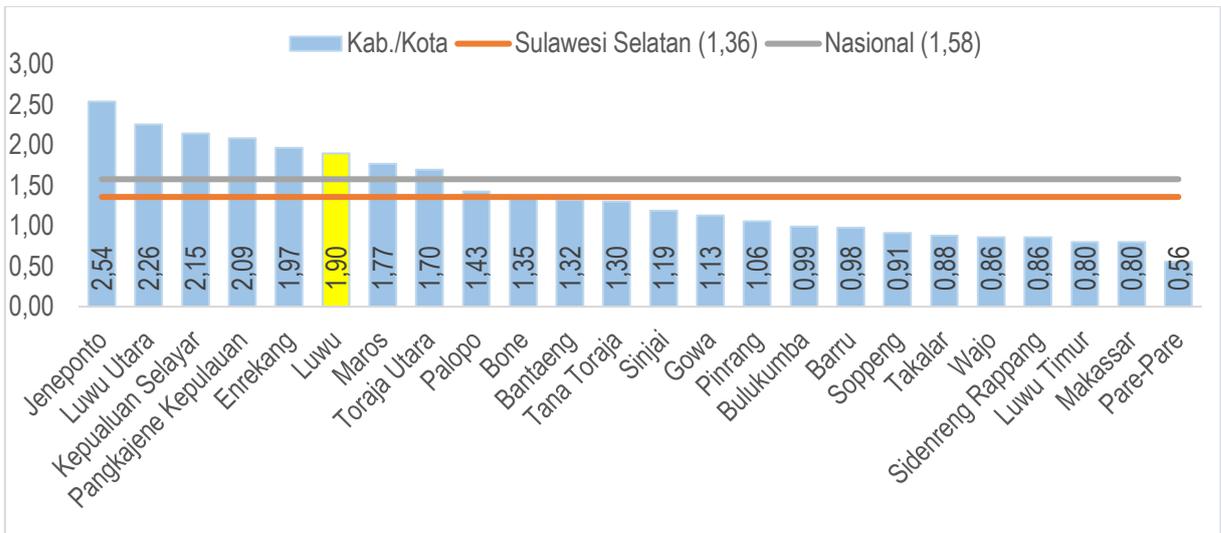
d. Relevansi

Dari indikator kemiskinan yakni tingkat kemiskinan pada grafik tersebut diatas, nampak bahwa pada tahun 2018 – 2022, kecenderungan tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu sejalan dengan kecenderungan tingkat kemiskinan Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional , dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode tersebut , upaya penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu sejalan untuk mendukung tujuan Propinsi dan Nasional dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan. Namun pada tahun 2020, tingkat kemiskinan propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional cenderung mengalami peningkatan akibat terjadinya covid 19 yang berdampak pada perubahan diberbagai kehidupan termasuk kondisi masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya.

2.2.1. Poverty Gap Indeks / Index Kedalaman Kemiskinan (P1)

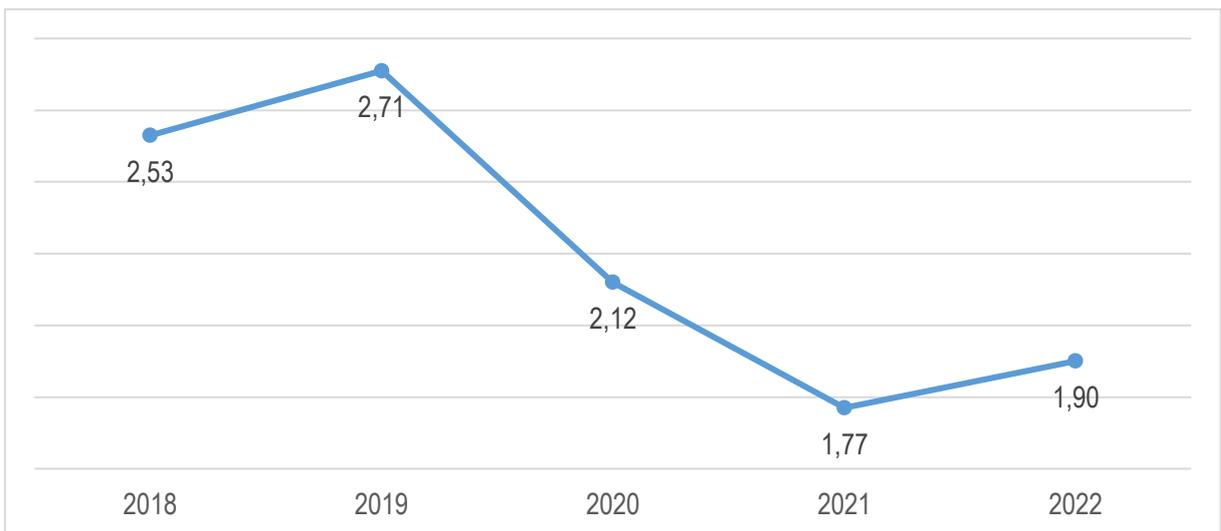
Selain ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dari sisi ekonomi, terdapat juga indikator lain yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yakni Poverty Gap Indeks / Index Kedalaman Kemiskinan (P1) , indeks (P1) tersebut adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, artinya semakin tinggi nilai indeks kemiskinan suatu daerah, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis Kemiskinan.

Grafik 2.6.
Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Luwu Tahun 2022



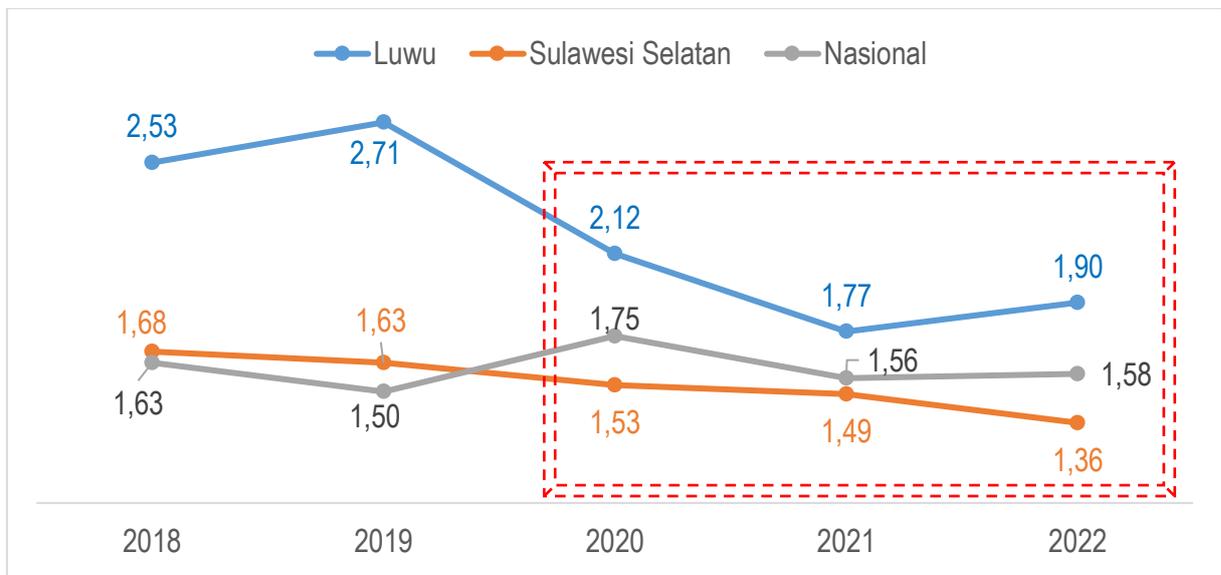
Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu

Grafik 2.7.
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2022



Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu

Grafik 2.8.
Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Luwu Tahun 2018-2022



Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu

Kondisi Karakteristik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

a. Perkembangan Antar Waktu dan Posisi Relatif

Capaian Kabupaten Luwu dalam Hal Indeks P1 dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 sebesar 2,53 persen, mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,71 persen pada tahun 2019, selanjutnya mengalami penurunan hingga mencapai 1,90 persen pada tahun 2022, jika dilihat perkembangan antar waktu periode tahun 2018-2022, nampak bahwa pada tahun 2018, capaian indeks P1 sempat mengalami kenaikan menjadi sebesar 2,71 kemudian kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 2,12 persen atau menurun sebanyak 0,59 persen pada tahun 2020, selanjutnya jika dilihat pada posisi tertinggi, Kabupaten Luwu berada pada posisi ke 6 tertinggi dari total 24 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan, hal tersebut menandakan bahwa kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk yang ada di Kabupaten Luwu masih jauh dari rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

b. Efektifitas

Selanjutnya untuk efektifitas capaian Kabupaten Luwu pada periode tahun 2018-2022 menunjukkan bahwa capaian Indeks P1 sebesar 0,63 persen, Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,32 persen dan Nasional sebesar 0,05 persen. Jika dilihat dari besaran persentase penurunan, capaian penurunan

Indeks P1 nampak bahwa Kabupaten Luwu masih lebih tinggi dari capaian Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun. Dari pola penurunan capaian masing-masing tersebut, dapat diketahui bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu tergolong efektif namun masih perlu upaya maksimal karena masih terdapat kesenjangan pengeluaran antar penduduk Kabupaten Luwu terhadap garis kemiskinan.

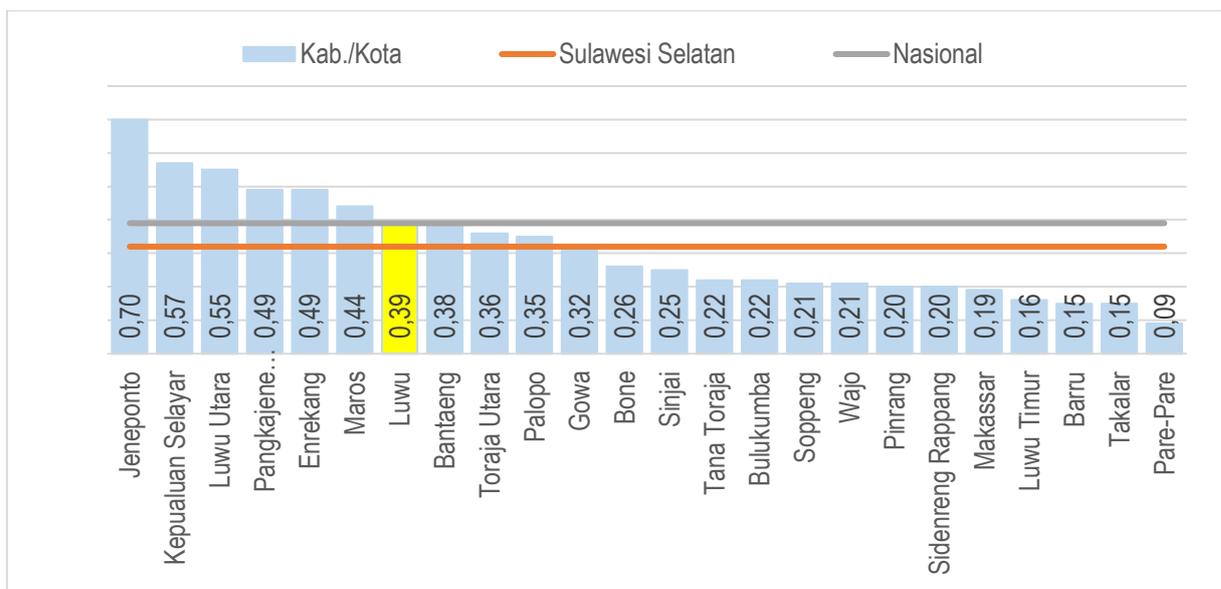
c. Relevansi

Dari grafik perkembangan capaian Indeks P1 tersebut diatas, nampak bahwa pada periode tahun 2020 – 2022, kecenderungannya telah sejalan dengan kecenderungan capaian Nasional, dimana pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode tersebut , upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu sejalan untuk mendukung tujuan Nasional dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan yakni mengurangi kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

2.2.2. Poverty Severity Indeks/Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

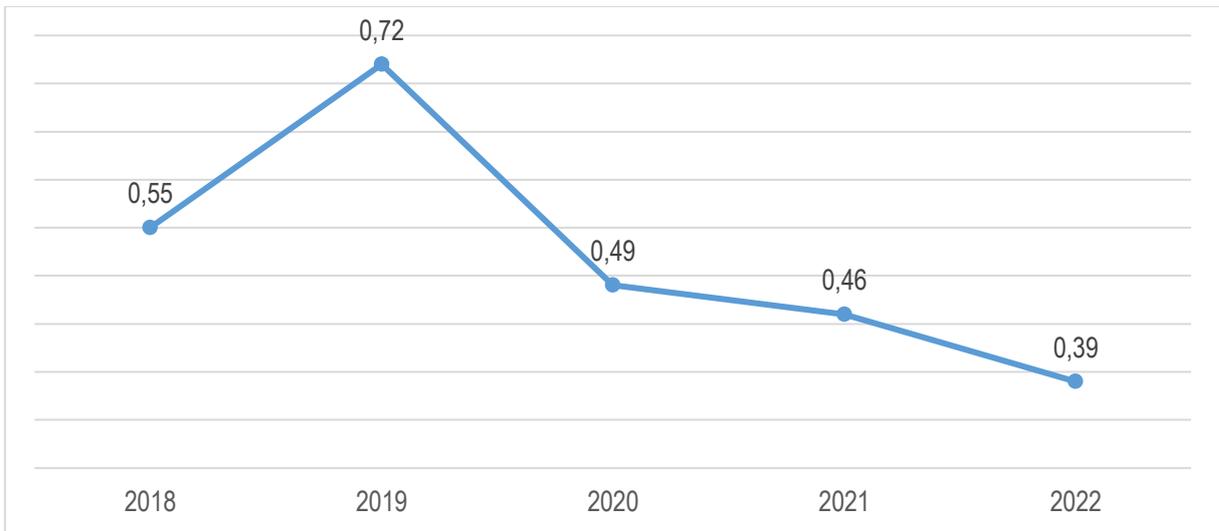
Indeks P2 di Kabupaten Luwu memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di bawah ini disajikan dalam bentuk grafik

Grafik 2.9.
Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Luwu Tahun 2022



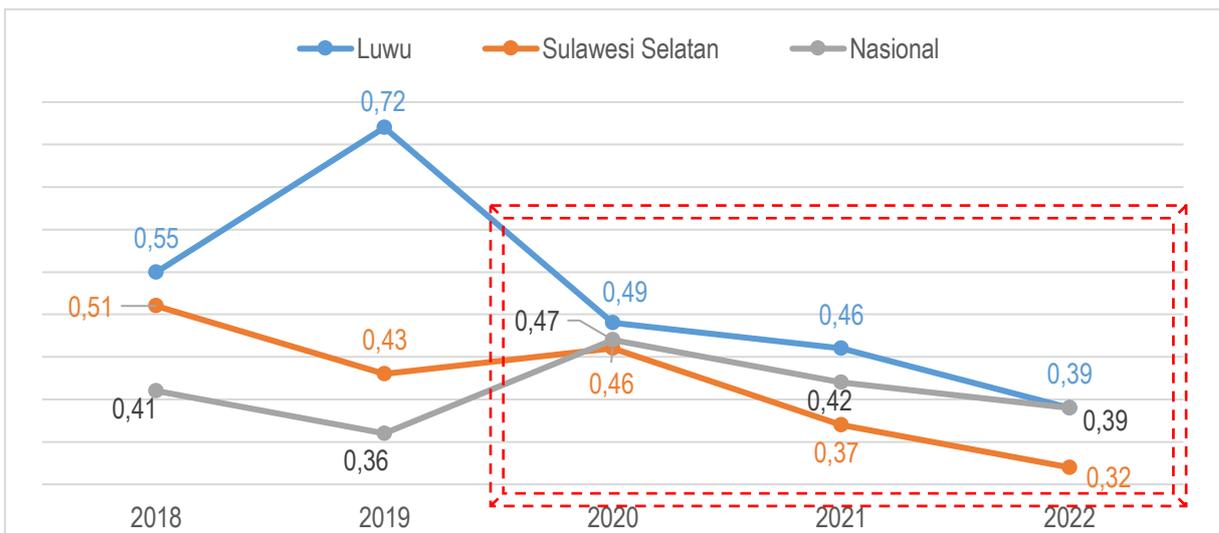
Sumber Data BPS Kabupaten Luwu

Grafik 2.10.
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2022



Sumber Data BPS Kabupaten Luwu

Grafik 2.11.
Analisis Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2022



Sumber Data BPS Kabupaten Luwu

Kondisi Karakteristik Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

- a. Perkembangan Antar Waktu dan Posisi Relatif

Perkembangan Indeks P2 Kabupaten Luwu pada periode 2018-2022 telah mengalami perubahan, dimana capaian pada tahun 2018 sebesar 0,55 persen, kemudian mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,72 persen pada tahun 2019 atau mengalami peningkatan sebanyak 0,17 persen, selanjutnya kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 0,49 persen pada tahun 2019, kembali mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar 0,46 persen, selanjutnya pada tahun 2022 menjadi sebesar 0,39 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,07 persen..

Kemudian untuk capaian propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 sebesar 0,51 persen mengalami penurunan sebesar 0,08 persen atau menjadi sebesar 0,43 persen, mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,46 persen namun kembali mengalami penurunan pada periode tahun 2021-2022 sebesar 0,14 persen sehingga menjadi sebesar 0,32 persen pada tahun 2022..

kemudian untuk capaian Nasional, pada tahun 2018 sebesar 0,41 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi sebesar 0,47 persen, adapun capaian nasional tersebut kembali mengalami penurunan pada periode tahun 2021-2022 sebesar 0,08 persen atau menjadi sebesar 0,39 pada tahun 2022.

Selanjutnya untuk posisi relatif Indeks P2 Kabupaten Luwu berada pada posisi ke 18 dari 24 Kabupaten/Kota tertinggi dan capaiannya masih lebih tinggi dengan capaian Propinsi Sulawesi Selatan, jika dilihat dari grafik tersebut, nampak bahwa di Kabupaten Luwu masih terjadi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, namun kesenjangan diantara penduduk miskin tersebut semakin berkurang dari tahun ke tahun.

b. Efektifitas

Pada periode 2018 - 2022 terlihat bahwa terjadi pola tren menurun dari tahun ke tahun terkecuali pada tahun 2019, dimana sempat mengalami kenaikan, namun pada tahun berikutnya kembali terjadi penurunan, dari tren penurunan capaian tersebut, nampak bahwa di Kabupaten Luwu dalam rangka menekan angka ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin masih tergolong efektif

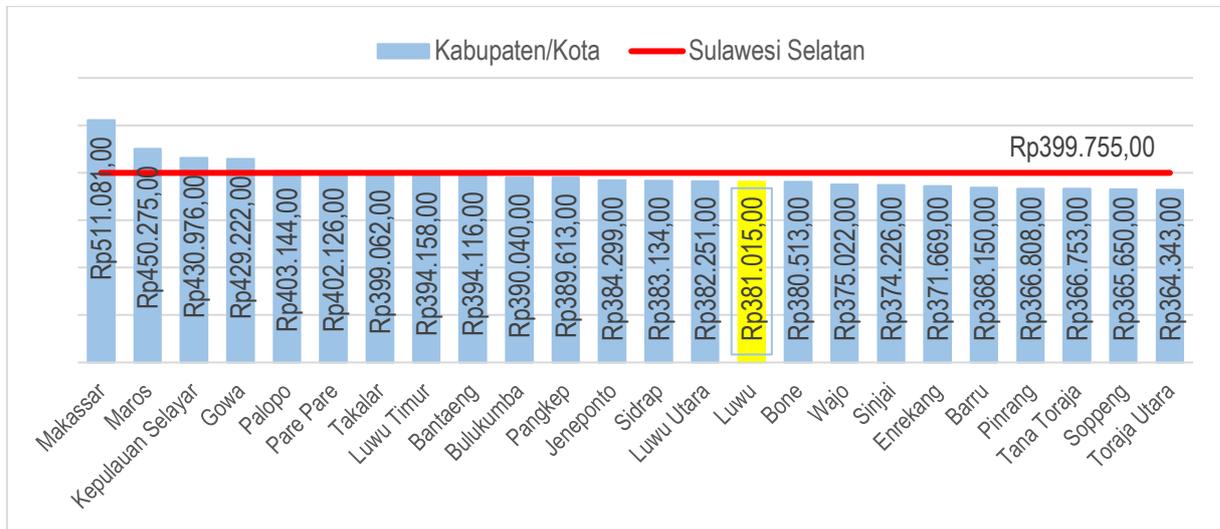
c. Relevansi

Selanjutnya untuk relevansi capaian Indeks P2 Kabupaten Luwu pada periode 2018-2022 sangat relevan dengan tren pola penurunan capaian Propinsi dan Nasional dalam rangka menekan angka ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

2.2.3. Garis Kemiskinan (GK)

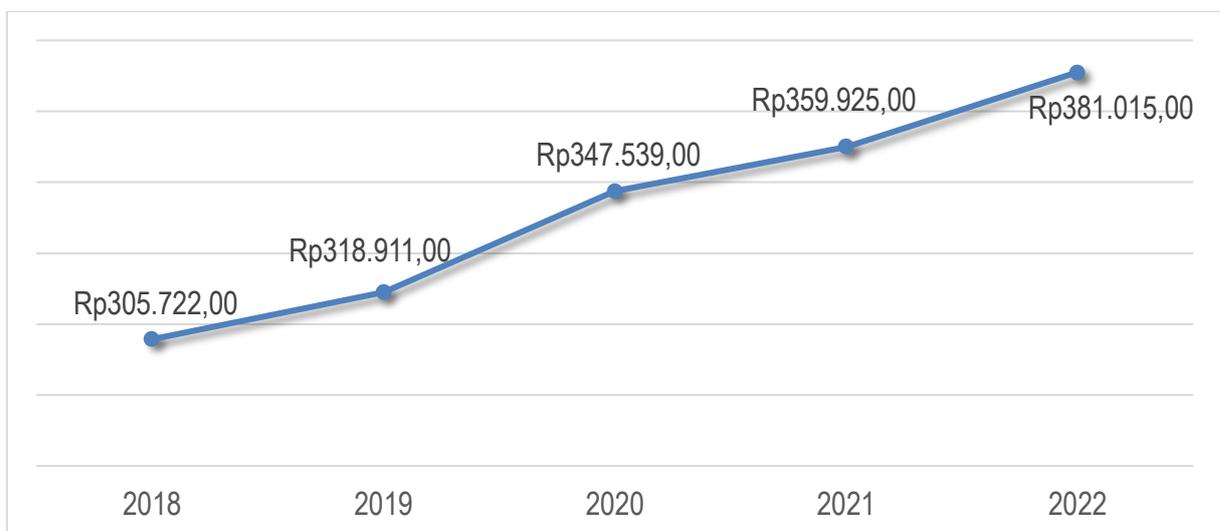
Garis Kemiskinan merupakan representasi dari rupiah yang diperlukan atau harga yang dibayarkan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum makanan (setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari) dan non makanan essential.

Grafik 2.12.
Posisi Relatif Garis Kemiskinan (GK) (Rupiah)
Kabupaten/Kota dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



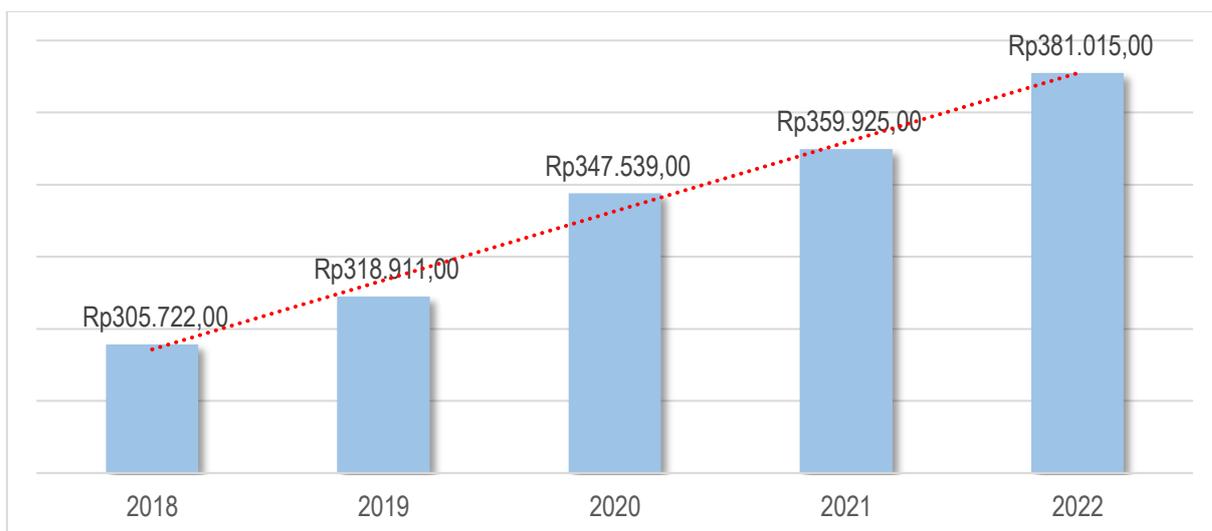
Sumber Data BPS Kabupaten Luwu

Grafik 2.13.
Perkembangan Garis Kemiskinan (GK) (Rupiah)
Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2022



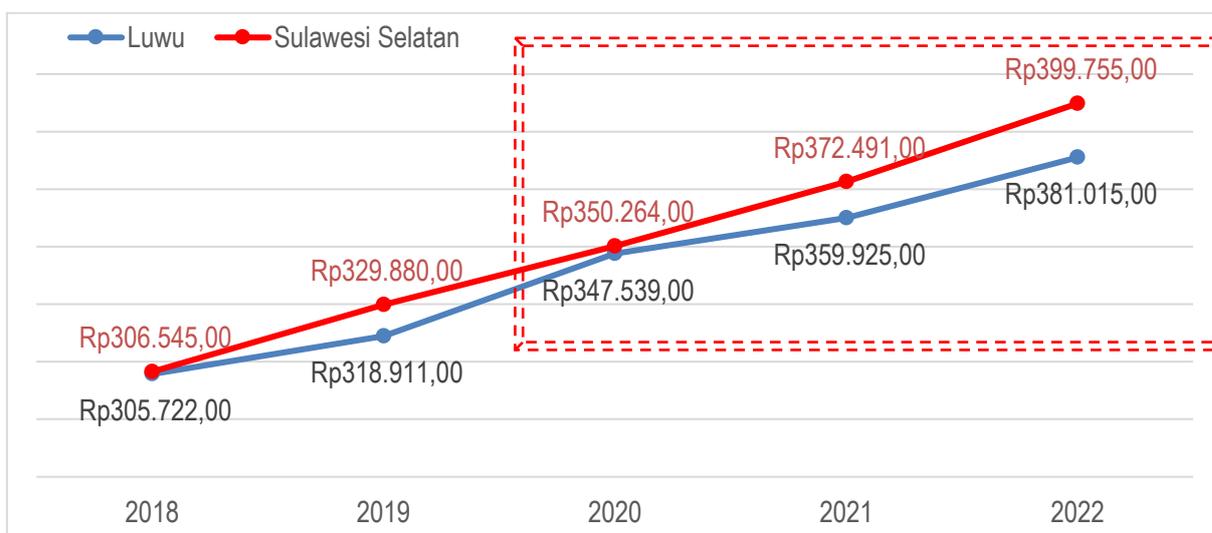
Sumber Data BPS Kabupaten Luwu

Grafik 2.14.
 Analisis Efektifitas Garis Kemiskinan (Rp)
 Kabupaten Luwu, Propinsi Sulsel Tahun 2018 – 2022



Sumber Data BPS Kabupaten Luwu

Grafik 2.15.
 Analisis Relevansi Garis Kemiskinan (GK)
 Kabupaten Luwu dan Propinsi Sulawesi Selatan
 Tahun 2018 – 2022



Sumber Data BPS Kabupaten Luwu

Kondisi Karakteristik Garis Kemiskinan (GK)

a. Perkembangan Antar Waktu dan Posisi Relatif

Dari grafik perkembangan dan posisi relatif tersebut diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 angka GK Kabupaten Luwu sebesar Rp. 381.015,00,- perkapita perbulan, berada pada posisi ke-10 terendah dari total 24 Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan dan capaian tersebut juga masih lebih rendah dari angka GK Propinsi Sulawesi Selatan, dimana angka GK sulawesi selatan sebesar Rp.399.750,00,- pada tahun yang sama.

Selanjutnya untuk perkembangan Kabupaten Luwu dalam hal GK, pada tahun 2018 yakni sebesar Rp.305.772,00 dan mengalami pertumbuhan nilai sebesar Rp.75.293,00 selama periode 2018-2022, dimana pada tahun 2022 mencapai Rp.381.015,00, dari grafik perkembangan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Luwu terus berupaya agar dapat menekan peningkatan garis kemiskinan melalui antara lain pengendalian harga-harga yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat.

b. Efektifitas

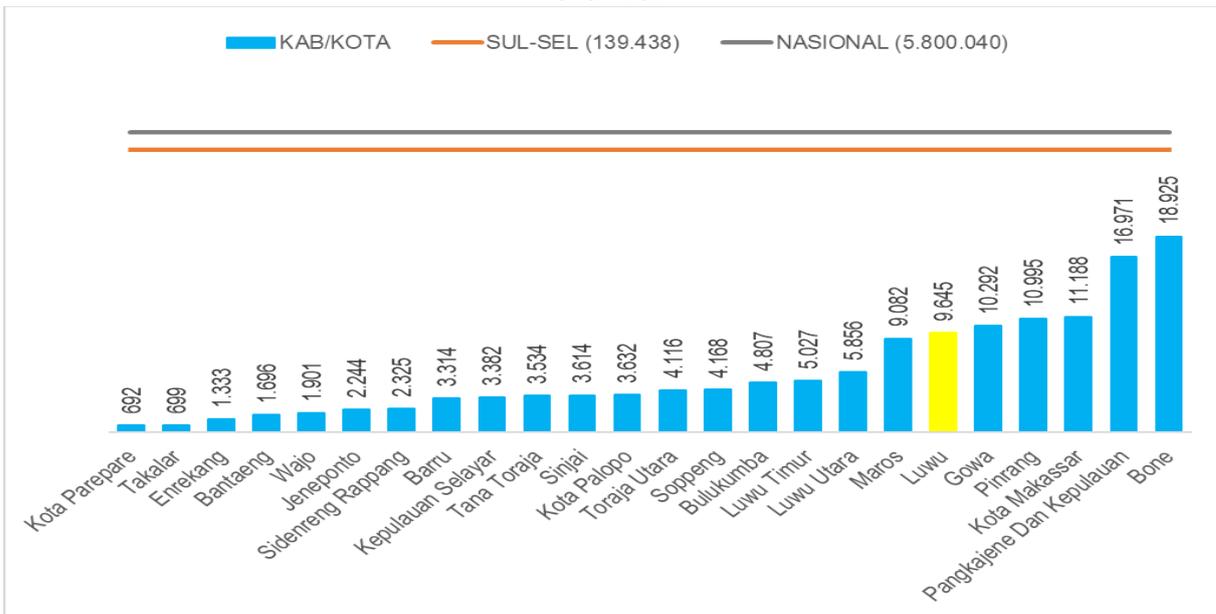
GK Kabupaten Luwu selama periode tahun 2018 – 2022 mengalami laju pertumbuhan secara terus menerus pada tiap tahunnya, hal tersebut dipengaruhi oleh keterjangkauan kebutuhan konsumsi masyarakat

c. Relevansi

Pada periode tahun 2018 -2022, GK Kabupaten Luwu masih berada dibawah GK Provinsi Sulawesi Selatan, namun jika dilihat dari tren dan pola perubahan perkembangan antara GK masing-masing, nampak bahwa keduanya memiliki pola pertumbuhan yang sama, hal tersebut menandakan bahwa keduanya masih relevan.

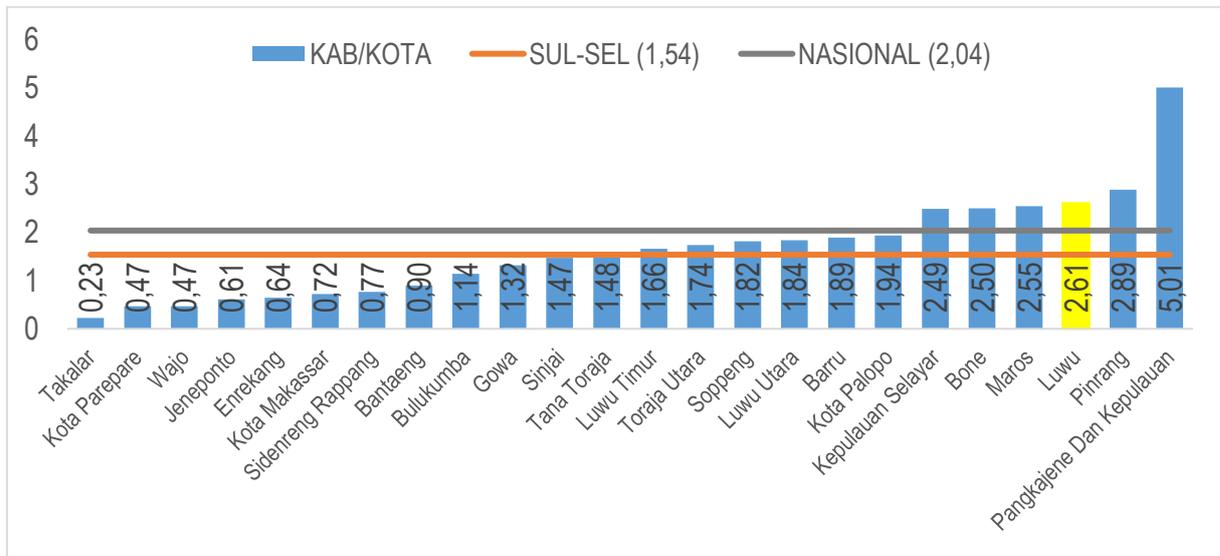
2.2.4. Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem dan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Luwu

Grafik 2.16.
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem
Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Nasional
Tahun 2021



Sumber Data BPS Kabupaten Luwu

Grafik 2.17.
Perkembangan Tingkat Kemsikinan Ekstrem (%)
Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Nasional Tahun 2021



Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu Kebutuhan Makanan, Air Minum Bersih, Sanitasi Layak, Kesehatan, Tempat Tinggal, Pendidikan, dan Akses Informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga Akses Pada Layanan Sosial (PBB, 1996)

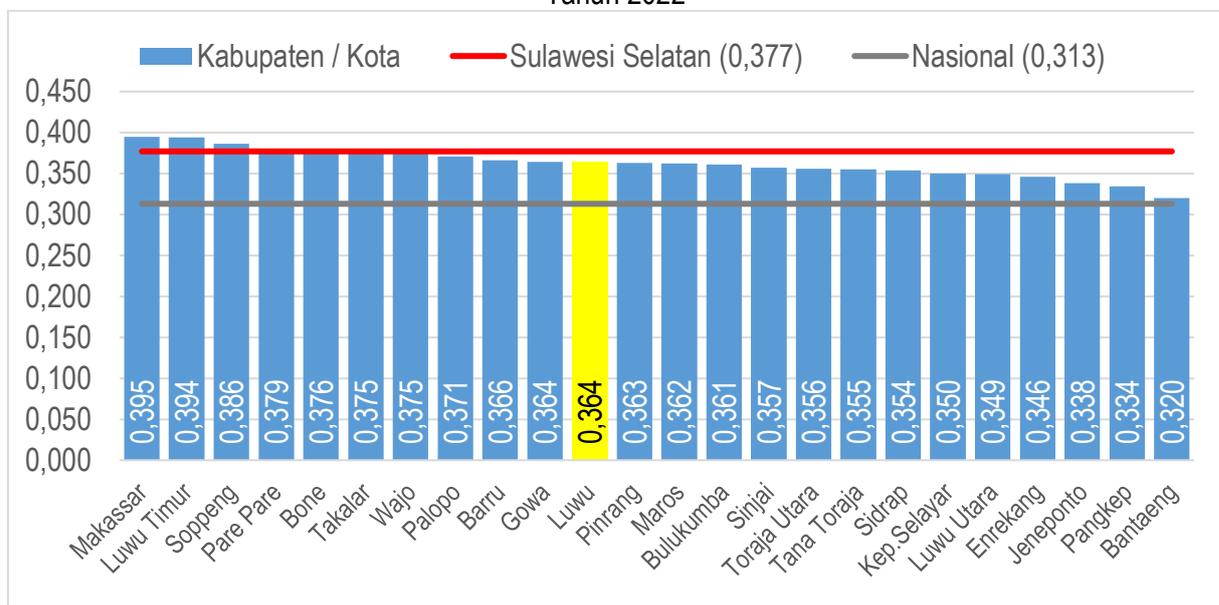
Penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin ekstrem Kabupaten Luwu sebesar 9.645 Jiwa, jumlah tersebut menempatkan Kabupaten Luwu berada pada posisi ke 19 terendah dari 24 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya untuk tingkat kemiskinan ekstrem, di Kabupaten Luwu pada tahun 2021 sebesar 2,61 persen, capaian Kabupaten Luwu tersebut masih lebih rendah dari Kabupaten Pinrang dan Pangkep, dimana Kabupaten Pinrang sebesar 2,89 persen dan Kabupaten Pangkep sebesar 5,01 persen pada tahun yang sama.

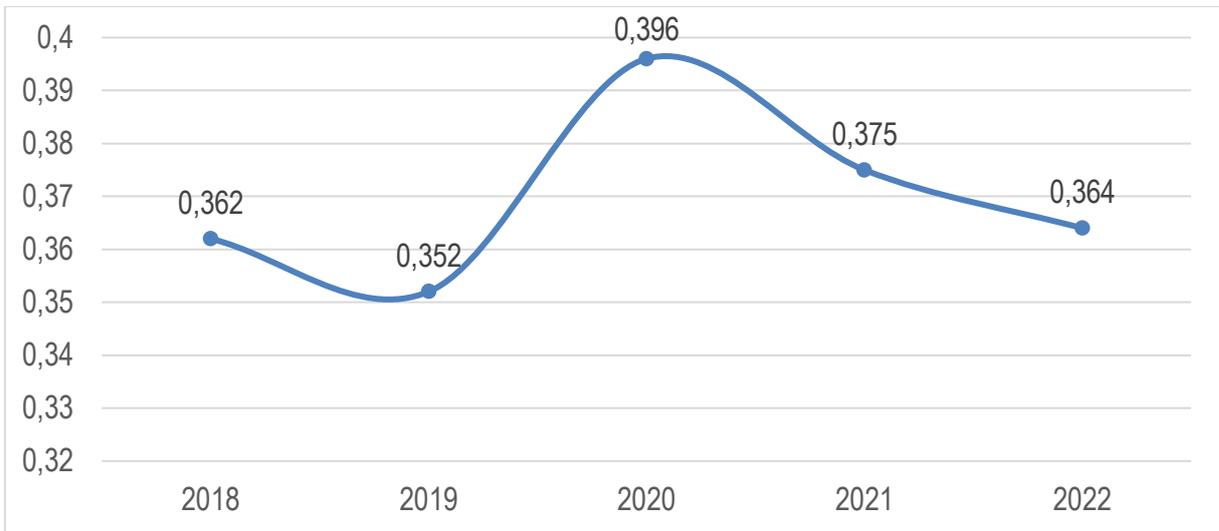
2.2.5. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran (Gini Rasio)

Grafik 2.18.
Posisi Relatif Indeks Gini Ratio Kabupaten Luwu
Tahun 2022



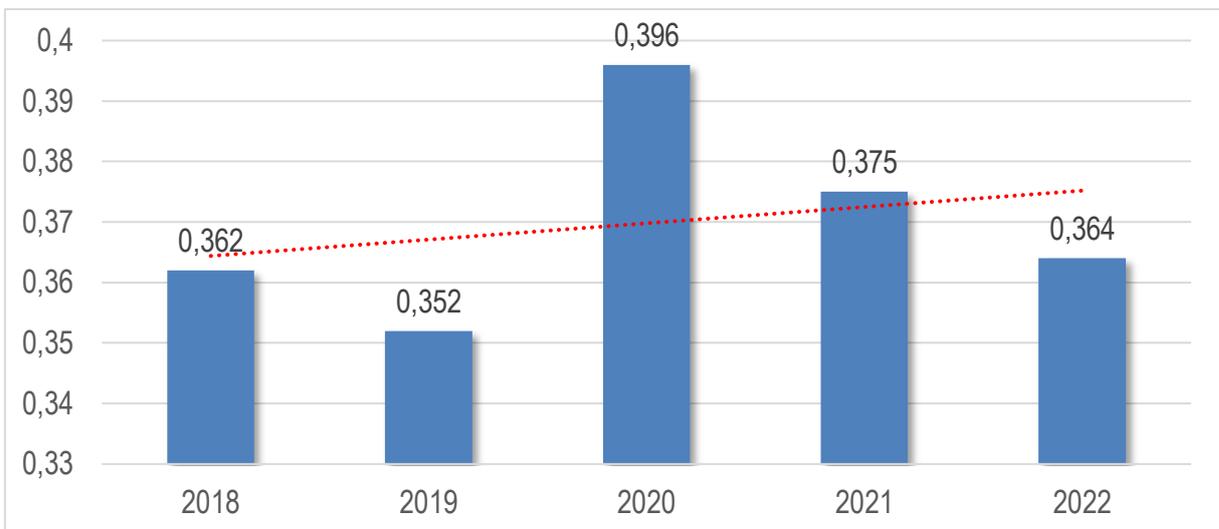
Sumber Data BPS Kabupaten Luwu

Grafik 2.19.
Perkembangan Antar Waktu Indeks Gini Ratio
Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2022



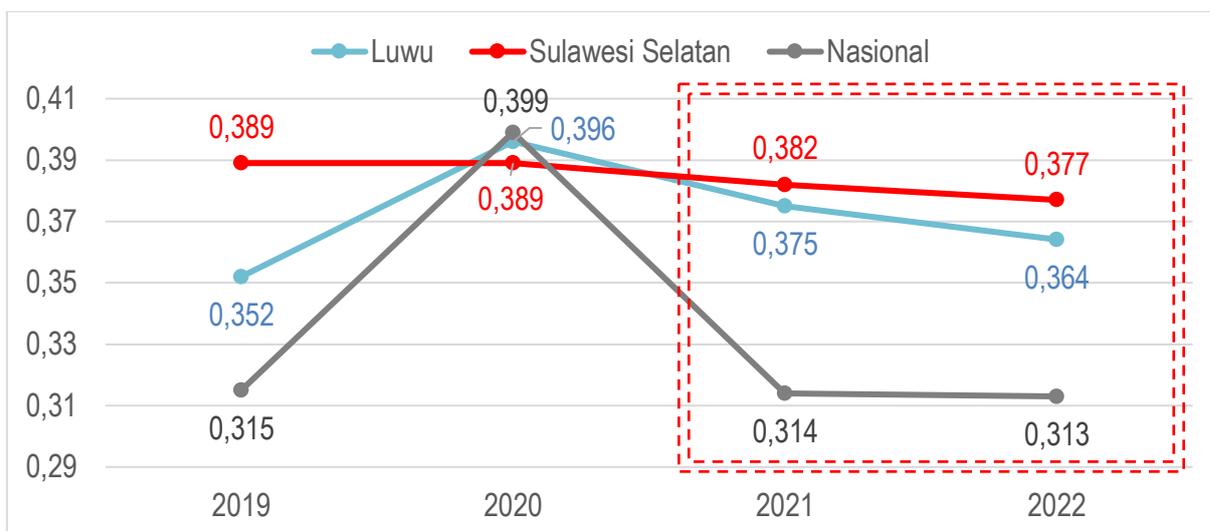
Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu

Grafik 2.20.
Analisis Efektifitas Indeks Gini ratio Kabupaten Luwu
Tahun 2018 – 2022



Sumber Data BPS Kabupaten Luwu

Grafik 2.21.
 Relevansi Indeks Gini ratio Kabupaten Luwu
 Tahun 2018 – 2022



Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu

Kondisi Karakteristik Indeks Gini Ratio

a. Posisi Relatif Kabupaten Luwu

Dari grafik indeks Gini Ratio Kabupaten Luwu di atas, nampak bahwa Kabupaten Luwu berada pada posisi ke-11 tertinggi dari 24 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan, capaian Kabupaten Luwu tersebut masih lebih tinggi dari capaian Propinsi Sulawesi Selatan yakni 0,377 pada tahun 2021.

b. Capaian Indeks Gini Ratio Kabupaten Luwu masih kurang maksimal mengingat target yang akan dicapai pada tahun 2022 yakni sebesar 0,345, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Luwu akan terus melakukan upaya perbaikan di tahun berikutnya agar tingkat kesenjangan terus mengalami penurunan ketimpangan pendapatan penduduk.

c. Perkembangan Antar Waktu

Di Kabupaten Luwu pada periode tahun 2018-2022, tingkat ketimpangan pengeluaran terus mengalami perubahan, dimana pada tahun 2018 sebesar 0,362 menurun pada tahun 2019 menjadi sebesar 0,352, selanjutnya mengalami peningkatan sebanyak 0,05 pada tahun 2020 atau menjadi sebesar 0,396 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi sebesar 0,364, jika dilihat dari tren dan pola pada periode tahun 2018 - 2022, Nampak bahwa secara keseluruhan memperlihatkan tren meningkat.

d. Efektifitas

Capaian indeks gini Kabupaten Luwu pada periode tahun 2018 - 2022 mengalami tren penurunan, hal tersebut menandakan bahwa upaya yang dilakukan terbilang efektif dalam menurunkan tingkat ketimpangan pengeluaran antar wilayah dan masih relevan dengan pola dan tren capaian Propinsi dan Nasional.

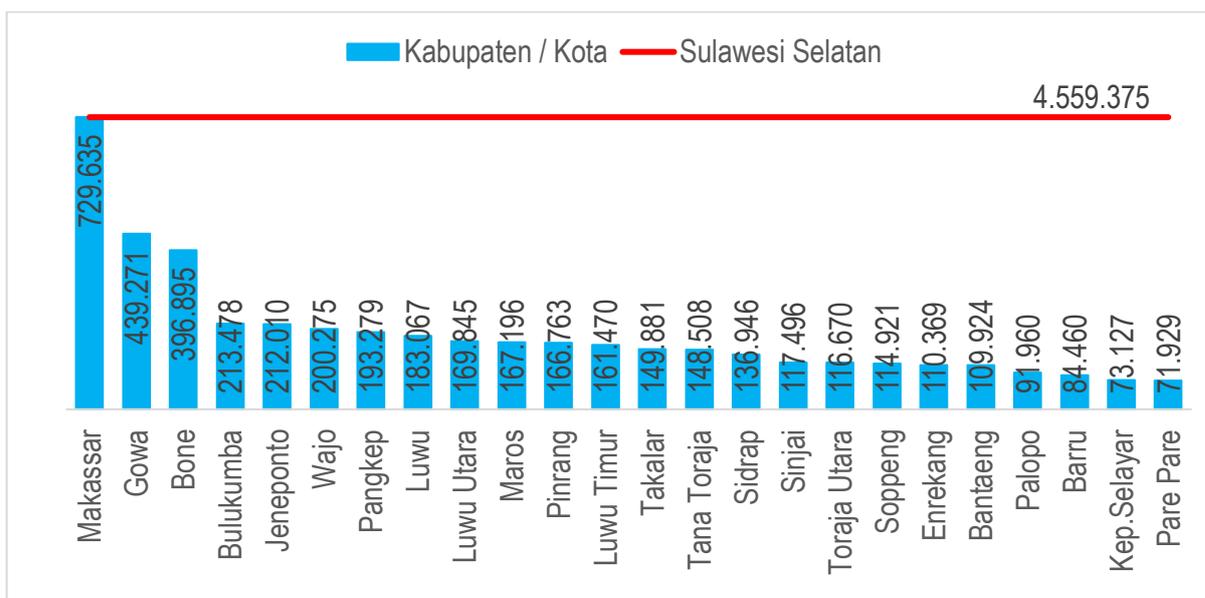
2.2. Bidang Ketenagakerjaan

Indikator ketenagakerjaan adalah tingkat pengangguran. Sebagaimana diketahui bahwa tenaga kerja adalah merupakan modal bagi geraknya pembangunan, jumlah tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi.

Angkatan kerja adalah merupakan penduduk yang memasuki usia 15-64 tahun yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya, adapun gambaran mengenai penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari dapat dicermati melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), sebagaimana diketahui bahwa semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja yang mengakibatkan semakin kecil nilai TPAK.

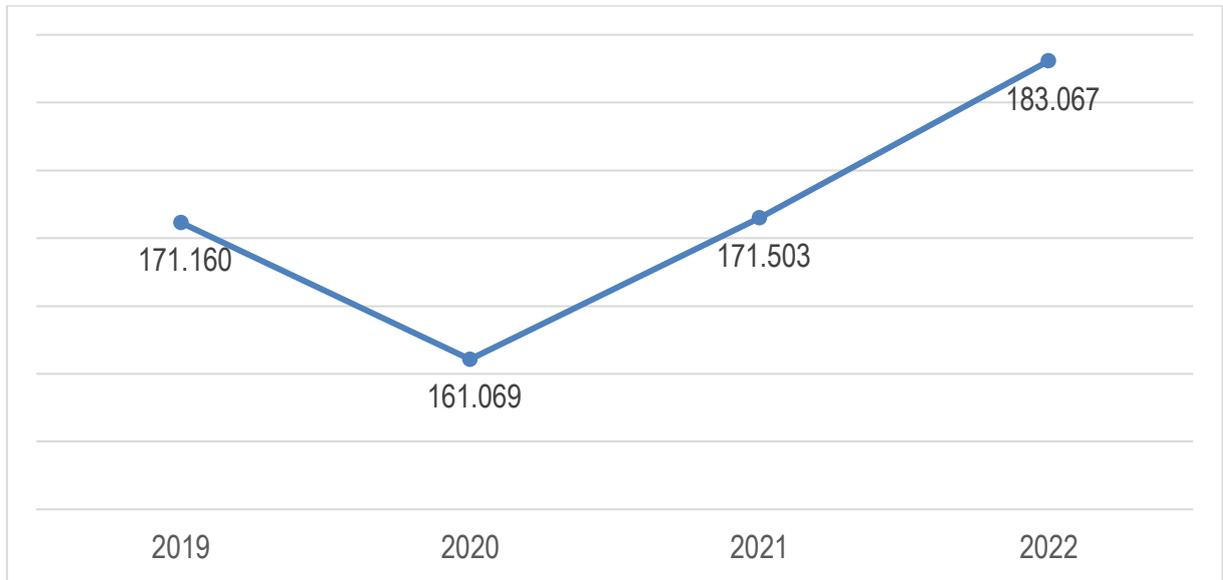
2.2.1. Angkatan Kerja

Grafik 2.22.
Posisi Relatif Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Tahun 2022



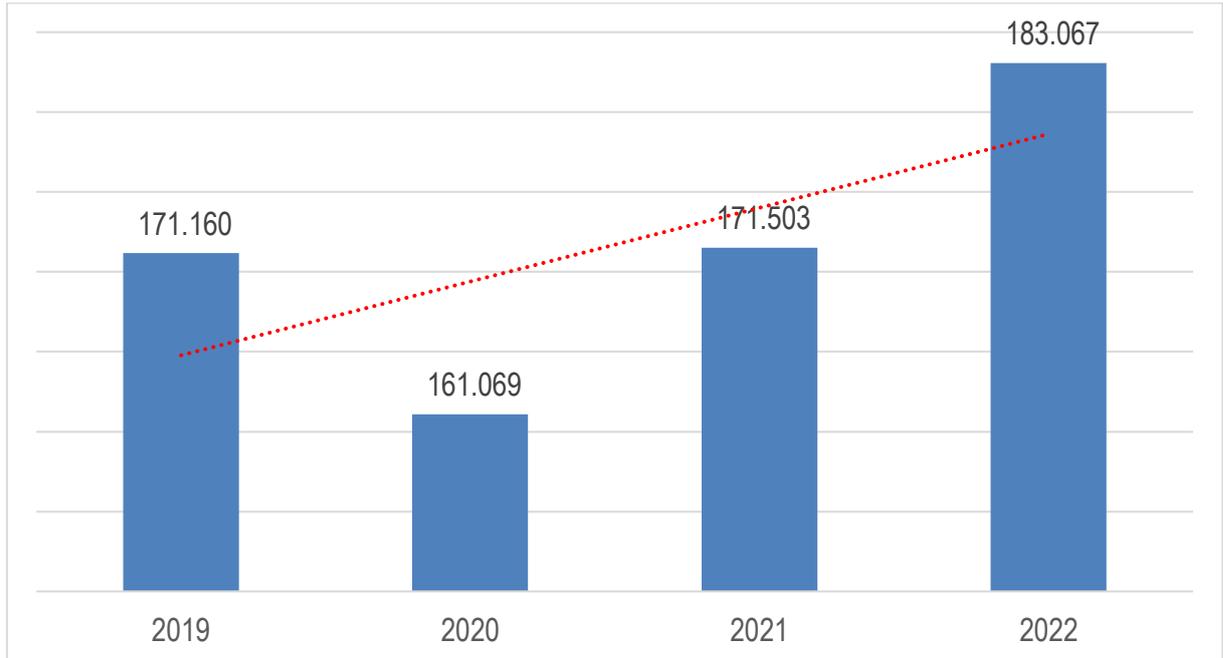
Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu

Grafik 2.23.
Perkembangan Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Tahun 2019 – 2022



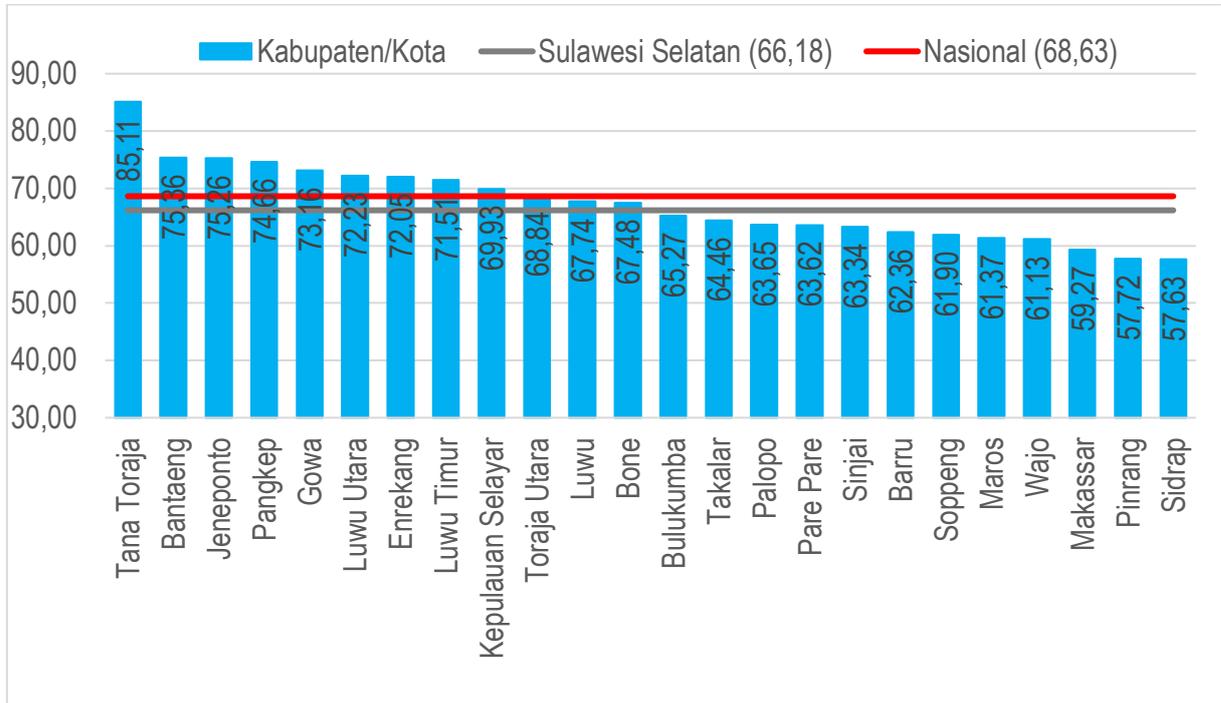
Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu

Grafik 2.24.
Analisis Efektifitas Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Tahun 2019 - 2022



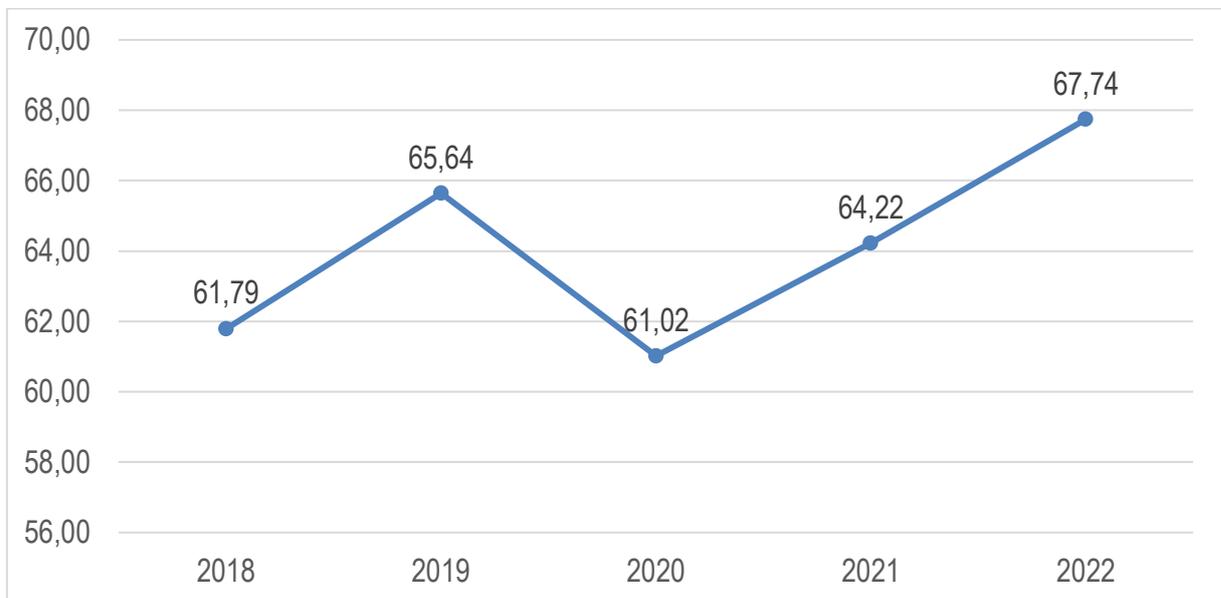
Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu

Grafik 2.25.
Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Luwu Tahun 2022



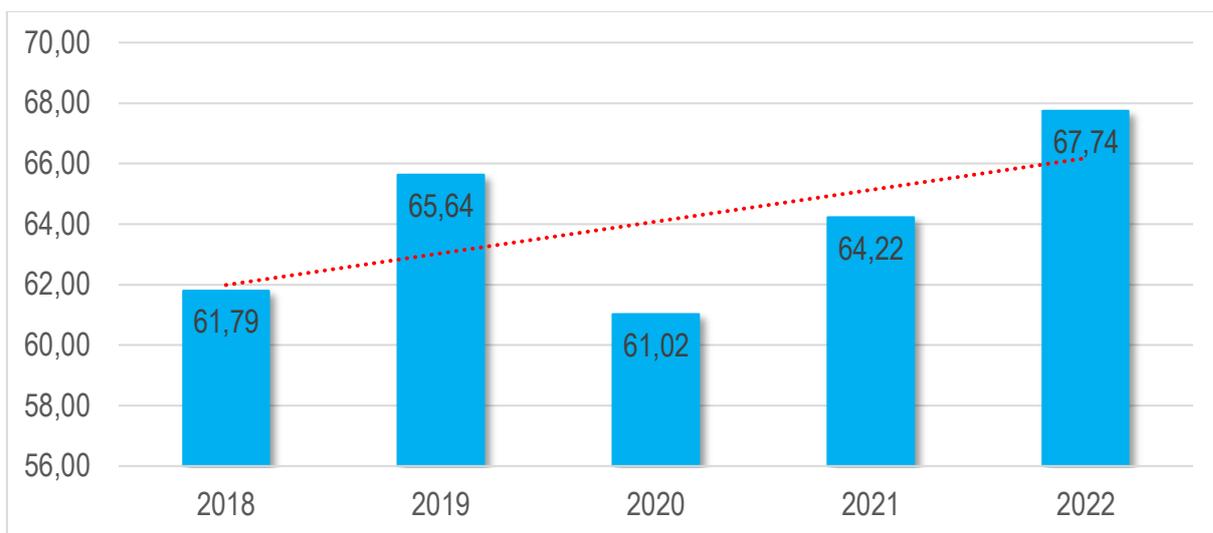
Sumber Data BPS Kabupaten Luwu

Grafik 2.26.
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2022



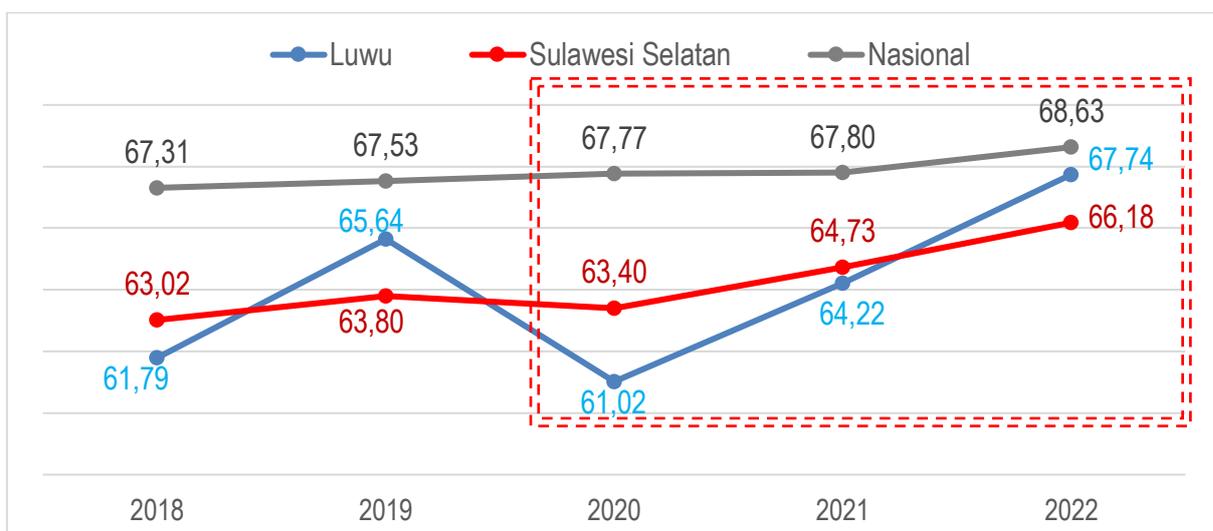
Sumber Data BPS Kabupaten Luwu

Grafik 2.27.
 Analisis Efektifitas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
 Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2022



Sumber Data BPS Kabupaten Luwu

Grafik 2.28.
 Analisis Relevansi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Luwu,
 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2022



Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu

Kondisi Karakteristik Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

a. Posisi Relatif Kabupaten Luwu

Pada tahun 2022, capaian persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk yang berumur sepuluh tahun keatas Kabupaten Luwu berada pada posisi ke 8 tertinggi dari jumlah total 24 Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan, hal tersebut menandakan bahwa banyaknya penduduk yang bekerja dan sedang mencari pekerjaan diantara Kabupaten/Kota lainnya begitu pun dengan perkembangan kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja tergolong masih rendah sehingga Pemerintah Kabupaten Luwu terus berupaya meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat salah satunya meningkatkan sarana pelatihan tenaga kerja yang siap pakai, dimana diketahui capaian TPAK Kabupaten Luwu pada tahun 2022 sebesar 67,74 persen, jika dibandingkan dengan capaian Propinsi dan Nasional, Kabupaten Luwu masih lebih tinggi dari capaian kedua wilayah tersebut sebagaimana digambarkan pada grafik TPAK tersebut di atas.

b. Perkembangan Antar Waktu

Dari grafik tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tren perkembangan TPAK Kabupaten Luwu dari tahun 2018 - 2022 mengalami perubahan setiap tahunnya, dimana diketahui pada tahun 2018 sebesar 61,79 persen, mengalami peningkatan menjadi sebesar 67,74 persen pada tahun 2022, namun jika dilihat pada grafik perkembangan, capaian TPAK Kabupaten Luwu pada tahun 2020 telah mengalami penurunan sebesar 4,62 persen atau menjadi sebesar 61,20 persen, dimana pada tahun 2019 sebesar 65,64 persen, namun pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 3,2 persen atau menjadi sebesar 64,22 persen.

Capaian perkembangan antar waktu gambaran penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari tersebut diatas menandakan bahwa setiap tahun meningkatnya penduduk Kabupaten Luwu yang tergolong angkatan kerja.

c. Efektifitas

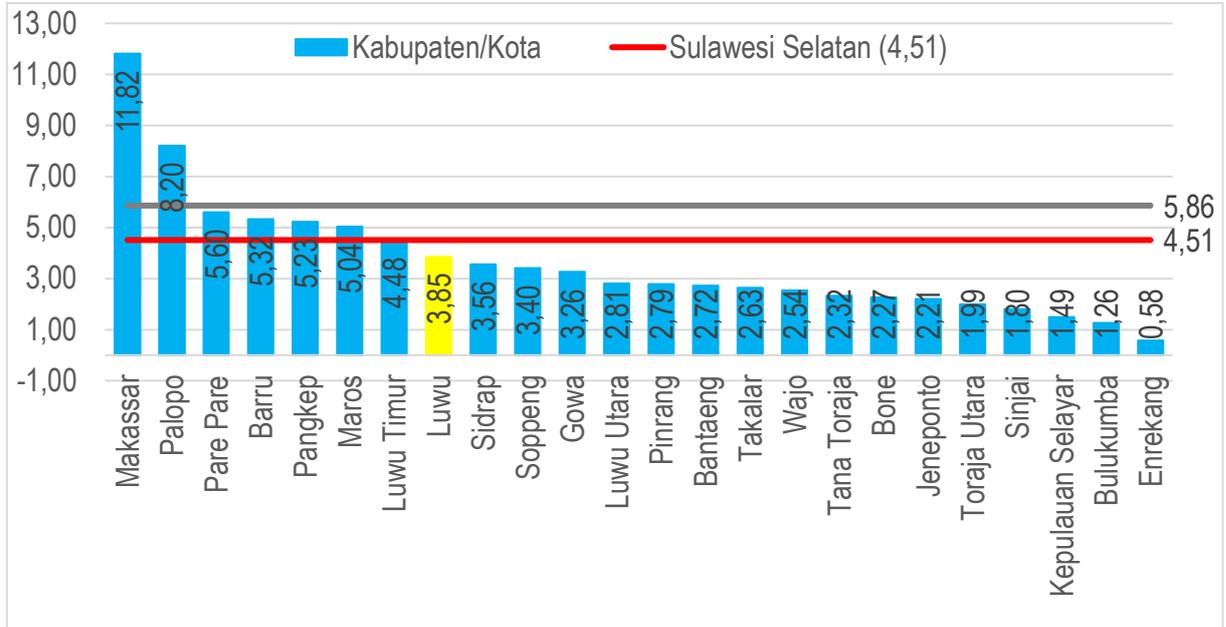
Tren dan pola capaian Angkatan Kerja dan TPAK Kabupaten Luwu pada periode tahun 2018 - 2022 mengalami perubahan setiap tahunnya dan tergolong efektif dan tingginya kesempatan kesempatan kerja.

d. Relevansi

Tren dan pola perubahan capaian antara Kabupaten Luwu dan Propinsi Sulsel menunjukkan masih relevan, dimana pada periode yang sama yakni tahun 2020 - 2022, capaian Pemerintah Kabupaten Luwu cenderung meningkat begitu pun dengan capaian Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

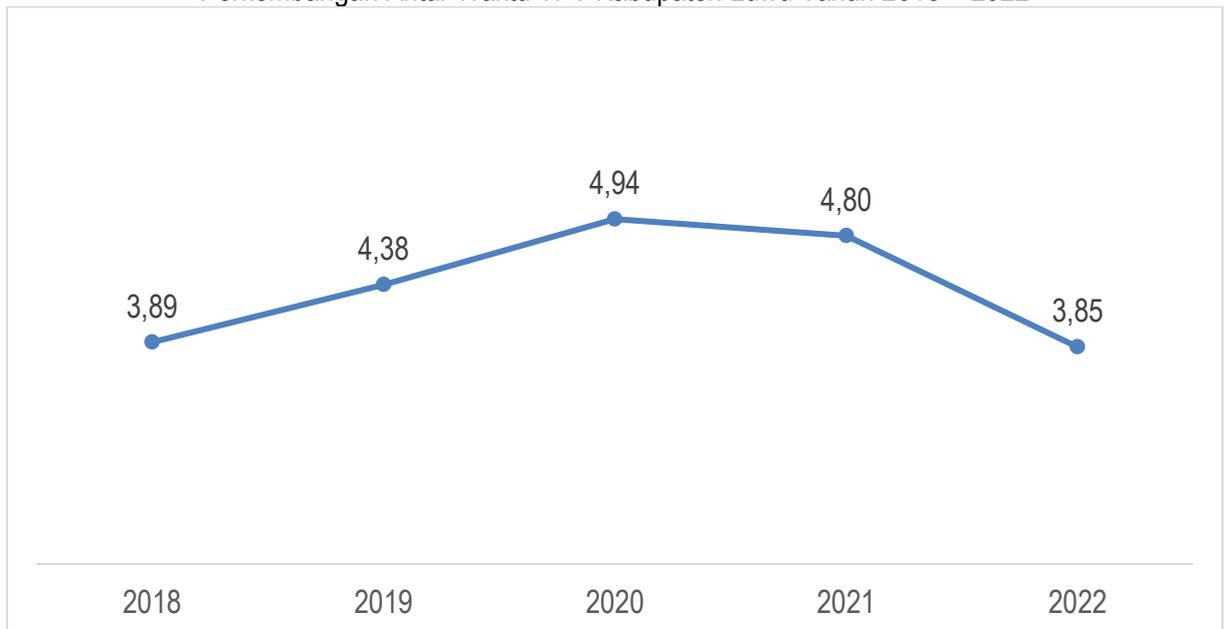
2.2.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Grafik 2.29.
Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Luwu Tahun 2022



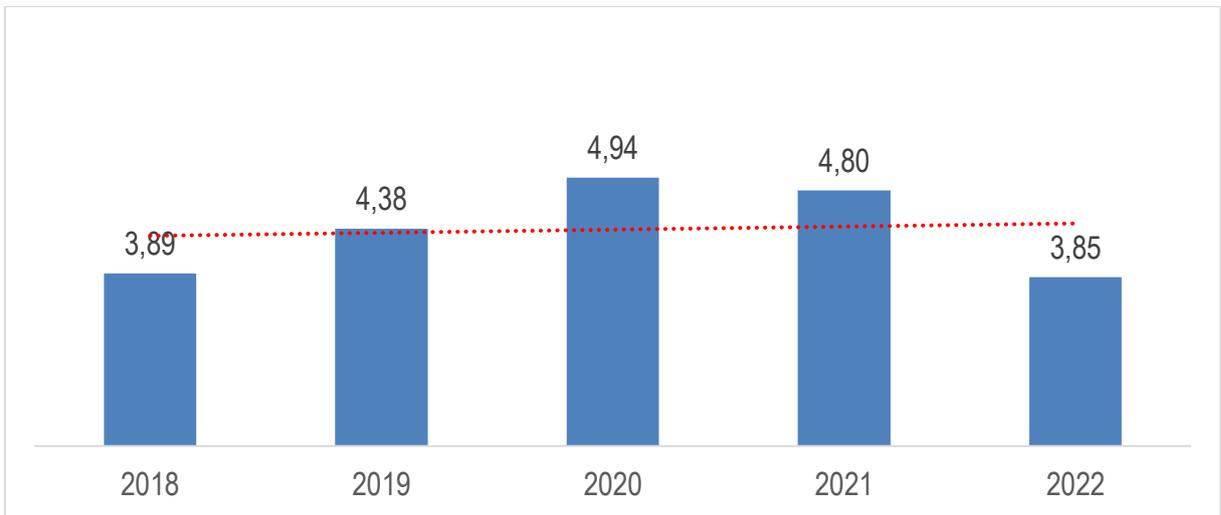
Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu

Grafik 2.30.
Perkembangan Antar Waktu TPT Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2022



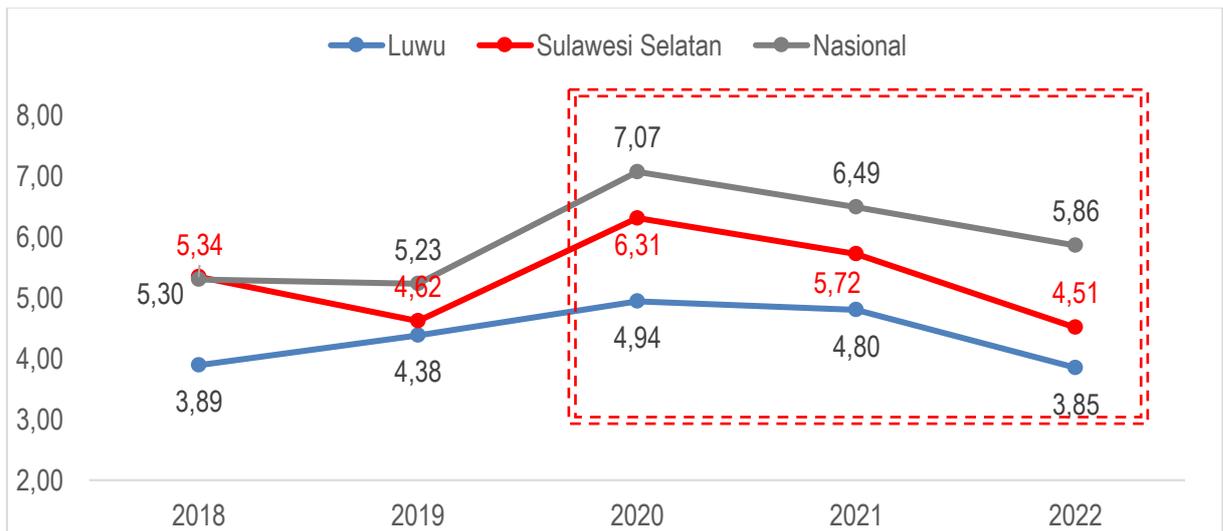
Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu

Grafik 2.31.
 Analisis Efektifitas TPT Kabupaten Luwu
 Tahun 2018 – 2022



Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu

Grafik 2.32.
 Analisis Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka
 Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2022



Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu

Kondisi karakteristik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

a. Posisi relatif

Persentase capaian TPT Kabupaten Luwu pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi sebesar 4,80 persen, dimana pada tahun sebelumnya yakni sebesar 4,94 persen, capaian Kabupaten Luwu tersebut masih berada di bawah capaian nasional dan propinsi Sulawesi Selatan

b. Perkembangan Antar Waktu

Dari grafik perkembangan antar waktu TPT Kabupaten Luwu di atas , dapat diketahui bahwa penurunan yang cukup baik terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 0,89 persen atau menjadi sebesar 3,89 persen , dimana pada tahun sebelumnya sebesar 4,78 persen, selanjutnya mengalami peningkatan pada tahun 2019 dan tahun 2020, namun pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 4,80 persen

c. Efektifitas

Tren perubahan TPT Kabupaten Luwu cenderung mengalami kenaikan pada periode 2017-2021, adapun kenaikan paling menonjol yakni pada tahun 2020, dimana diketahui bahwa pada tahun tersebut telah terjadi sebaran covid 19 sehingga capaian TPT tersebut mengalami kenaikan sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa program-program yang mendukung penurunan persentase tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Luwu tergolong belum efektif , namun pada tahun berikutnya capaian TPT tersebut kembali mengalami penurunan dan berdampak positif terhadap pelaksanaan program yang telah diarahkan dalam penanganan pengurangan persentase TPT Kabupaten Luwu.

d. Relevansi

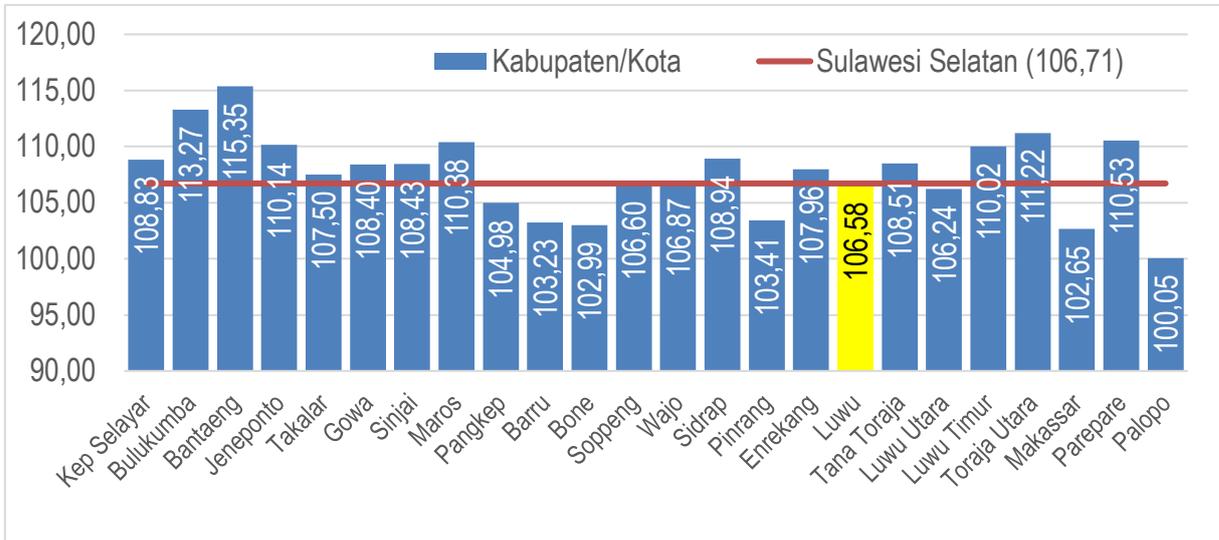
Tren dan pola perubahan antara capaian TPT Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan capaian Nasional dapat disimpulkan bahwa ketiganya cukup beriringan pada tahun 2017 hingga pada tahun 2021 atau capaian masing-masing wilayah masih relevan dalam penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka.

2.3. Bidang Pendidikan

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan di Kabupaten Luwu, pembangunan pendidikan sangat penting karena memiliki peran yang signifikan dalam mencapai kemajuan diberbagai bidang kehidupan, oleh karena itu dalam rangka peningkatan akses dan kualitas serta masyarakat yang bermutu, maka Pemerintah Kabupaten Luwu telah menetapkan sasaran yang akan dicapai yakni antara lain Rata – Rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada masing-masing jenjang pendidikan, dan lain sebagainya,

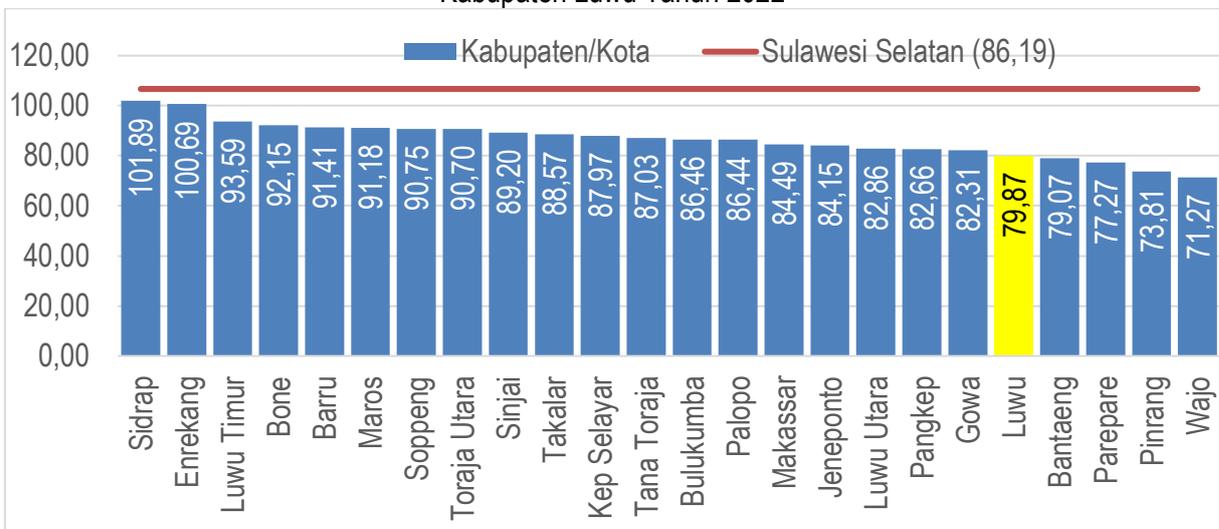
2.3.1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Grafik 2.33.
Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD/MI
Kabupaten Luwu Tahun 2022



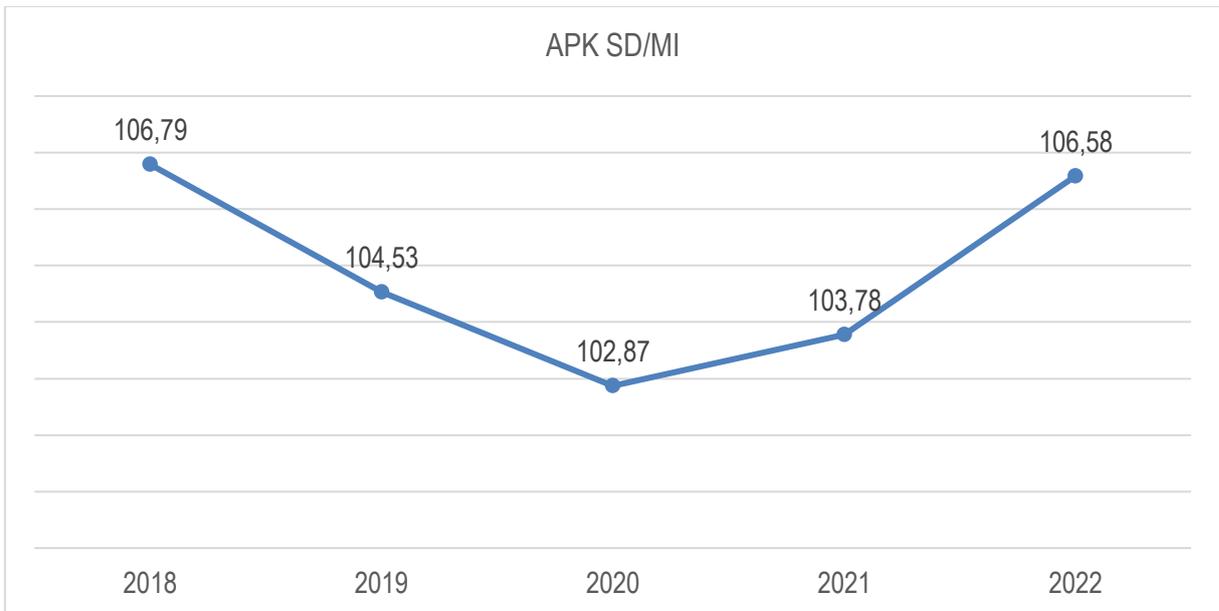
Sumber Data : BPS Propinsi Sulawesi Selatan

Grafik 2.34.
Posisi Relatif Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP/MTs
Kabupaten Luwu Tahun 2022

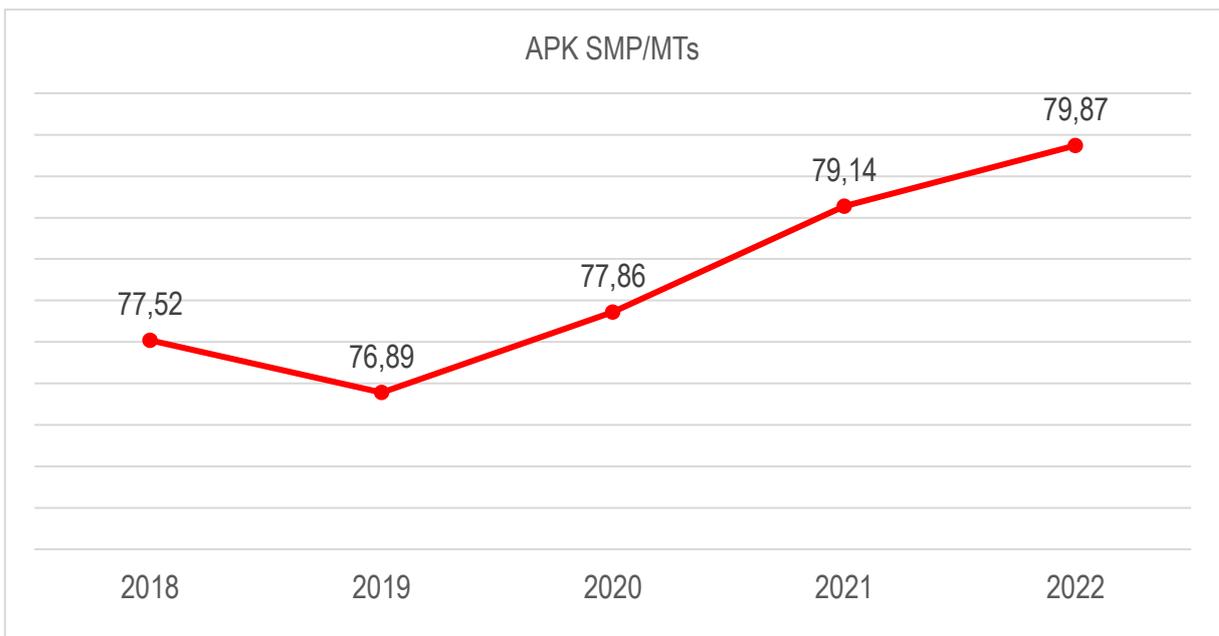


Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu

Grafik 2.35.
Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2022

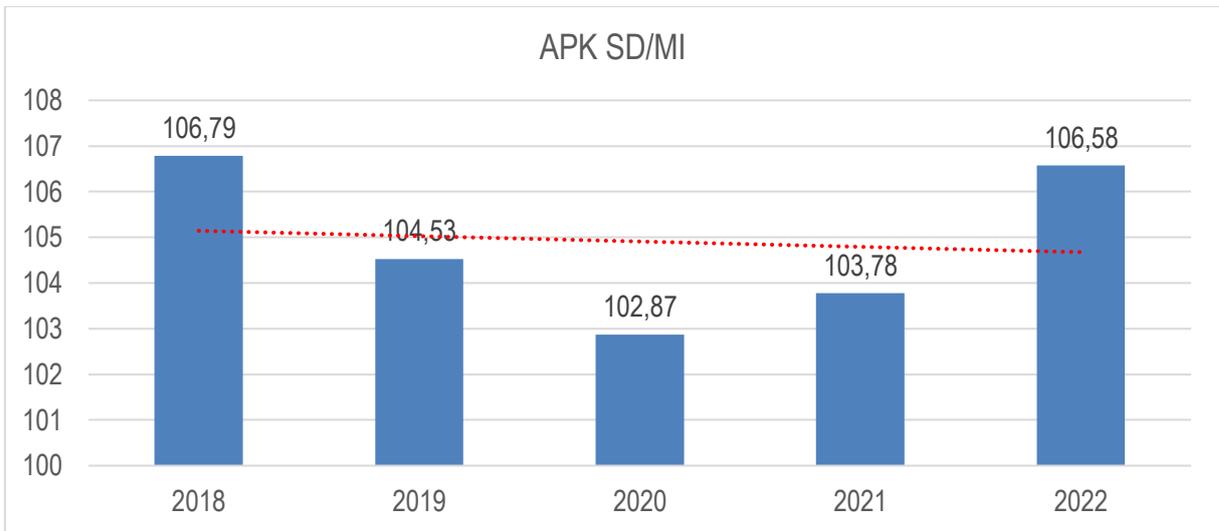


Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu



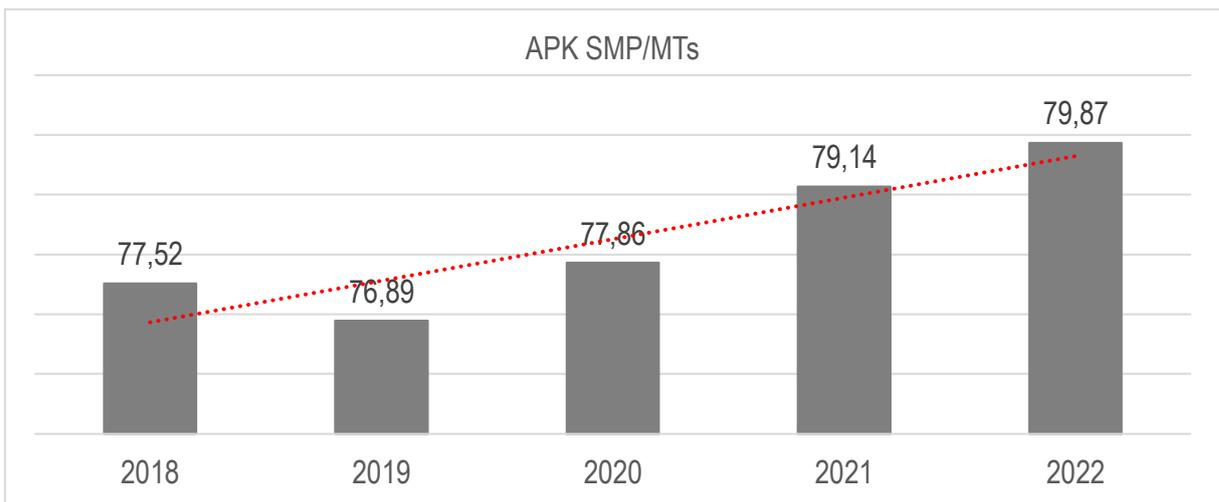
Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu

Grafik 2.36.
Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD/MI
Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2022



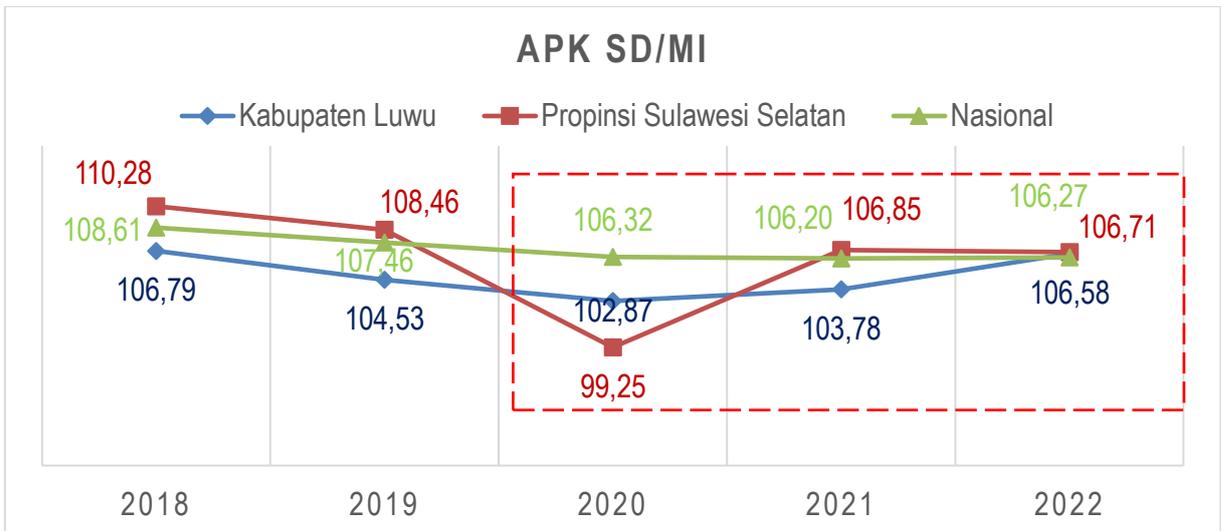
Sumber Data : BPS Propinsi Sulawesi Selatan

Grafik 2.37.
Analisis Efektifitas Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP/MTs
Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2022



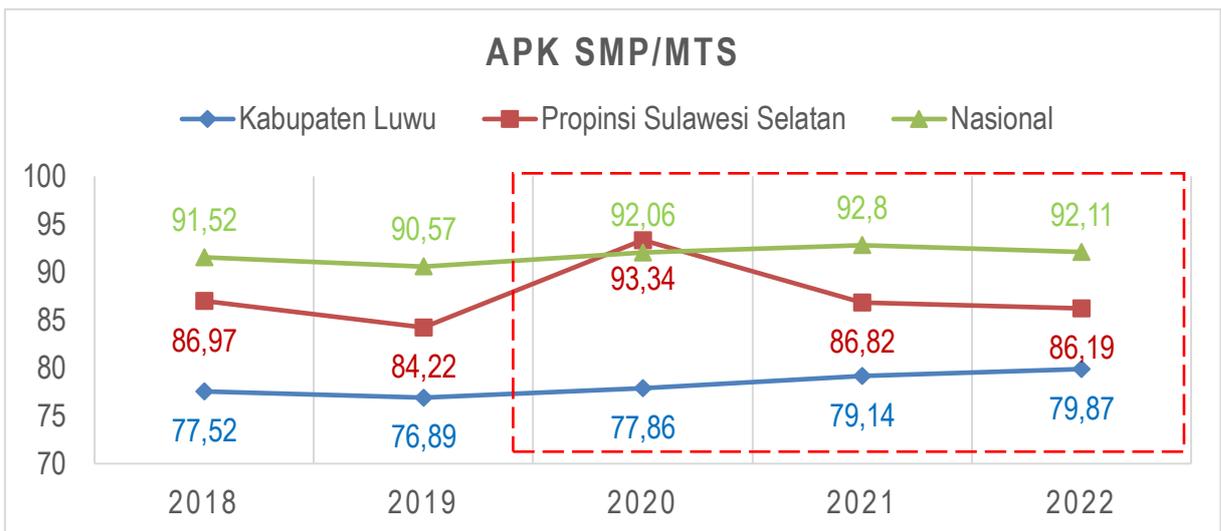
Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu

Grafik 2.38.
 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD/MI
 Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2022



Sumber Data : BPS Propinsi Sulawesi Selatan

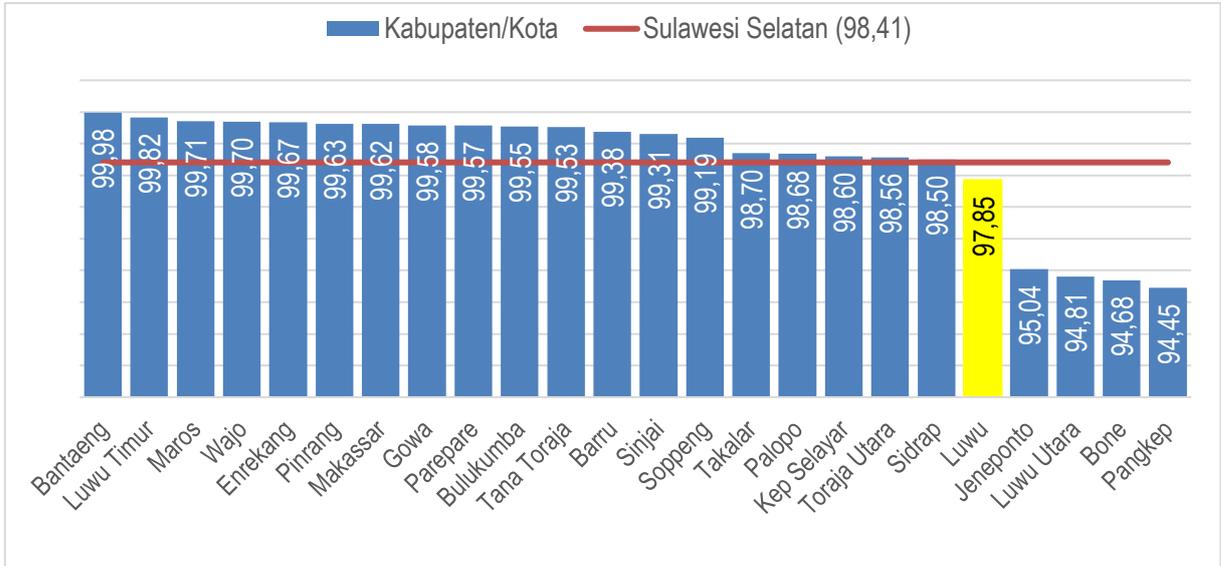
Grafik 2.39.
 Analisis Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMP/MTs
 Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2022



Sumber Data : BPS Propinsi Sulawesi Selatan

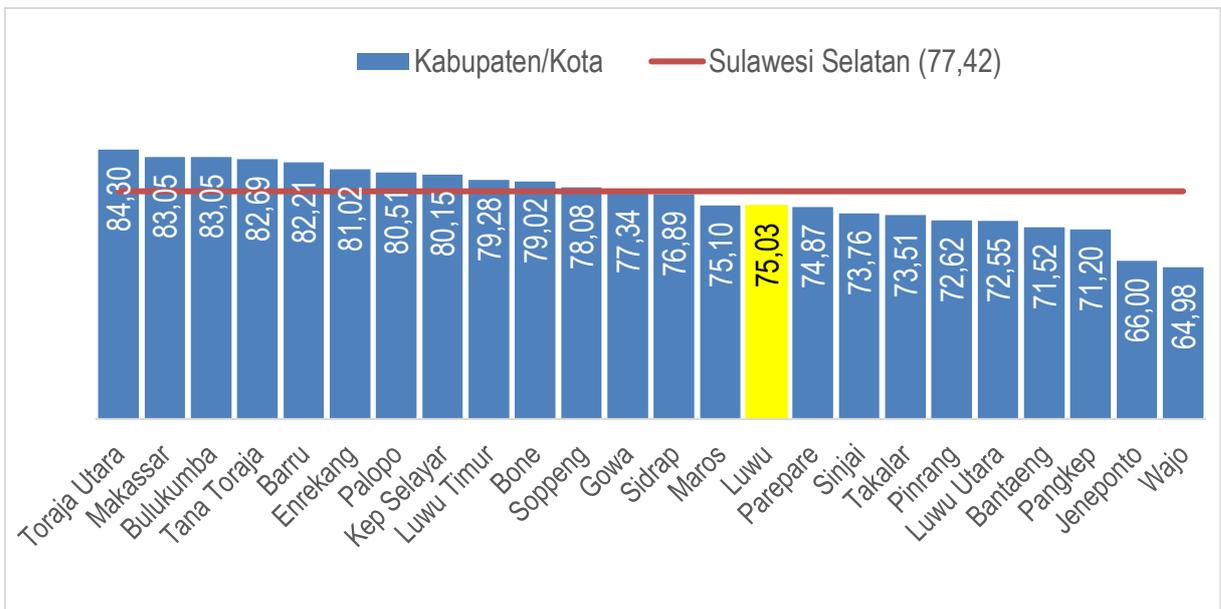
2.3.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Grafik 2.40.
Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD/MI
Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2022



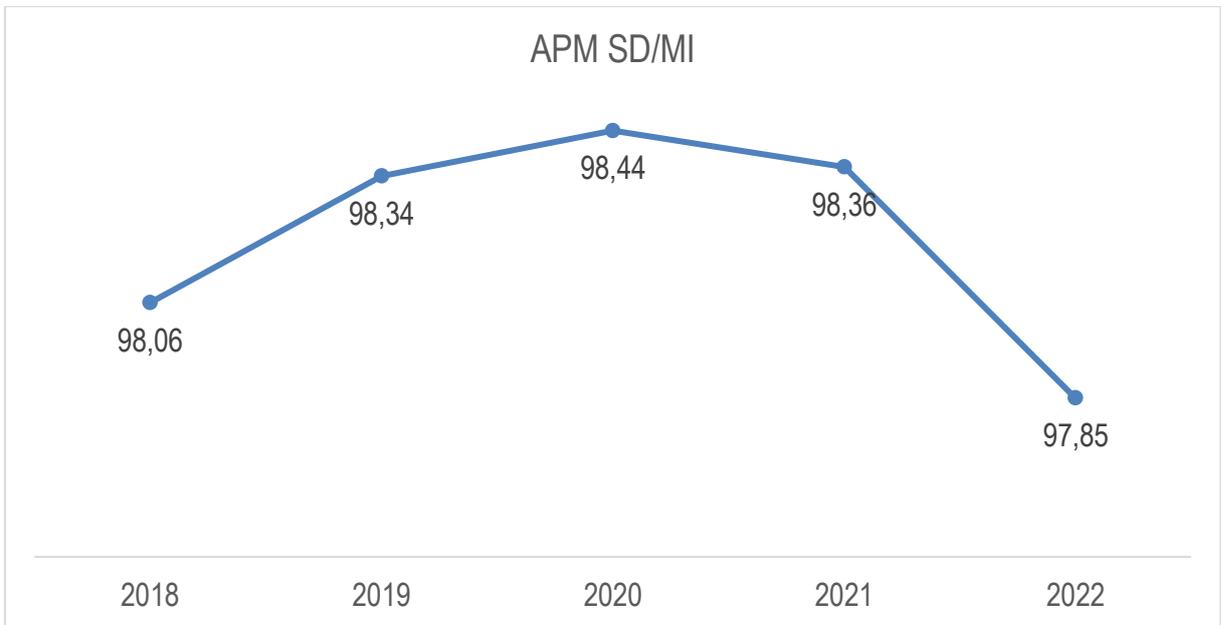
Sumber Data : BPS Propinsi Sulawesi Selatan

Grafik 2.41.
Posisi Relatif Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMP/MTs
Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2022

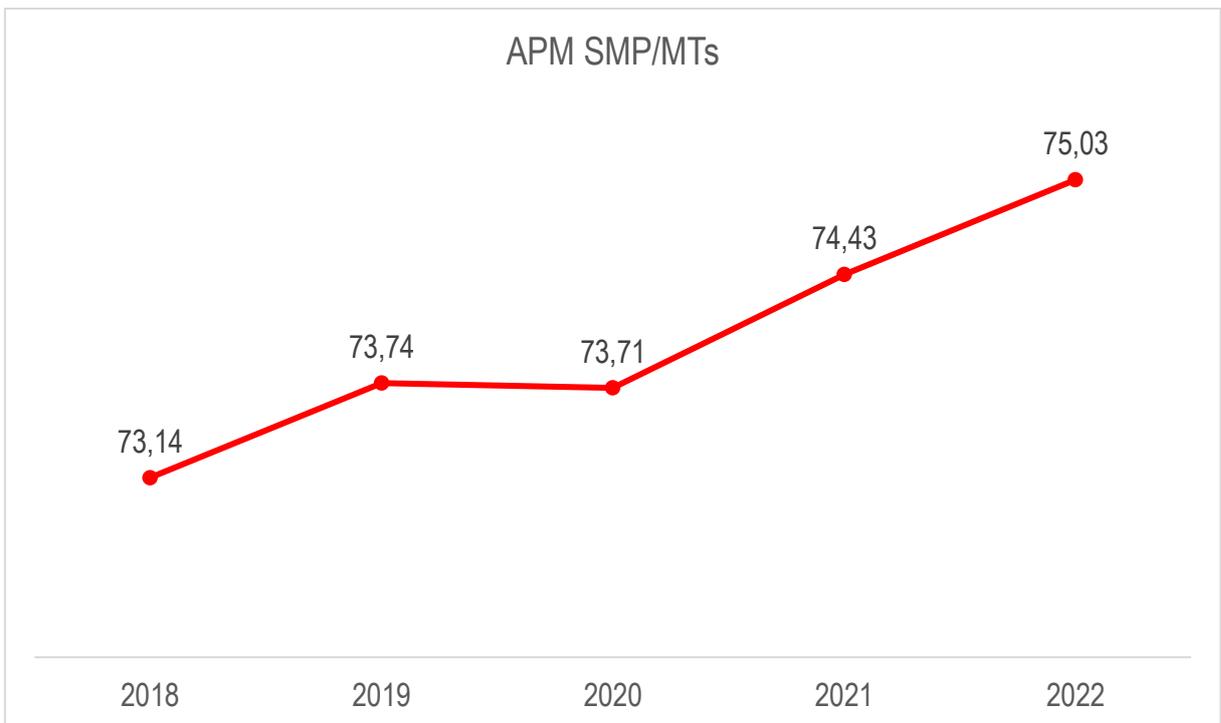


Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu

Grafik 2.42.
Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2022

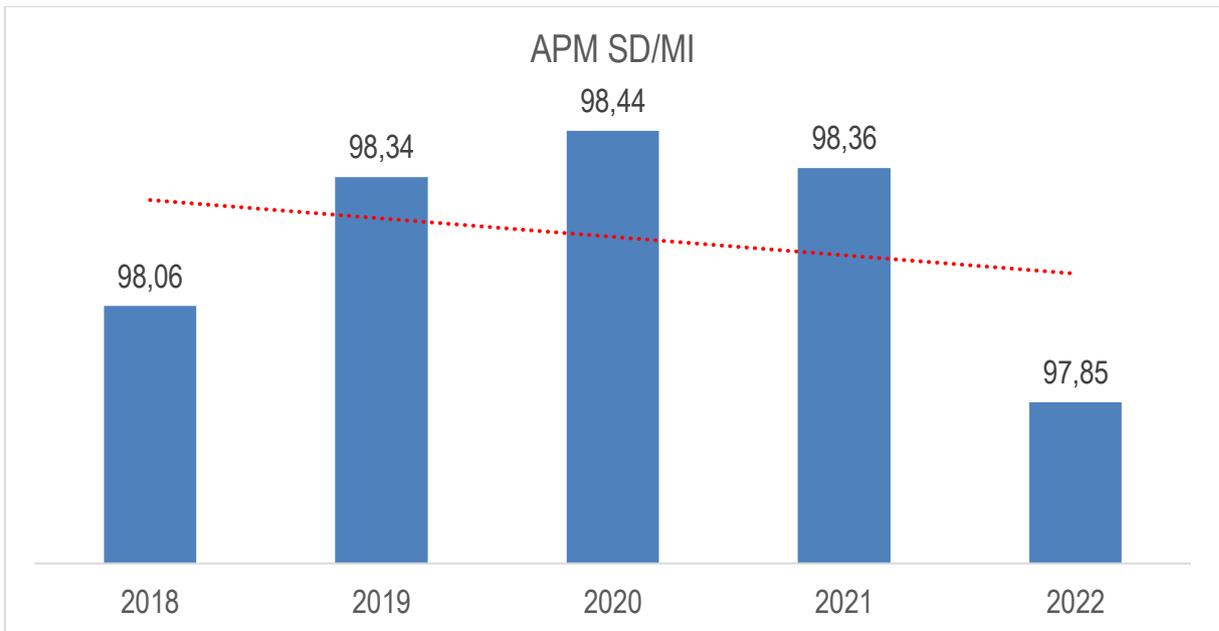


Sumber Data : BPS Propinsi Sulawesi Selatan



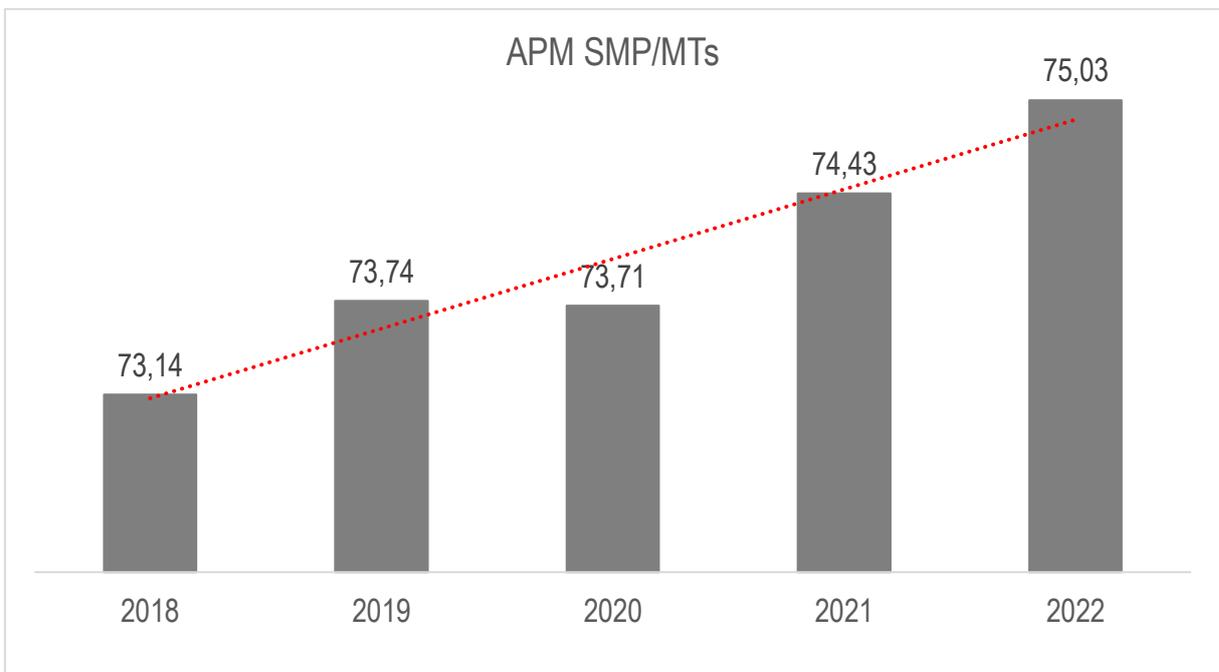
Sumber Data : BPS Propinsi Sulawesi Selatan

Grafik 2.43.
Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD/MI
Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2022



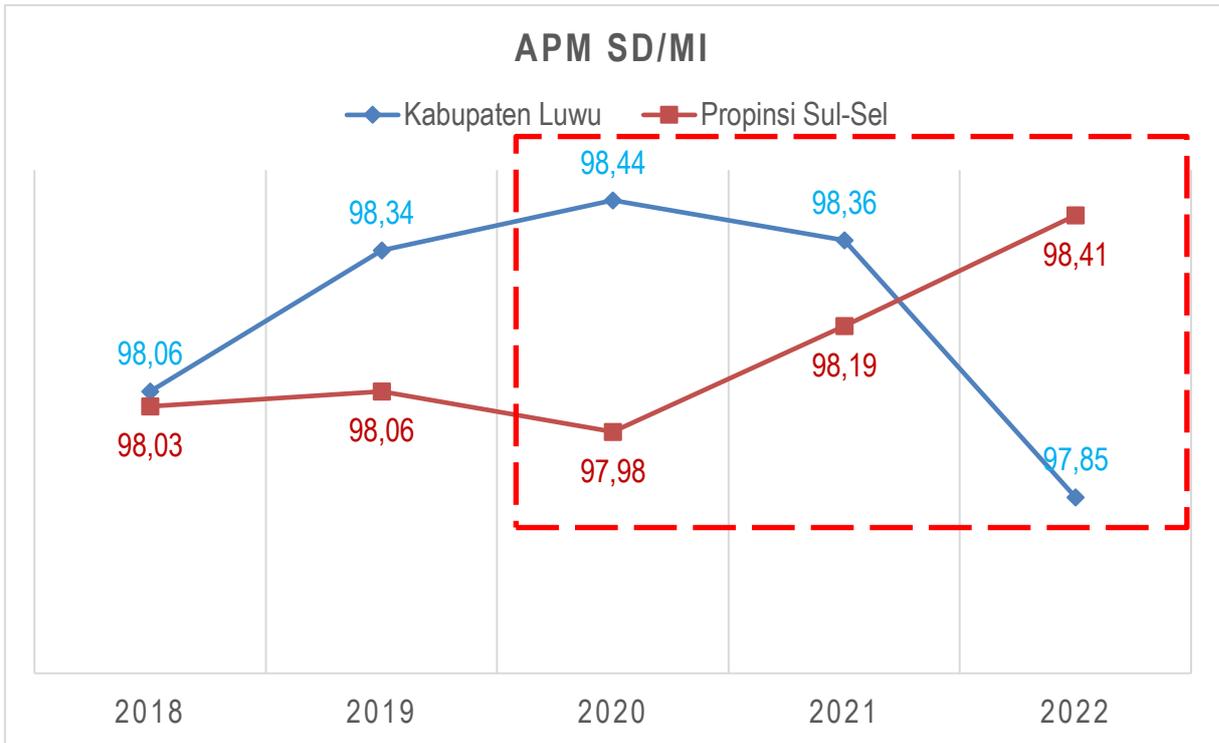
Sumber Data : BPS Propinsi Sulawesi Selatan

Grafik 2.44.
Efektifitas Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMP/MTs
Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2022



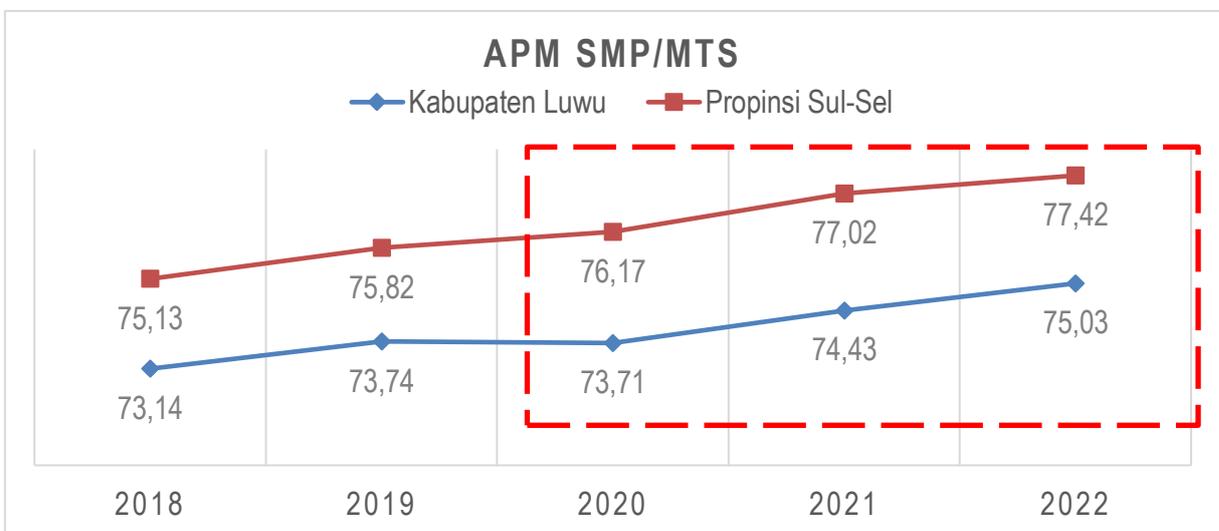
Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu

Grafik 2.45.
 Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD/MI
 Kabupaten Luwu Tahun 2018 - 2022



Sumber Data : BPS Propinsi Sulawesi Selatan

Grafik 2.46.
 Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMP/MTs
 Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2022



Sumber Data : BPS Propinsi Sulawesi Selatan

Kondisi karakteristik Angka Partispasi Kasar (APK) dan Aangka Partisipasi Murni (APM)

a. Posisi relatif

Posisi relatif Kabupaten Luwu dalam pencapaian APK jenjang pendidikan dasar masih berada dibawah capaian Propinsi Sulawesi Selatan dengan nilai capaian 106,58 persen, dimana capaian Propinsi Sulawesi Selatan yakni sebesar 106,71 persen pada tahun 2022.

Selanjutnya untuk capaian APK kabupaten Luwu pada jenjang Pendidikan Menengah Pertama pada tahun 2022 berada pada posisi ke 5 terbawah dari 24 Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan dan capaian tersebut masih berada dibawah capaian Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun yang sama yakni sebesar 86,19 persen.

b. Perkembangan Antar Waktu

Dari gambaran grafik perkembangan antar waktu pencapaian APK pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama Kabupaten Luwu tersebut di atas, nampak bahwa Kabupaten Luwu mengalami perubahan capaian setiap tahunnya, adapun capaian pada tahun 2022 pada jenjang Pendidikan Dasar yakni sebesar 106,58 persen, capaian tersebut mengalami peningkatan, dimana pada tahun sebelumnya yakni sebesar 103,78 persen atau meningkat sebesar 2,8 persen.

Selanjutnya untuk perkembangan nilai APK pada jenjang Pendidikan Menengah Pertama pada tahun 2022 yakni sebesar 79,87 persen, APK pendidikan Menengah Pertama juga mengalami kenaikan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2021 sebesar 79,14 persen atau mengalami peningkatan sebesar 0,73 persen.

c. Efektifitas

Nilai efektifitas capaian APK Kabupaten Luwu pada periode tahun 2018 – 2022 sebagaimana gambaran pada grafik tersebut di atas menandakan bahwa tingginya angka partisipasi sekolah tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar

Selanjutnya untuk efektifitas capaian APK jenjang pendidikan menengah pertama Kabupaten Luwu mengalami peningkatan secara konsisten, hal tersebut juga menandakan bahwa tingginya capaian APK disebabkan banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang pendidikan menengah pertama yang diluar usia sekolah yang seharusnya.

d. Relevansi

Analisis relevansi capaian APK masing-masing wilayah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama yakni antara Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional

diketahui tren dan pola pencapaiannya mengalami perubahan dan diketahui nilainya melebihi 100 persen pada tahun 2022 untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama sebesar 79,87 persen, hal tersebut menandakan bahwa dalam tiga tahun terakhir capaian Kabupaten Luwu masih sejalan dengan capaian Propinsi dan Nasional.

Kondisi karakteristik Angka Partispasi Murni (APM)

a. Posisi relatif

.Posisi relatif capaian APM Kabupaten Luwu pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama masih dibawah capaian Propinsi Sulawesi Selatan, dimana Capaian Kabupaten Luwu sebesar 97,85 persen dan Propinsi sebesar 98,41 persen pada jenjang pendidikan dasar pada tahun yang sama yakni tahun 2022, selanjutnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama sebesar 75,03 persen sementara untuk propinsi Sulawesi Selatan sebesar 77,42 persen.

b. Perkembangan Antar Waktu

Grafik tren pola perkembangan capaian nilai APM Kabupaten Luwu pada periode tahun 2018 – 2021 cenderung mengalami peningkatan, namun pada tahun 2022 telah mengalami penurunan sebesar 0,51 persen atau menjadi sebesar 97,85 persen pada jenjang pendidikan dasar, selanjutnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama justru mengalami peningkatan secara konsisten pada periode tahun 2018 – 2022, dimana pada tahun 2018 sebesar 73,14 persen menjadi sebesar 75,03 persen pada tahun 2022.

c. Efektifitas

Dari grafik efektifitas APM pada periode tahun 2018 – 2022 pada jenjang Pendidikan Dasar tersebut diatas, dapat diketahui bahwa daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah pendidikan di Kabupaten Luwu tergolong belum sepenuhnya bersekolah tepat waktu. Selanjutnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama justru tergolong efektif jika dilihat dari pola perkembangan karena secara konsisten mengalami peningkatan, namun capaian tersebut belum maksimal dengan angka 100 sehingga hal tersebut menandakan bahwa masih Pemerintah Kabupaten Luwu harus terus berupaya meningkatkan pencapaian nilai APM dalam rangka penanggulangan kemiskinan..

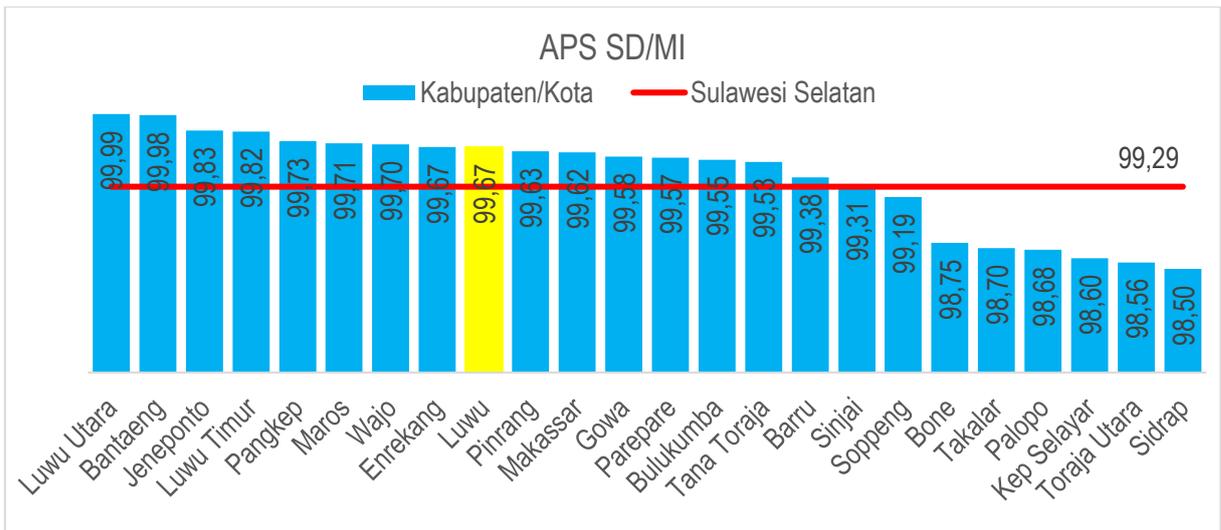
d. Relevansi

Tren dan pola pencapaian APM masing-masing wilayah mengalami perubahan dan diketahui nilainya masih dibawah 100 persen pada tahun 2022, hal tersebut menandakan bahwa dalam tiga tahun terakhir capaian Kabupaten Luwu masih sejalan dengan capaian Propinsi pada jenjang

pendidikan menengah pertama, namun berbeda dengan capaian pada jenjang pendidikan dasar, dimana diketahui adanya pola yang berbeda dengan capaian perkembangan propinsi Sulawesi, oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Luwu terus berupaya agar program penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan APM di tahun tahun mendatang.

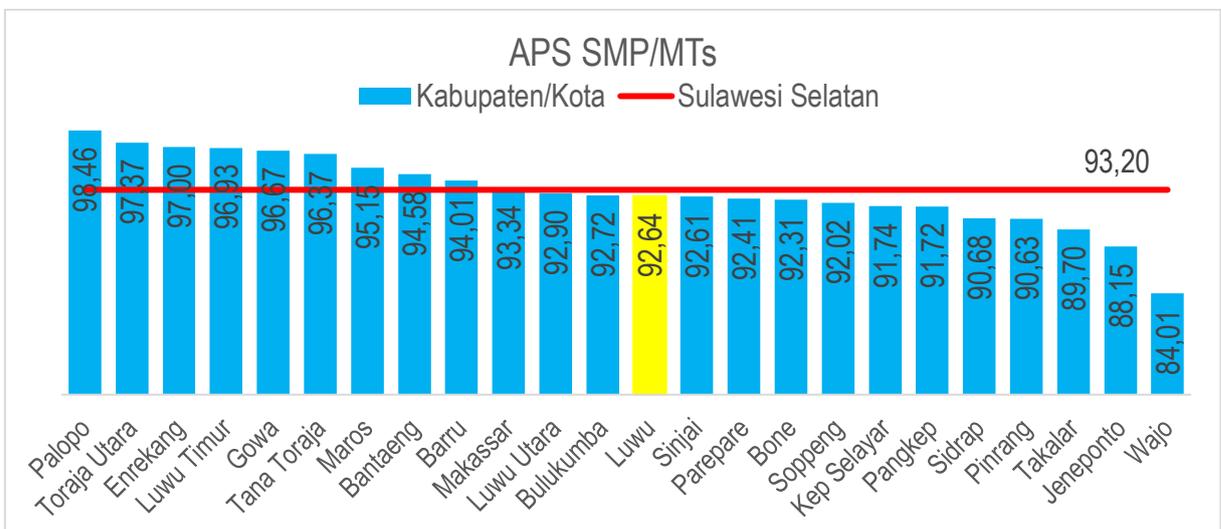
2.3.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Grafik 2.47.
Posisi Relatif Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Luwu Tahun 2022



Sumber Data : Buku Statistik Pendidikan Propinsi Sul-sel

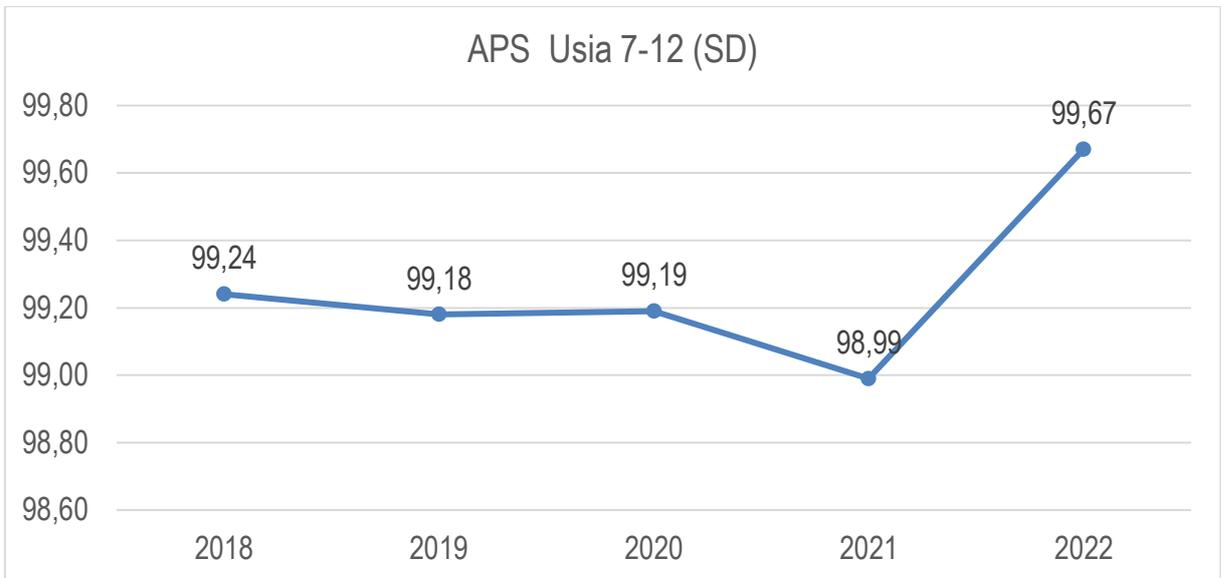
Grafik 2.48.
Posisi Relatif Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah Pertama di Kabupaten Luwu Tahun 2022



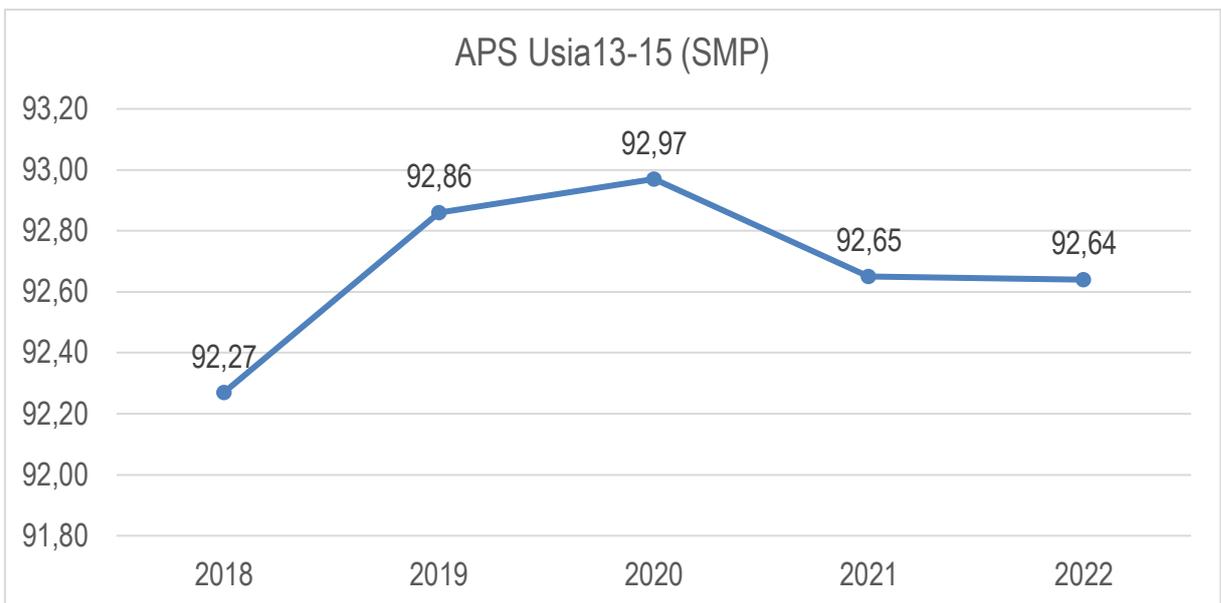
Sumber Data : Buku Statistik Pendidikan Propinsi Sul-sel

Grafik 2.49.

Perkembangan Antar Waktu Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama di Kabupaten Luwu Tahun 2022



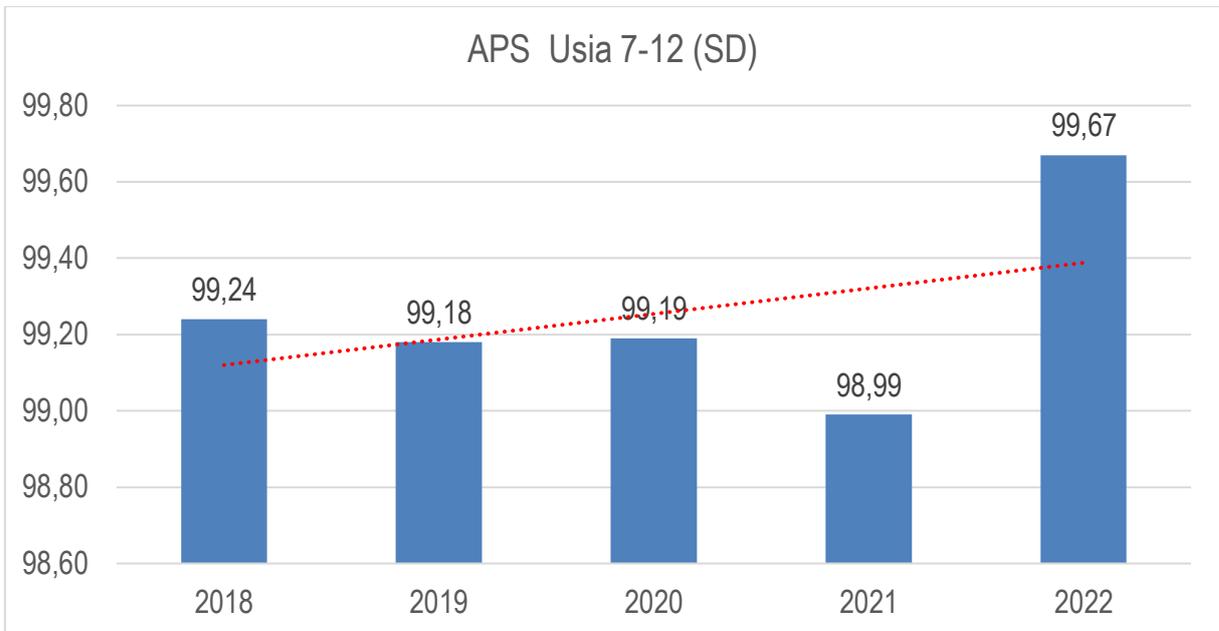
Sumber Data : BPS Propinsi Sulawesi Selatan



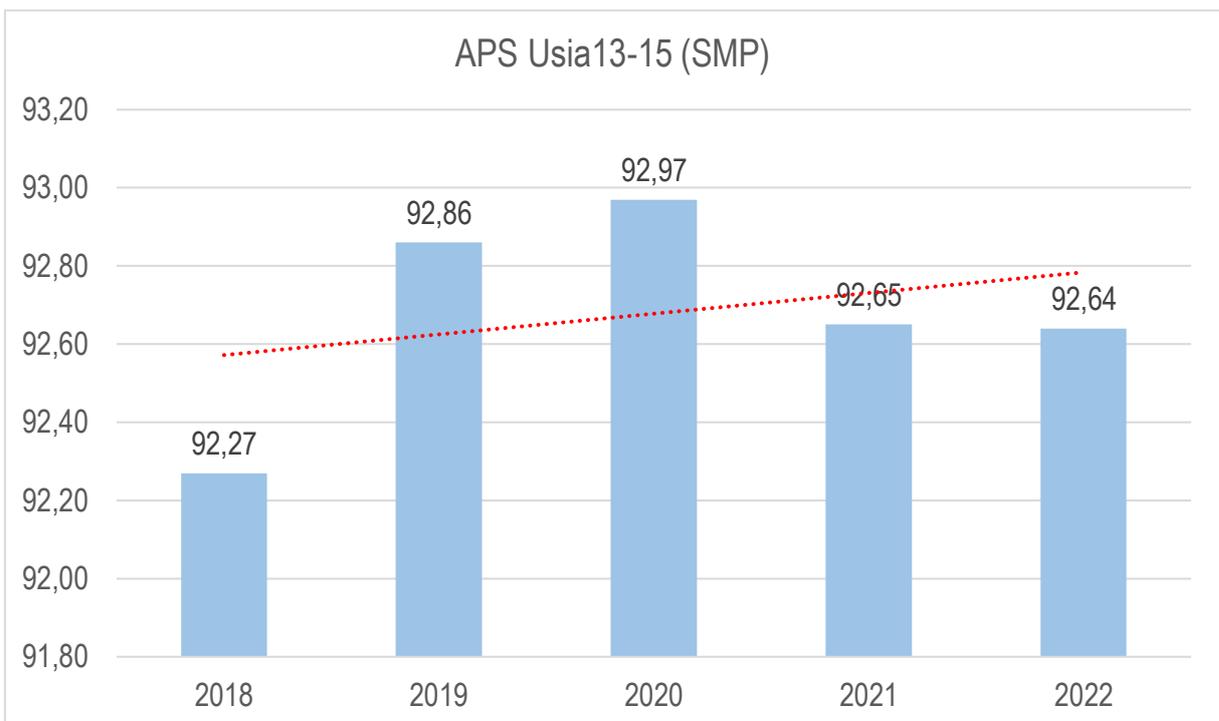
Sumber Data : BPS Propinsi Sulawesi Selatan

Grafik 2.50.

Efektifitas Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Luwu Tahun 2021

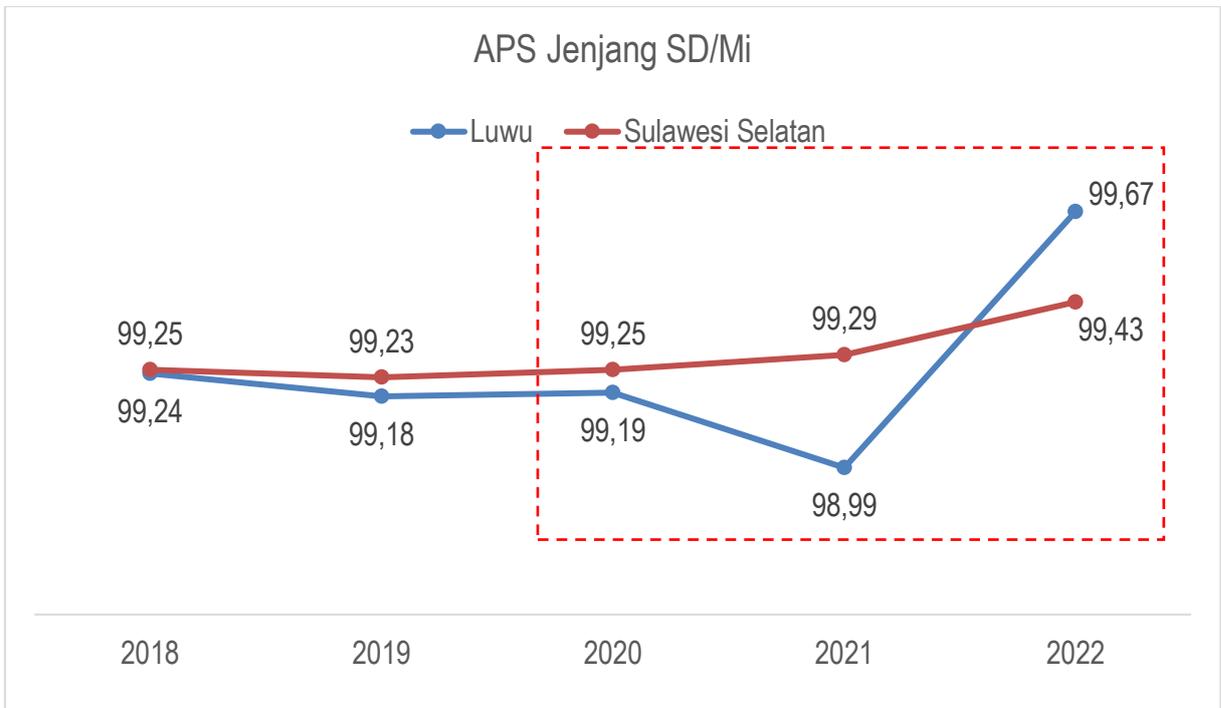


Sumber Data : BPS Propinsi Sulawesi Selatan

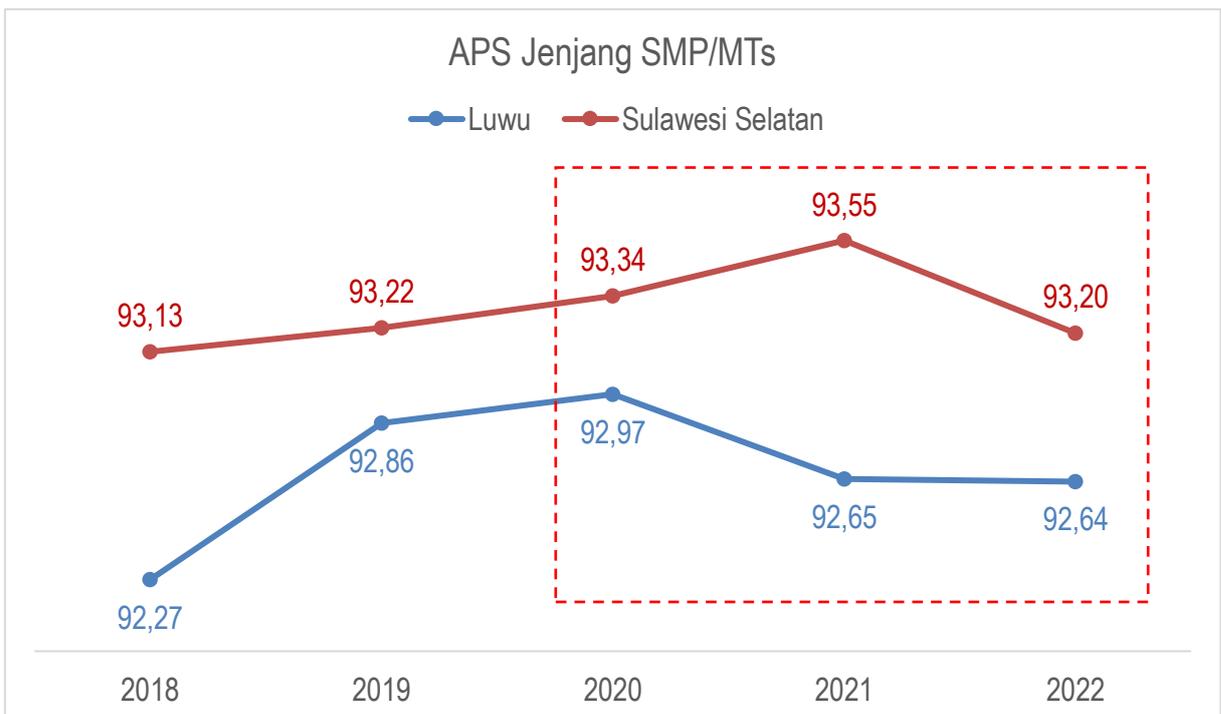


Sumber Data : BPS Propinsi Sulawesi Selatan

Grafik 2.51.
 Relevansi Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar
 Kabupaten Luwu dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022



Sumber Data : BPS Propinsi Sulawesi Selatan



Sumber Data : BPS Propinsi Sulawesi Selatan

Kondisi karakteristik Angka Partispasi Sekolah (APS)

a. Posisi relatif

Pada tahun 2022, berdasarkan grafik posisi relatif kabupaten Luwu tersebut diatas, nampak bahwa Kabupaten Luwu berada pada posisi ke 9 dari 24 Kabupaten/Kota tertinggi yang ada di Sulawesi Selatan dalam pencapaian nilai APS jenjang pendidikan dasar, adapun capaian tersebut masih berada dibawah capaian Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun yang sama, dimana Kabupaten Luwu dengan capaian nilai sebesar 99,67 persen, sementara Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 99,29 persen.

Selanjutnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama, posisi Kabupaten Luwu berada pada posisi ke 13 tertinggi dalam pencapaian APS, namun capaian tersebut juga masih berada dibawah capaian Propinsi Sulawesi Selatan.

b. Perkembangan Antar Waktu

Grafik tren perkembangan capaian nilai APS Kabupaten Luwu pada periode tahun 2018 - 2022 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 sebesar 99,24 persen, mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar 99,18 persen, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar 99,19 persen, namun pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,68 persen atau menjadi sebesar 99,67 persen, dimana pada tahun 2021 sebesar 98,99 persen.

Dari tren grafik efektifitas APS pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama pada periode tahun 2018 - 2022 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa trennya cenderung meningkat, hal tersebut menandakan bahwa pemerataan akses terhadap pendidikan tergolong efektif dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu namun belum sepenuhnya maksimal, capaian APS tersebut diharapkan maksimal pada tahun tahun mendatang.

c. Relevansi

Tren dan pola pencapaian APS masing-masing wilayah mengalami perubahan dan diketahui nilainya masih dibawah 100 persen pada tahun 2022, hal tersebut menandakan bahwa dalam tiga tahun terakhir yakni periode 2020-2022 capaian Kabupaten Luwu tidak sejalan dengan capaian Propinsi, dimana capaian Kabupaten Luwu pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan, namun kembali mengalami peningkatan yang sama pada tahun 2022

2.4. Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu variabel kesejahteraan masyarakat yang dapat memberi gambaran tingkat kesehatan masyarakat sehubungan dengan kualitas kehidupannya, kondisi kesehatan penduduk merupakan salah satu modal bagi keberhasilan pembangunan karena dengan penduduk yang sehat, pembangunan diharapkan dapat berjalan dengan baik.

Dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Luwu telah menetapkan kebijakan untuk peningkatan akses dan derajat kesehatan dengan sasaran dalam rangka penanggulangan kemiskinan antara lain menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Balita (AKABA), dan Angka Kematian Neonatal.

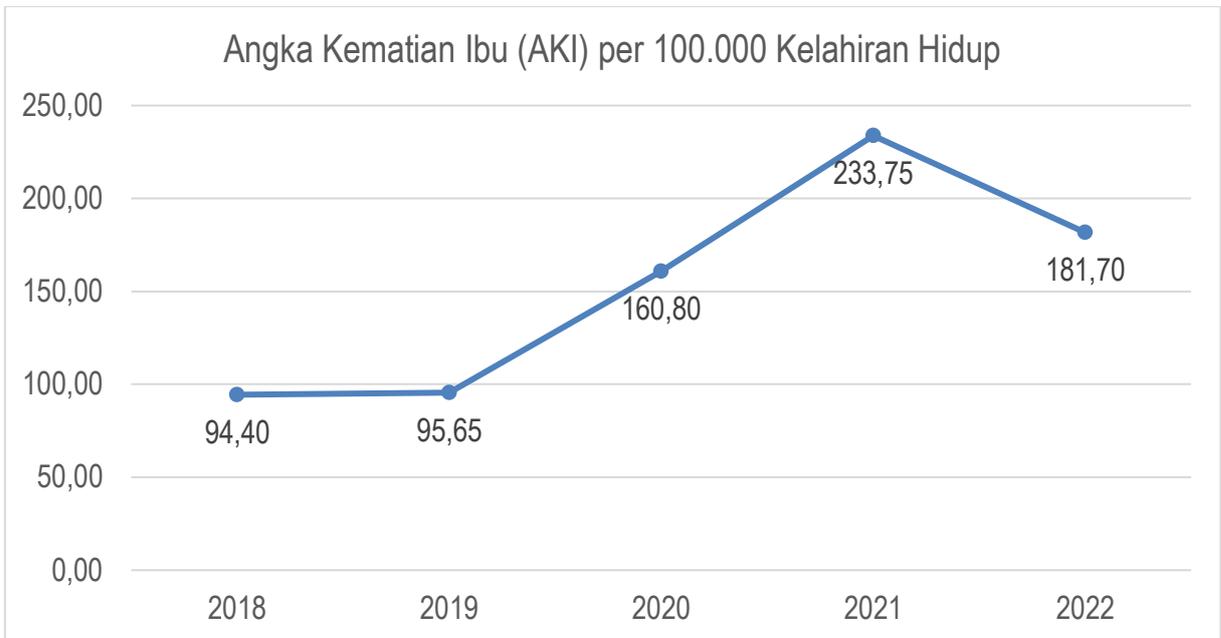
Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan program berbagai penyebab kematian maupun program kesehatan ibu dan anak, dimana AKB adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 (satu) tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama

Angka Kematian Balita (AKaBA) merupakan jumlah kematian anak berusia 0 - 4 tahun per 1.000 kelahiran hidup. Perhitungan angka kematian Balita dapat menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor – faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, pelayanan neonatal serta penyakit infeksi dan

Angka kematian ibu hamil (Maternal Mortality Rate) adalah jumlah kematian ibu pada masa kehamilan, melahirkan dan nifas per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu AKI berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas

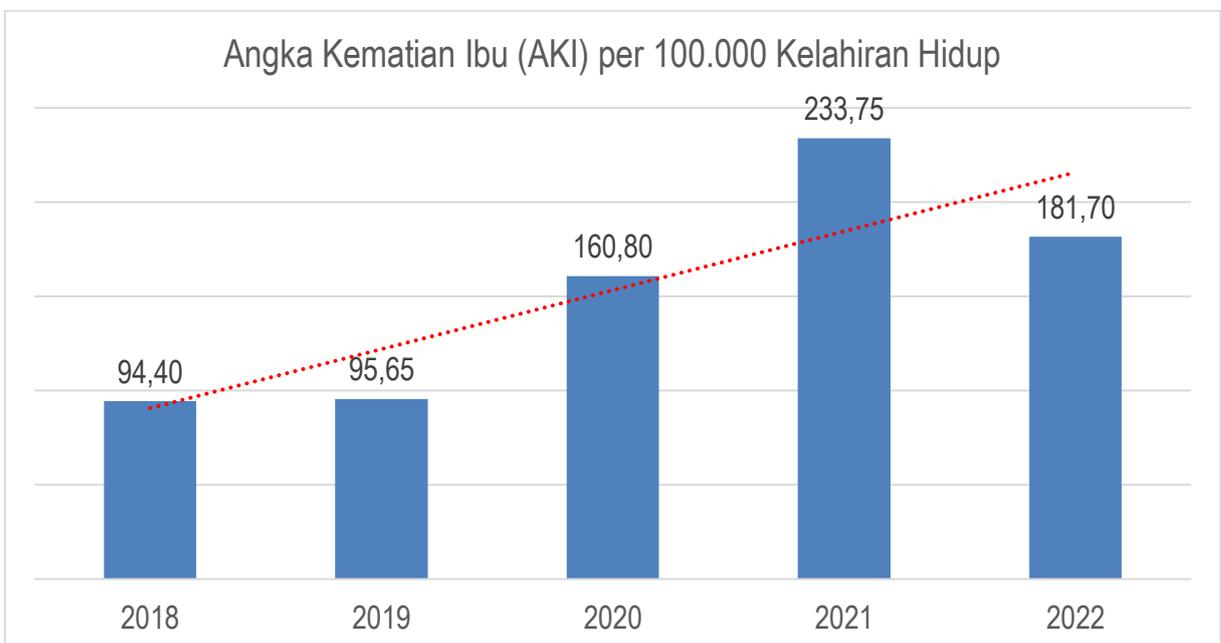
Angka Kematian Bayi Baru Lahir atau Neonatal Death Rate merupakan jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.

Grafik 2.52.
 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup
 Tahun 2018 – 2022



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu

Grafik 2.53.
 Efektifitas Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Luwu
 Tahun 2018 – 2022

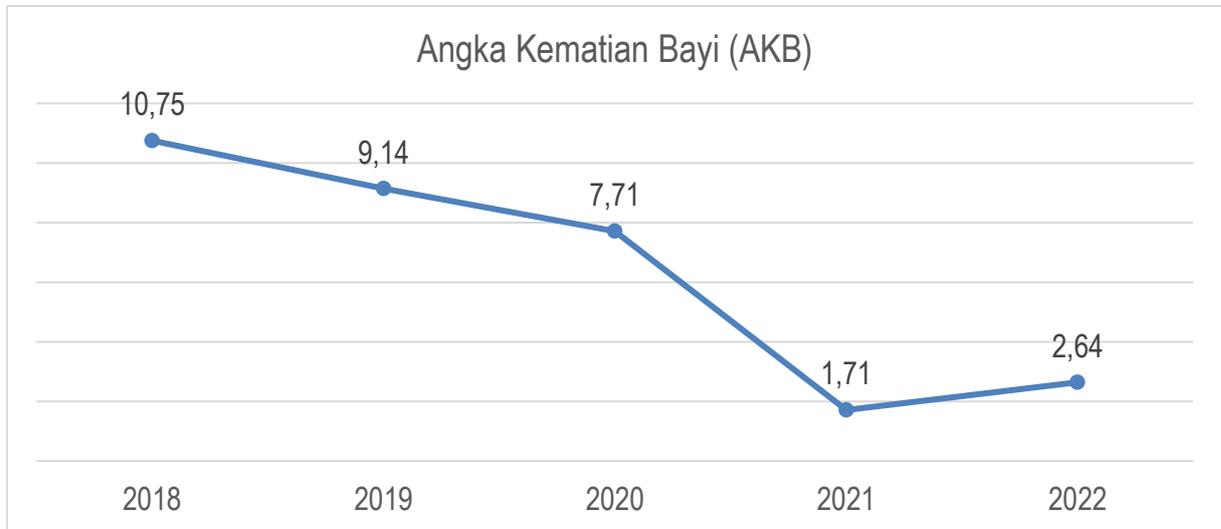


Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu

2.4.1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Grafik 2.54.

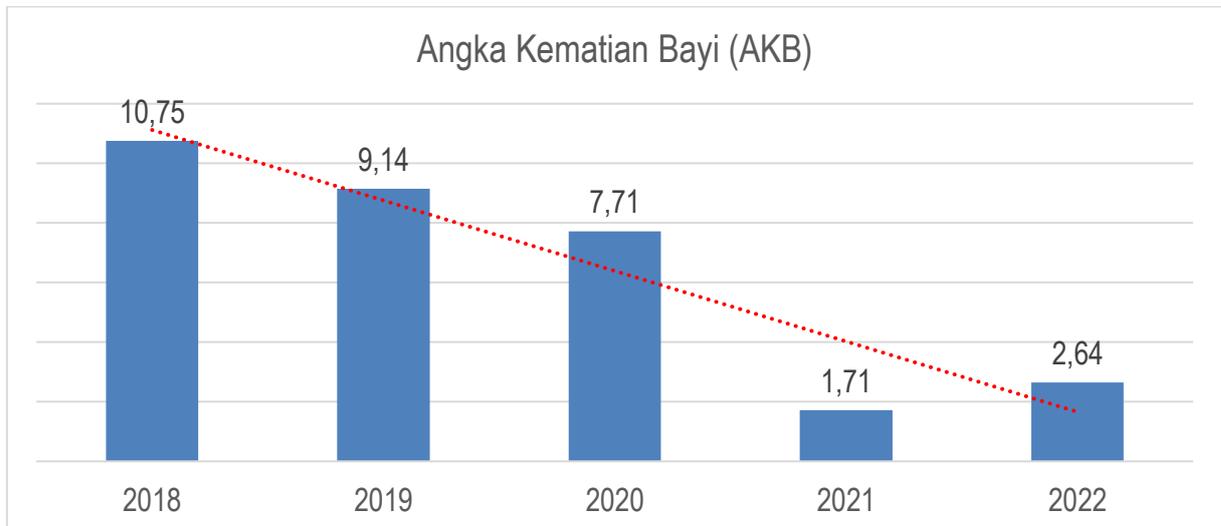
Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Luwu Tahun 2018-2022



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu

Grafik 2.55.

Efektifitas Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Luwu Tahun 2018-2022

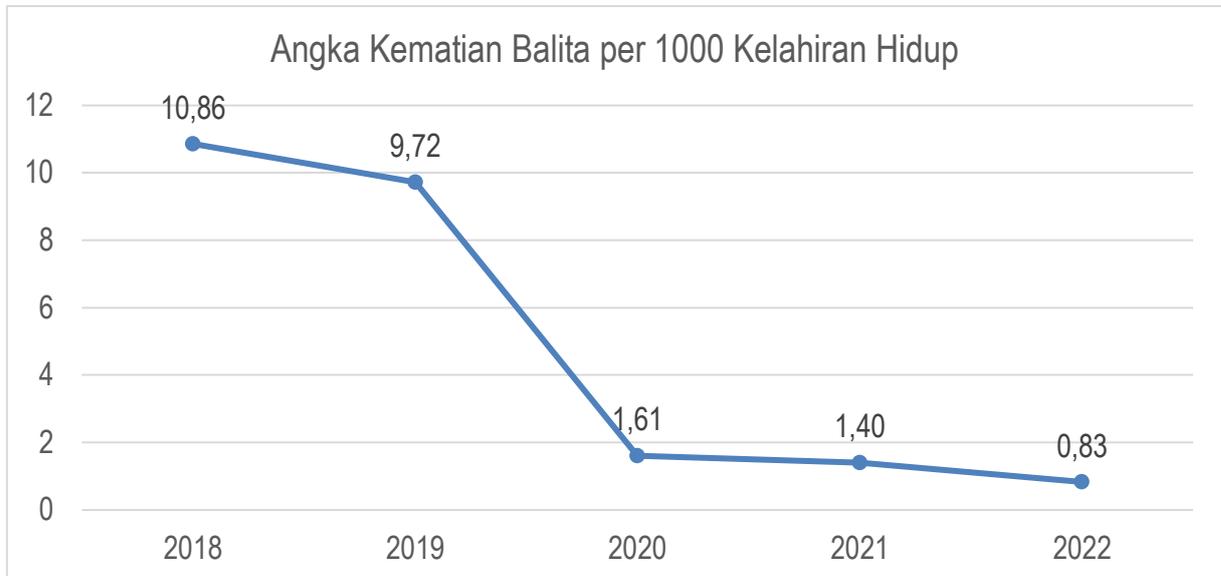


Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu

2.4.2. Angka Kematian Balita (AKABa)

Grafik 2.56.

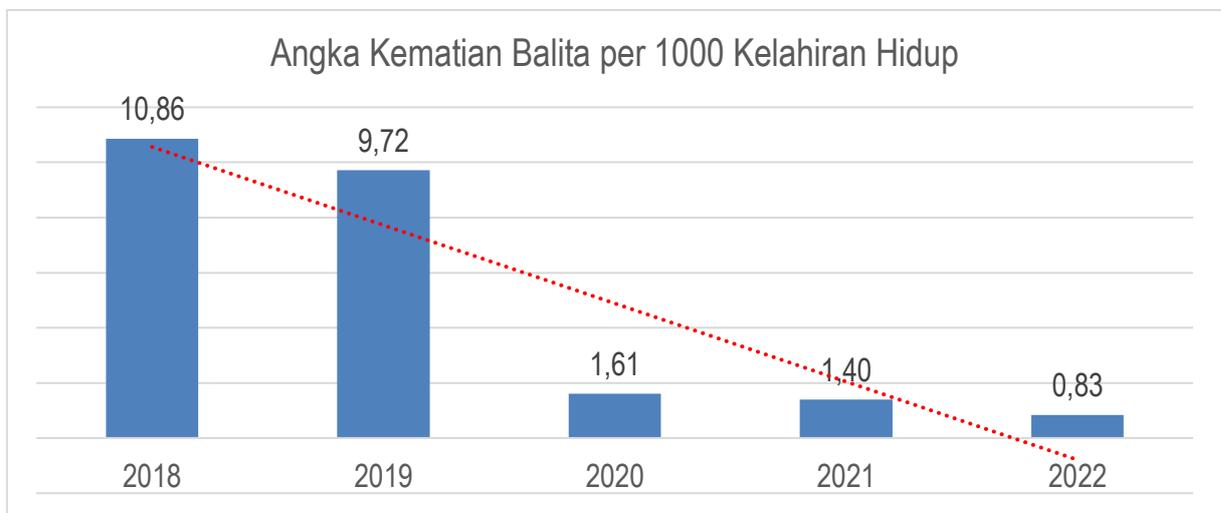
Perkembangan Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Luwu Tahun 2018-2022



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu

Grafik 2.57.

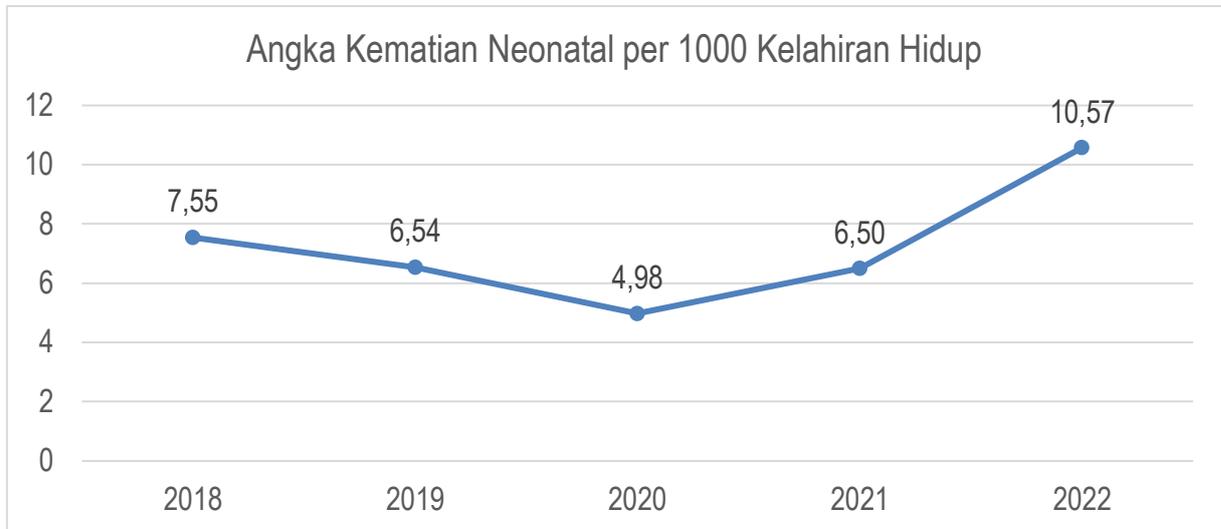
Efektifitas Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2022



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu

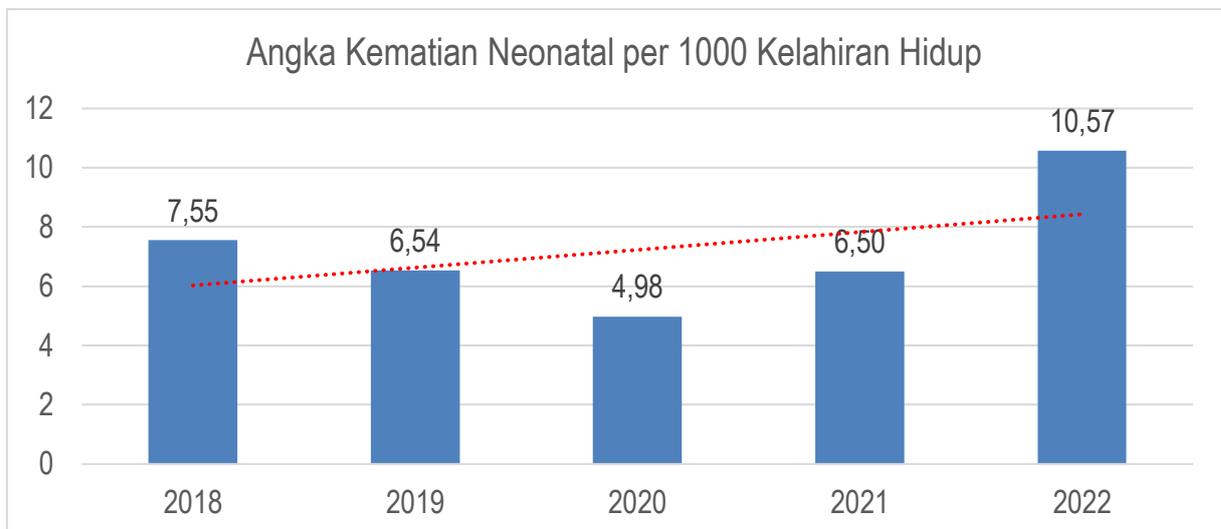
2.4.3. Angka Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup

Grafik 2.58.
Perkembangan Rasio Angka Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Luwu Tahun 2018-2021



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu

Grafik 2.59.
Efektifitas Rasio Angka Kematian Neonatal (AKN) Per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Luwu Tahun 2018-2021



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu

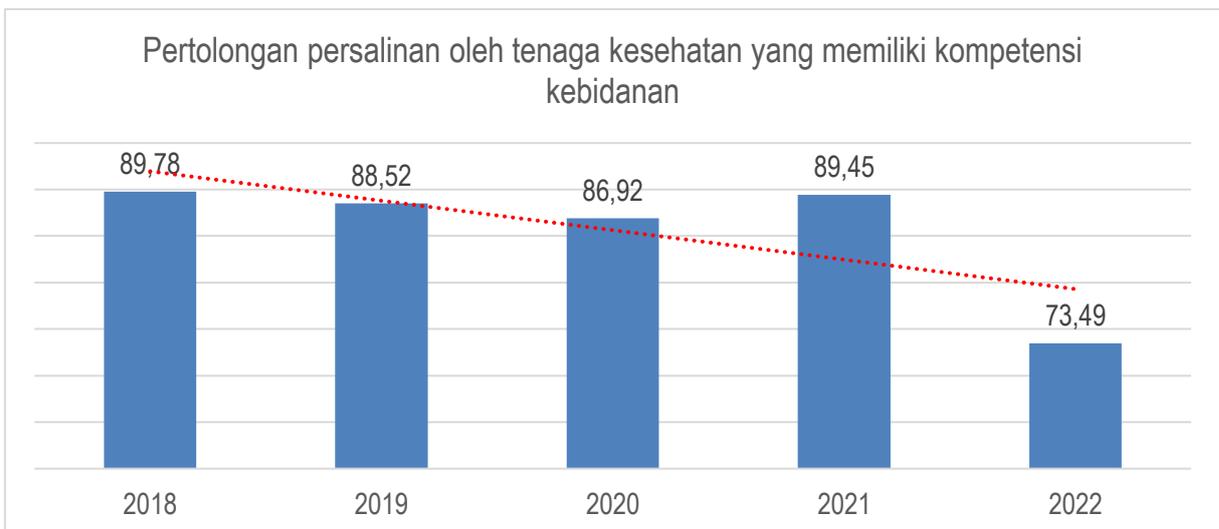
2.4.4. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Grafik 2.60.
Perkembangan Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Kompetensi Kebidanan)
di Kabupaten Luwu Tahun 2022



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu

Grafik 2.61.
Efektifitas Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan (Kompetensi Kebidanan)
di Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2022



Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu

Kondisi karakteristik Indikator Bidang Kesehatan

a. Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan grafik AKI periode 2018-2022, Nampak bahwa pada tahun 2022, masih terdapat kasus Ibu Hamil yang meninggal karena Hamil, bersalin, dan Nifas selama 1 tahun sebanyak 11 kasus dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 6.054 atau sebesar 181,70 Per 100.000 Kelahiran Hidup, capaian AKI tersebut mengalami penurunan, dimana pada tahun sebelumnya sebanyak 15 kasus kematian dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 6.417 atau sebesar 233,75 Per 100.000 Kelahiran Hidup.

Selanjutnya untuk capaian AKB, pada periode 2018 - 2022 trennya mengalami penurunan setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 2,03 persen

Selanjutnya untuk capaian AKABa pada periode 2018-2022 mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 3,34 persen, dimana pada tahun 2018 sebesar 10,86 per 1.000 Kelahiran Hidup, mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar 9,72 per 1.000 Kelahiran hidup, kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 1,61 per 1.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 1,40 per 1.000 kelahiran hidup, dan menurun sebesar 0,57 persen atau menjadi sebesar 0,03 per 1.000 Kelahiran Hidup.

Selanjutnya untuk AKN pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,07 persen atau menjadi sebesar 10,57 per 1.000 kelahiran hidup, dimana pada tahun 2021 sebesar 6,50 per 1.000 kelahiran hidup, hal tersebut menandakan bahwa pada tahun 2022, setiap 1.000 kelahiran hidup terdapat 10-11 jumlah kematian.

Selanjutnya untuk cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, capaian pada periode tahun 2018 – 2022 mengalami perubahan setiap tahunnya, jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebesar 7.046 jiwa pada tahun 2018 dengan jumlah sasaran ibu bersalin pada waktu yang sama adalah sebanyak 7.046 jiwa atau dengan capaian cakupan sebesar 89,78 persen, menurun menjadi sebesar 73,49 persen atau dengan jumlah ibu bersalin yang ditolong sebanyak 6.064 jiwa dengan jumlah sasaran ibu bersalin pada waktu yang sama yakni sebanyak 8.252 jiwa pada tahun 2022.

b. Efektifitas

Dari grafik perkembangan masing-masing indikator bidang kesehatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu, dapat disimpulkan bahwa capaian masing-masing indikator utamanya capaian AKB, AKABa, dan cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan tergolong efektif dikarenakan trend dan pola perkembangannya cenderung mengalami penurunan pada periode tahun 2018-2022, berbeda dengan beberapa indikator yang lain seperti AKI, dan Angka Kematian Neonatal, kedua indikator tersebut cenderung mengalami peningkatan

sehingga mengakibatkan capaian tersebut tergolong kurang efektif sehingga Pemerintah Kabupaten Luwu terus berupaya agar indikator bidang kesehatan nilai capaiannya sesuai dengan yang diharapkan pada tahun – tahun mendatang.

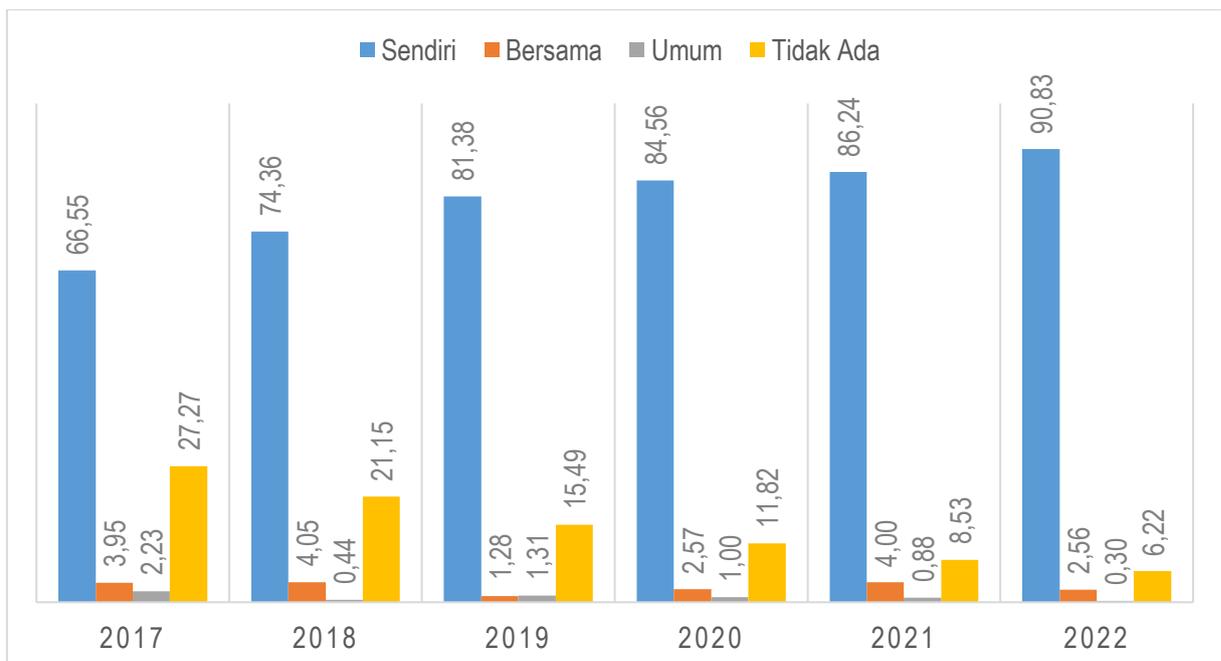
2.5. Bidang Infrastruktur Dasar

Kebijakan pembangunan bidang infrastruktur wilayah di Kabupaten Luwu yakni meningkatkan aksesibilitas infrastruktur utamanya diarahkan pada kegiatan yang bertujuan untuk lebih meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkelanjutan dengan strategi peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah yang sarasannya meningkatkan aksesibilitas infrastruktur,.

Pemerintah Kabupaten Luwu telah menetapkan berbagai program dalam rangka meningkatkan pelayanan publik melalui penyediaan infrastruktur dasar seperti air bersih, energi listrik, jalan dan jembatan, serta infrastruktur lainnya dengan sasaran program adalah masyarakat secara umum.

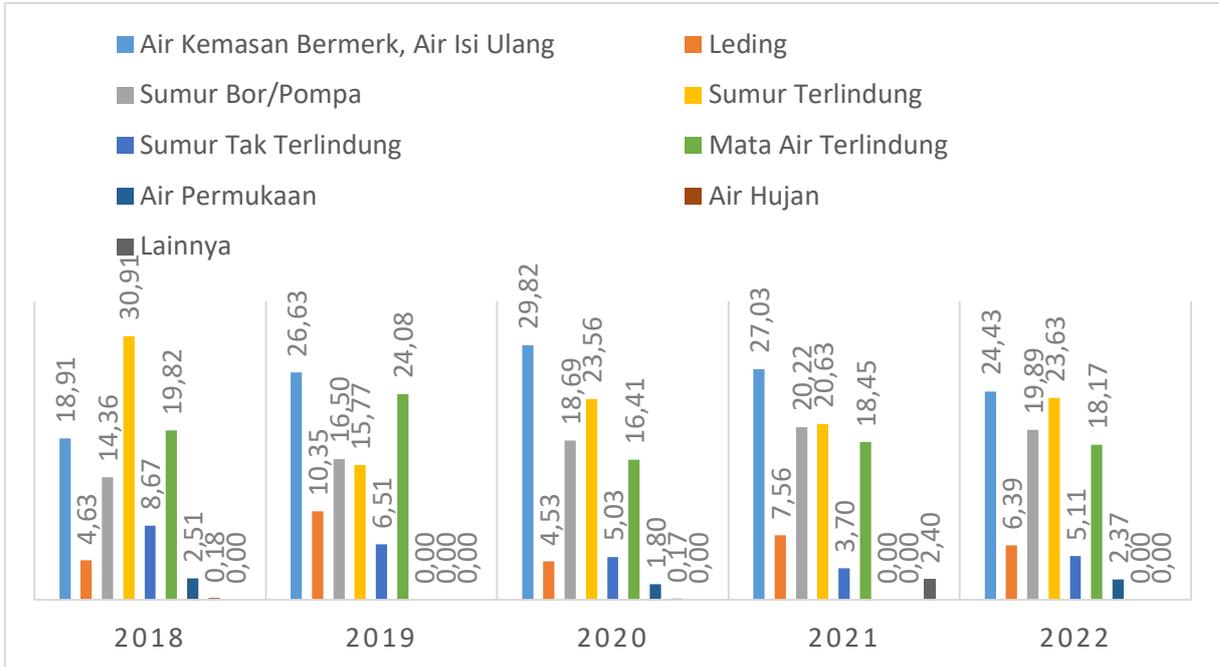
2.5.1. Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

Grafik 2.62.
Perkembangan Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak di Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2022



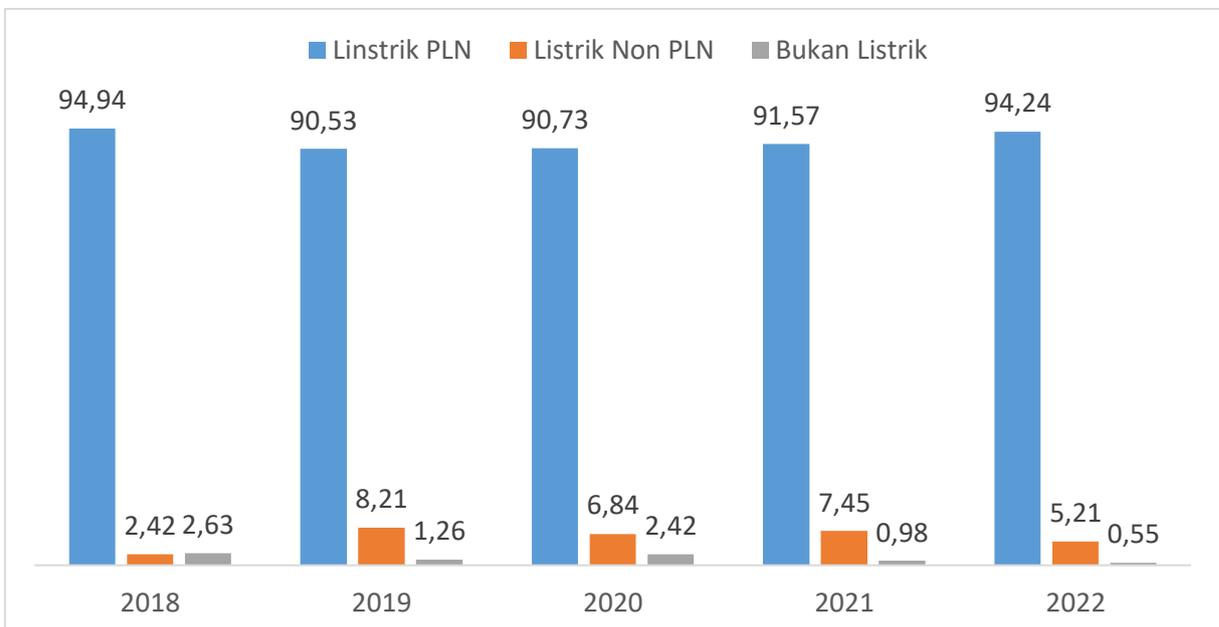
2.5.2. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak

Grafik 2.63.
Perkembangan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2022



2.5.3. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik

Grafik 2.64.
Perkembangan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Listrik di Kabupaten Luwu Tahun 2018 – 2022



Kondisi karakteristik Indikator Bidang Infrastruktur Dasar

a. Perkembangan Antar Waktu

Dari masing-masing perkembangan indikator infrastruktur dasar tersebut di atas, nampak bahwa dari tahun 2018-2022 terus mengalami perubahan yang cukup membaik, utamanya pada indikator *persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak*, dimana pada tahun 2017, yang menggunakan jamban sendiri sebanyak 66,55 persen, kemudian pengguna jamban sendiri sebanyak 3,95 persen, yang menggunakan jamban umum sebanyak 2,23 persen dan tidak memiliki jamban sebanyak 27,27 persen, selanjutnya untuk tahun 2022, pengguna jamban sendiri mengalami peningkatan sebesar 24,28 persen, yang menggunakan jamban bersama menurun sebesar 1,39 persen atau menjadi sebesar 2,56 persen, kemudian rumah tangga yang menggunakan jamban umum, pada tahun 2017 sebanyak 2,23 persen, mengalami penurunan sebesar 1,93 persen atau menurun menjadi sebesar 0,30 persen, dan selanjutnya untuk rumah tangga yang tidak memiliki jamban pada tahun 2017 sebesar 27,27 persen, terus mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar 6,22 persen atau mengalami penurunan sebesar 21,05 persen pada tahun 2022.

jamban sendiri sebanyak 66,65 persen, kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar 90,83 persen atau mengalami peningkatan selama periode tahun 2017-2022 sebanyak 24,28 persen.

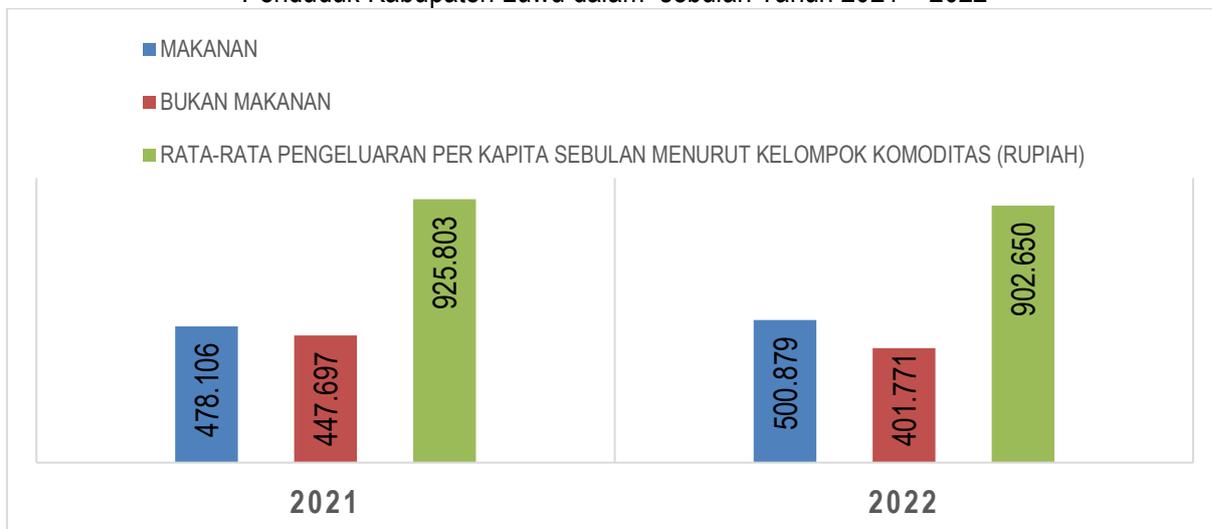
2.6. Bidang Ketahanan Pangan

Dalam rangka mewujudkan upaya pemerintah untuk mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing utamanya dalam hal ketahanan pangan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan, maka Pemerintah Kabupaten Luwu telah menetapkan strategi melalui pengembangan potensi pertanian dan ekonomi kerakyatan yang tangguh berbasis agribisnis yang bertujuan meningkatkan produksi dan kemandirian pangan sebagai penopang kesejahteraan masyarakat utamanya kelompok masyarakat miskin.

Adapun ketahanan pangan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh 3 (Tiga) hal yakni ketersediaan, akses, pasar dan distribusi. di Kabupaten Luwu rata – rata pengeluaran perkapita sebulan dalam komoditas makanan (Food) pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 500.878,-, pengeluaran penduduk pada tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan belanja, dimana pada tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 478.106,- sedangkan untuk komoditi bukan makanan (Non Food) pada tahun 2022 sebesar Rp. 902.650, besaran nilai konsumsi tersebut cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun sebelumnya sebesar Rp.925.803, adapun komoditi penyumbang terbesar untuk sub golongan makanan adalah kelompok makanan dan minuman olahan yang sudah jadi, kedua terbesar yakni komoditi padi-padian sebesar 8,45 persen, sedangkan untuk sub golongan non makanan dipengaruhi oleh pengeluaran

kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga yakni sebesar 22,76 persen setelah belanja aneka barang dan jasa sebesar 9,45 persen.

Grafik 2.65.
Perkembangan Pengeluaran Perkapita
Penduduk Kabupaten Luwu dalam sebulan Tahun 2021 – 2022



Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu

Selain gambaran pengeluaran konsumsi komoditi makanan dan non makanan tersebut diatas, komposisi pengeluaran Rumah Tangga juga dapat dijadikan ukuran guna menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dibawah ini di gambarkan jenis konsumsi kalori per kapita sehari dan konsumsi protein per kapita sehari penduduk Kabupaten Luwu :

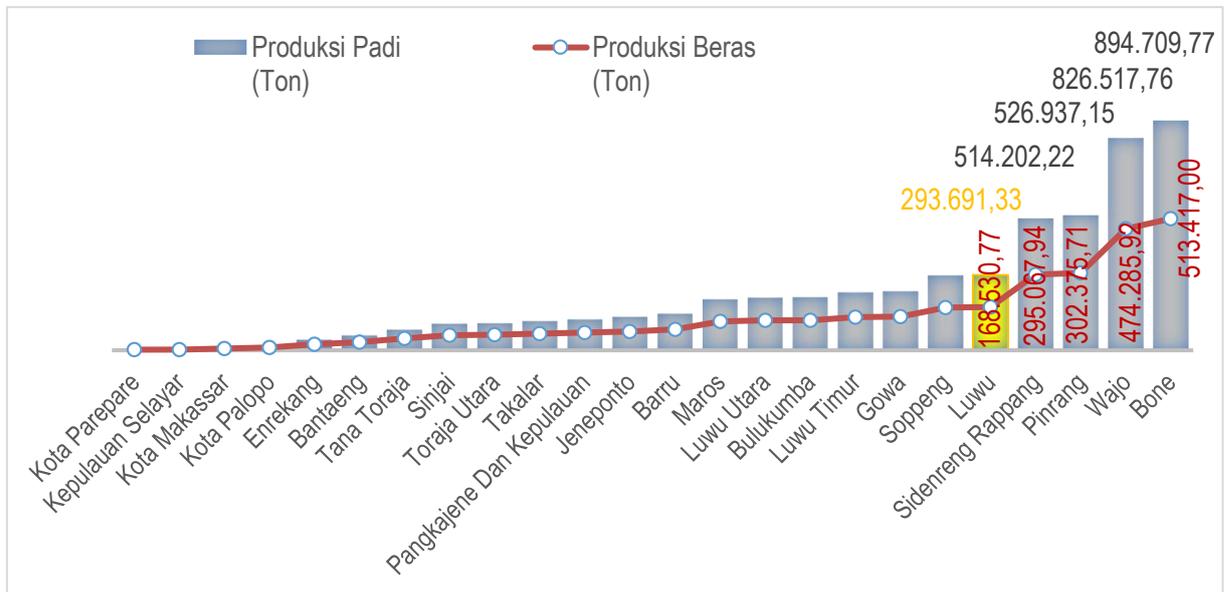
No.	Uraian	Jumlah Konsumsi Kalori	Uraian	Jumlah Konsumsi Protein
1	Padi – Padian	1.034,38 Kkal	Padi – Padian	24,35
2	Makanan dan Minuman Jadi	298,77 Kkal	Ikan/Udang/Cumi/Kepiting	14,28
3	Minyak dan Kelapa	162,88 Kkal	Makanan dan Minuman Jadi	6,86 gram
	Total	2.059,76 Kkal	Total	60,68 Gram

Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu

Selanjutnya untuk produktifitas pertanian, jika dibandingkan dengan Kabupaten Kota se Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu masuk dalam lima besar Kabupaten sebagai Kabupaten Produksi Padi terbesar pada periode tahun 2022, berdasarkan data BPS Propinsi Sulawesi Selatan, capaian Produksi padi Kabupaten Luwu pada tahun 2022 sebesar 293.691,33 ton dengan produksi beras sebesar 168.530,77 ton, capaian tersebut mengalami peningkatan, dimana pada tahun sebelumnya hanya sebesar 277.479,98 ton dengan nilia produksi beras sebesar 159.228,10 ton, adapun capaian produksi

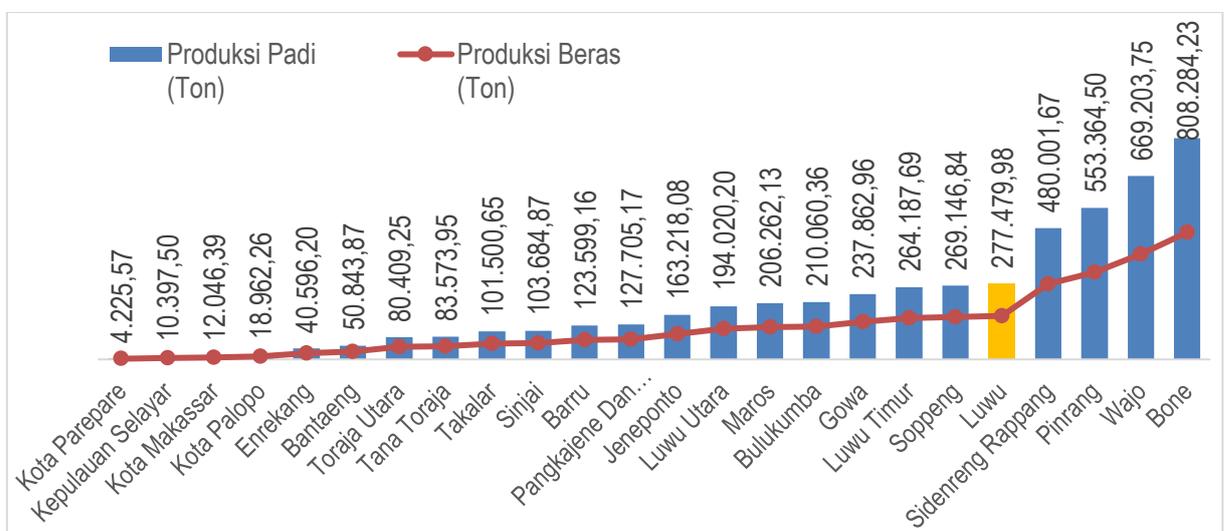
padi terbesar yakni Kabupaten Bone dengan nilai sebesar 894.709,77 ton dengan produksi beras sebesar 513.417,00 ton pada tahun 2022, untuk lebih jelasnya, di bawah ini disajikan dalam bentuk grafik

Grafik 2.66.
Produksi Padi dan Beras Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022



Sumber Data : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Grafik 2.67.
Produksi Padi dan Beras Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021



Sumber Data : BPS Propinsi Sulawesi Selatan

Kondisi karakteristik Indikator Bidang Ketahanan Pangan

a. Perkembangan Antar Waktu

Berdasarkan grafik 3.2 dan grafik 3.3 diatas, dapat diketahui bahwa perkembangan produksi padi dan beras terus mengalami peningkatan yang menandakan bahwa bahan pokok senantiasa tersedia dan dalam keadaan cukup

b. Efektifitas

Jika dilihat dari perkembangan waktu pada tahun 2021 dan 2022 dapat diketahui bahwa efektifitas program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu dalam rangka penanggulangan kemiskinan memiliki dampak yang positif terhadap intervensi ketersediaan pangan

2.7. Kondisi Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Luwu

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan Rp10.739/ orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem.

Salah satu dari sekian banyak instrument kebijakan yang diarahkan dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yakni dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, untuk mempercepat amanah inpres tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Luwu telah memiliki tugas melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan, menyusun program dan kegiatan pada rencana kerja, memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat dan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor 670/IX/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Kabupaten Luwu Tahun 2023-2024 yang keanggotaannya melibatkan seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Berbagai pihak dalam rangka melakukan perencanaan, pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan proram/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Luwu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 telah ditetapkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Yakni Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dalam Nuansa Religi, dengan memperhatikan target yang akan dicapai pada tahun 2024 yakni nol persen dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, maka upaya Pemerintah Kabupaten Luwu dijabarkan dalam 10 (Sepuluh) Misi antara lain yakni 1. mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat; 3. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja.

Selanjutnya upaya Pemerintah Kabupaten Luwu dalam mendukung target pencapaian pengurangan kemiskinan ekstrem hingga mendekati 0-1 persen diperlukan kerja keterpaduan dan sinergitas program dengan cara memastikan keterkaitan antar program pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah agar saling melengkapi serta mengacu pada sasaran dan wilayah yang sama, dimana di fokuskan pada wilayah kantong-kantong kemiskinan melalui skema kerjasama dan pendanaan multisektor.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu, persentase tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Luwu pada tahun 2022 sebesar 1,97 persen, capaian tersebut mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi sebesar 1,97 persen, dengan jumlah penduduk miskin ekstrem sebesar 7.320 jiwa pada tahun 2022.

2.8. Rencana Kerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Rencana Kerja dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Luwu pada Tahun 2023-2024 akan difokuskan pada pemulihan ekonomi melalui program pemberdayaan, pemberian fasilitas dan kemudahan untuk pelaku UMKM dengan melakukan strategi pengurangan beban masyarakat dan peningkatan pendapatan serta meminimalkan wilayah kantong kemiskinan, dibawah ini digambarkan beberapa program dan sub. program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Pengelolaan SDA
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

6. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
7. Program Penyelenggaraan Jalan
8. Program Pengembangan Perumahan
9. Program Kawasan Permukiman
10. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
11. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
12. Program Pemberdayaan Sosial
13. Program Rehabilitasi Sosial
14. Program Perlindungan Jaminan Sosial
15. Program Penanganan Bencana
16. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
17. Program Penempatan Tenaga Kerja
18. Program Hubungan Industrial
19. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
20. Program Perlindungan Perempuan
21. Program Pengelolaan Sistem Data gender dan Anak
22. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketaanan Pangan Masyarakat
23. Program Penanganan Kerawanan Pangan
24. Proram Pendaftaran Penduduk
25. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
26. Program Peningkatan Kerja Sama Desa
27. Program Administrasi Pemerintahan Desa
28. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
29. Program Pengendalian Penduduk
30. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
31. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

32. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
33. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
34. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
35. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
36. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
37. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
38. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
39. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
40. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
41. Program Penyuluhan Pertanian
42. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

BAB III

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN RENCANA AKSI KABUPATEN LUWU

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Luwu yakni : pembangunan sarana prasarana dan akses terhadap pendidikan, pemberian bantuan pendidikan, peningkatan ketersediaan PSU, pemberian tunjangan kepada guru di daerah terpencil, peningkatan mutu pendidikan dan penataan ketersediaan guru yang cukup di semua sekolah, meningkatkan peran serta masyarakat terhadap kegiatan pendidikan formal dan non formal, Peningkatan sarana prasarana dan kapasitas tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan dan sosialisasi PHBS untuk mendukung UPP dan UKM, Penanganan AKI dan perbaikan gizi masyarakat, Peningkatan akses jalan pada daerah 3T (terpencil, tertinggal, terisolir), peningkatan jalan, pengembangan sarana prasarana jalan. Peningkatan infrastruktur irigasi, pengendali banjir, persampahan dan saluran pembuangan/ drainase, pengembangan fasilitas perhubungan dan aksesibilitas angkutan umum ke wilayah kecamatan , pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangannya pemukiman kumuh, rehabilitasi rumah layak huni, peningkatan fasilitas umum dan infrastruktur perkotaan, Peningkatan kapasitas dan kapabilitas koperasi dan UMKM, peningkatan akses UMKM terhadap permodalan dan layanan perbankan, mendorong usaha ekonomi kreatif serta pengembangan pariwisata daerah, pembinaan SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif. Peningkatan daya saing tenaga kerja, peningkatan pelayanan bagi pencari kerja melalui bursa kerja online dan kerjasama dengan pihak ketiga, Pengembangan irigasi pertanian dan peningkatan pengelolaan potensi perikanan. Pemberian bantuan bibit kepada kelompok tani, pemantapan sistem pertanian berkelanjutan berbasis lptek dan sumber daya lokal serta mendorong kemitraan, pengembangan kapasitas petani, peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan desa peningkatan dan pengembangan pemberdayaan masyarakat desa pembinaan dan peningkatan kapasitas BUMDes.

RENCANA PROGRAM DAN SUB PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN LUWU TAHUN 2024

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					
				1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
						1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.725.155.762,00
						1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	400.000.000,00
						1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	18.168.625.000,00
						1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	257.289.562,00
						1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	1.099.679.006,00
						1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	31.726.431.000,00

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.500.000.000,00
						1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	3.138.627.137,00
						1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	183.750.000,00
						1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	3.938.995.380,00
						1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	15.462.261.492,00
				1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
						1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.314.740.556,00
						1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	170.100.000,00
						1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	708.000.000,00

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	7.796.714.057,00
						1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9.175.146.500,00
						1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.588.658.905,00
						1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	970.948.496,00
						1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	17.275.590.000,00
						1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	179.999.469,00
						1.01.02.2.02.0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	1.124.840.311,00
						1.01.02.2.02.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	305.134.500,00

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	298.590.425,00
						1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	969.337.091,00
						1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	787.500.000,00
						1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	8.073.827.921,00
				1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
						1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.893.494.000,00
						1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	751.597.568,00
						1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	3.935.920.000,00

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	100.000.000,00
						1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	26.212.302,00
						1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	621.459.432,00
						1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	375.000.000,00
				1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
						1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	249.998.146,00
						1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.984.890.000,00
						1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium	324.993.000,00
						1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	420.000.000,00

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Kesehatan	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
						1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.490.206.492,00
						1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	29.916.879.590,00
						1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.387.290.506,00
						1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	6.495.451.940,00
						1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.987.571.540,00
						1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.571.567.076,00
				1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
						1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	114.599.142,00

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	103.000.000,00
						1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	41.389.000,00
						1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	87.195.000,00
						1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	175.898.660,00
						1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	96.892.468,00
						1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	139.980.000,00
						1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	97.550.000,00
						1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	34.320.000,00
						1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	4.527.468,00
						1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	47.956.000,00
						1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10.907.082,00

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	92.847.650,00
						1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24.700.000,00
						1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	19.751.993,00
						1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	227.762.341,00
						1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	36.000.000,00
						1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	24.999.646,00
						1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	744.084.200,00
						1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	29.266.495.743,00
						1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	299.972.093,00
						1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	84.999.200,00

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					
				1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
						1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	842.500.000,00
						1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	250.044.000,00
				1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
						1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	149.995.300,00
						1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	11.306.873.530,00
						1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	702.000.000,00

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					
				1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
						1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	570.000.000,00
3		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					
				1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			
						1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	1.134.828.650,00

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4		1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					
				1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			
						1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1.684.999.000,00
5		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					
				1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			
						1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	10.991.505.060,00
						1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	52.297.540.755,00
						1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	8.858.005.550,00
						1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	599.996.820,00

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	4.400.400.000,00
						1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	7.518.998.580,00
						1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.000.061.946,00
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					
				1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
						1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	4.500.990,00
						1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	10.005.013,00
2		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
						1.04.03.2.02.0011	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	5.000.397,00
				1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
						1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	5.000.013,00
3		1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
				1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	500.000.000,00
4		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					
				1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
						1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	10.859.719.750,00
1	Dinas Sosial	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)			
						1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	1.025.461,00
2		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					
				1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
						1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	11.667.516,00
						1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	8.252.016,00
						1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	5.583.059,00
						1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	10.977.903,00

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			
						1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	8.298.237,00
3		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					
				1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
						1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	39.028.564,00
						1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	429.928.825,00

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA					
				1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
						1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	40.172.093,00
1	Dinas Ketenagakerjaan	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					
				2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			
						2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	66.773.250,00
						2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	18.416.230,00

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					
				2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			
						2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	34.632.930,00
						2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	23.115.692,00
3		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					
				2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
						2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	700.595.293,00

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4		3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					
				3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian			
						3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	31.585.477,00
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
				2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
						2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.151,00
2		2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM					

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			DATA GENDER DAN ANAK					
				2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
						2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	30.001.829,00
1	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					
				2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	16.524.640,00
						2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	25.986.962,00
				2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			
						2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200.042.520,00
				2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			
						2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	16.207.781,00
2		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			
						2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.829.128,00
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
				2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
						2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	54.681.411,00
						2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	269.485.860,00
2		2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan			
						2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	5.604.425,00
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					
				2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			
						2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	10.865.000,00
						2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	12.060.012,00
2		2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					
				2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
						2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	31.329.000,00

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3		2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
						2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	26.112.268,00

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	27.516.498,00
						2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	500.000.000,00

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
				2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
						2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	244.983.550,00
2		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
				2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
						2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	588.177.500,00

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			
						2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	933.000.000,00
				2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
						2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	36.859.850,00
						2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	721.865.842,00
						2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.204.788.500,00

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
						2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	2.470.750.000,00
3		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
				2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
						2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	396.231.000,00

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
				2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
						2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	18.282.952,00
1	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					
				2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
						2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	25.001.734,00

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Perikanan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					
				3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
						3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.066.865.000,00
				3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			
						3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	24.000.000,00
2		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					
				3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.085.292.500,00
						3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.141.751.000,00
3		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					
				3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
						3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	918.037.500,00
1	Dinas Pariwisata	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
						3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4.294.478,00
1	Dinas Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					
				3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			
						3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	586.773.000,00

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			
						3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.068.750.000,00
2		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					
				3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			
						3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	8.890.647.500,00

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	426.487.500,00
						3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	3.414.975.000,00
3		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					
				3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			
						3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.681.040,00

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					
				3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			
						3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1.864.942.138,00
						3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	943.287.930,00
1	Dinas Perdagangan	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					
				3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			

NO	OPD	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KODE KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KODE SUB KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	103.703.794,00
				3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
						3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1.674.453,00
						3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2.752.000,00
TOTAL								378.272.432.994,00

BAB IV

PENUTUP

Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Luwu Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Luwu.

Penyusunan RAT ini adalah merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendagri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tata Kerja dan Penyelaras Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, diselaraskan atau dipadukan dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kabupaten Luwu ini merupakan acuan untuk melaksanakan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Luwu ini diharapkan juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder dalam melaksanakan program kerja masing-masing.,